



KABUPATEN TANGGERANG: POTENSI & KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

2026



Tim Peneliti

Dr Tanti Novianti

Dr Nia Kurniawati Hidayat

Titin Suhartini, SE

Dr. Alfa Chasanah, MA

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
BAB II METODE.....	2
2.1 Metode Pengumpulan Data	3
2.2 Metode Analisis.....	4
BAB III PEMBAHASAN.....	4
3.1 Keadaan Wilayah.....	4
3.2 Kondisi Demografi.....	5
3.3 Data Penggunaan Lahan.....	15
3.4 Potensi Pertanian.....	25
3.5 Potensi Bencana	45
3.5.1 Rekapitulasi Potensi Bencana Per BPP.....	45
3.5.2 Agregat Kabupaten Tangerang	49
3.6 Rekomendasi Penanganan.....	50
3.7 Alternatif Pemecahan Masalah.....	63
3.7.1 Pemecahan Masalah Per BPP.....	63
3.7.2 Agregat Kabupaten	71
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG.....	73
4.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.....	73
4.1.1 Faktor Internal: Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	73
4.1.2 Faktor Internal: Kelemahan (<i>Weakness</i>)	76

4.1.3 Faktor Eksternal: Peluang (<i>Opportunities</i>).....	78
4.1.4 Faktor Eksternal: Ancaman (<i>Threats</i>).....	80
4.2 Formulasi Strategi SWOT.....	81
4.2.1 Strategi SO (<i>Strengths-Opportunities</i>): <i>Growth Strategy</i>	81
4.2.2 Strategi WO (<i>Weaknesses - Opportunities</i>): <i>Diversification Strategy</i>	83
4.2.3. Strategi ST (<i>Strengths-Threats</i>): <i>Defensive Strategy</i>	86
4.2.4. Strategi WT (<i>Weakness - Threats</i>): <i>Survival Strategy</i>	88
BAB IV PENUTUP	90
5.1 Simpulan	90
5.2 Saran	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Tangerang	3
Tabel 2. Gambaran Demografi BPP Sepatan Tahun 2024.....	7
Tabel 3. Gambaran Demografi BPP Kaliasin Tahun 2024.....	9
Tabel 4. Gambaran Demografi BPP Sukatani Tahun 2024	10
Tabel 5. Gambaran Demografi BPP Kronjo Tahun 2024.....	11
Tabel 6. Gambaran Demografi BPP Kampung Melayu Tahun 2024.....	12
Tabel 7. Gambaran Demografi BPP Tegal Kunir Tahun 2024	13
Tabel 8. Gambaran Demografi BPP Carenang Tahun 2024.....	13
Tabel 9. Gambaran Demografi BPP Caringin Tahun 2024.....	15
Tabel 10. Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering BPP Sepatan tahun 2023	17
Tabel 11. Struktur penggunaan lahan pertanian di BPP Kaliasin (ha).....	17
Tabel 12. Stuktur Penggunaan Lahan di BPP Sukatani	20
Tabel 13. Struktur Penggunaan Lahan BPP Kronjo	21
Tabel 14. Stuktur Penggunaan Lahan BPP Kampung Melayu (ha).....	22
Tabel 15. Struktur Penggunaan Lahan BPP Tegal Kunir	23
Tabel 16. Struktur Penggunaan Lahan BPP Carenang	23
Tabel 17. Stuktur Penggunaan Lahan BPP Caringin.....	24
Tabel 18. Potensi Pertanian BPP Sepatan.....	28
Tabel 19. Potensi Pertanian BPP Kaliasin	30
Tabel 20. Potensi Pertanian BPP Sukatani	34
Tabel 21. Potensi Pertanian BPP Kronjo.....	36
Tabel 22. Potensi Pertanian BPP Kampung Melayu	38
Tabel 23. Potensi pertanian BPP Tegal Kunir	41
Tabel 24. Potensi pertanian per kecamatan (BPP Carenang).....	44
Tabel 25. Potensi pertanian BPP Caringin.....	46
Tabel 26. Potensi Bencana BPP Sepatan	47
Tabel 27. Potensi Bencana BPP Kaliasin	47
Tabel 28. Potensi Bencana BPP Sukatani.....	48

Tabel 29. Potensi Bencana BPP Kronjo	48
Tabel 30. Potensi Bencana BPP Kampung Melayu.....	49
Tabel 31. Potensi Bencana BPP Tegal Kunir	49
Tabel 32. Potensi Bencana BPP Carenang	50
Tabel 33. Potensi Bencana BPP Caringin.....	50
Tabel 34. Matriks Prioritas Masalah BPP Sepatan (G–M–P)	52
Tabel 35. Matriks Prioritas Masalah BPP Kaliasin (G–M–P).....	53
Tabel 36. Matriks Prioritas Masalah BPP Sukatani (G–M–P).....	55
Tabel 37. Matriks Prioritas Masalah BPP Kronjo (G–M–P).....	56
Tabel 38. Matriks Prioritas Masalah BPP Kampung Melayu (G–M–P).....	58
Tabel 39. Matriks Prioritas Masalah BPP Tegal Kunir (G–M–P)	59
Tabel 40. Matriks Prioritas Masalah BPP Carenang (G–M–P).....	61
Tabel 41. Masalah dan Solusi Agregat Umum	63
Tabel 42. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Sepatan.....	65
Tabel 43. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Kaliasin	66
Tabel 44. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Sukatani	67
Tabel 45. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Kronjo	67
Tabel 46. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Kampung Melayu	68
Tabel 47. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Tegal Kunir	69
Tabel 48. Masalah Utama dan Prioritas GMP BPP Carenang.....	70
Tabel 49. Masalah Utama dan Prioritas GMP BPP Caringin	71
Tabel 50. Masalah dan Solusi Agregat Tanaman Pangan.....	72
Tabel 51. Masalah dan Solusi Agregat Hortikultura.....	73
Tabel 52. Masalah dan Solusi Agregat Ternak.....	73
Tabel 53. Masalah dan Solusi Agregat Umum	74
Tabel 54. Ringkasan Matriks Strategi Swot.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis SWOT	5
Gambar 2. Peta Komoditas Unggulan Kabupaten Tangerang	27
Gambar 3. Matriks SWOT Komprehensif Pengembangan Pertanian Kabupaten Tangerang.....	76

IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian di Kabupaten Tangerang memegang peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah pedesaan dan per-urban. Pencapaian tujuan pembangunan pertanian tersebut sangat ditentukan oleh keberadaan kelembagaan penyuluhan yang kuat, adaptif, dan mampu menjembatani inovasi teknologi dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Kelembagaan penyuluhan tidak lagi hanya bertumpu pada hubungan tradisional antara petani dan penyuluh, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang melibatkan pelaku agribisnis, lembaga penelitian, pendidikan, lembaga pelatihan, serta perangkat daerah yang terkait dalam satu ekosistem agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang berkewajiban menyediakan basis data dan informasi yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang tepat sasaran. Salah satu instrumen penting yang dibutuhkan adalah dokumen Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) sebagai potret menyeluruh mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, komoditas unggulan, sarana-prasarana, serta permasalahan yang dihadapi petani pada satuan wilayah tertentu (desa maupun kecamatan). IPW menjadi langkah awal yang krusial dalam siklus penyuluhan, karena dari dokumen inilah dirumuskan arah pengembangan usaha tani, pilihan komoditas prioritas, dan pola intervensi penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal wilayah binaan penyuluh.

Selama ini, pelaksanaan penyuluhan di berbagai wilayah kerap menghadapi kendala berupa keterbatasan data dasar, kurangnya pemutakhiran informasi potensi dan permasalahan di tingkat desa, serta belum optimalnya pemetaan kelembagaan petani dan infrastruktur pendukung pertanian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan program, tumpang tindih kegiatan, serta rendahnya efektivitas intervensi pemerintah di bidang pertanian. Melalui penyusunan IPW Kabupaten Tangerang, diharapkan tersedia dokumen perencanaan kewilayahan yang lebih komprehensif, tidak hanya menggambarkan kondisi fisik dan potensi ekonomi pertanian, tetapi juga mengelaborasi aspek sosial, kelembagaan, dan permasalahan mendasar yang dihadapi petani sebagai dasar perumusan rekomendasi pola pembangunan usaha tani di masing-masing wilayah.

Selain memperkuat landasan teknis, penyusunan IPW Kabupaten Tangerang juga merupakan implementasi dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan kinerja. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang menggariskan perlunya penyuluhan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan. Di tingkat sektoral, Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga menempatkan IPW sebagai salah satu prasyarat penyusunan program penyuluhan yang responsif terhadap potensi dan masalah lokal. Oleh karena itu, penyusunan IPW Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani dan pembangunan pertanian daerah.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan laporan ini yakni:

1. Menggali potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial-ekonomi di Kabupaten Tangerang untuk mendukung pengembangan pertanian.
2. Mengidentifikasi masalah utama dalam usaha tani di tingkat kecamatan dan kabupaten.
3. Menyusun acuan untuk penyusunan Program Penyuluhan Pertanian yang tepat sasaran dan efektif.

BAB II METODE

2.1 Metode pengumpulan data

Data yang digunakan untuk menyusun laporan kajian Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan oleh delapan BPP yang meliputi beberapa kecamatan wilayah kerja masing-masing dan tertuang dalam IPW Kecamatan dan BPP yang kemudian dikonfirmasi melalui *Focus Group Discussion* bersama Dinas Pertanian dan delapan koordinator BPP Kabupaten Tangerang. Adapun delapan BPP Kabupaten Tangerang meliputi:

Tabel 1. Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Tangerang

No	BPP	Kecamatan Binaan	Luas wilayah (km ²)
1	Sepatan	Sepatan	19,22
		Sepatan Timur	19,66
		Sukadiri	24,99
2	Kaliasin	Sukamulya	25,44
		Kresek	29,99
		Balaraja	32,30
		Jayanti	24,88
3	Sukatani	Rajeg	53,30
		Pasar Kemis	30,73
		Sindang Jaya	41,39
		Cikupa	46,00
4	Kronjo	Kronjo	46,51
		Gunung Kaler	32,77
		Mekar Baru	25,78
5	Kampung Melayu	Teluknaga	52,41
		Kosambi	36,09
		Pakuhaji	54,55
6	Tegal Kunir	Mauk	44,94
		Kemiri	33,45
7	Carenang	Cisoka	31,21
		Solear	34,07
		Tigaraksa	55,30
		Jambe	28,25
8	Caringin	Legok	37,28
		Panongan	36,15

	Curug	30,83
	Pagedangan	50,75
	Cisauk	30,05
	Kelapa Dua	26,22

Sumber: BPS (2024)

Pengumpulan data pada laporan IPW Kecamatan oleh BPP dilaksanakan secara bertahap selama bulan September hingga November 2024 di masing-masing kecamatan dengan memanfaatkan kegiatan PRA. Proses pengumpulan data dilakukan di beberapa tempat strategis, seperti kantor desa atau kelurahan, kelompok tani, serta lokasi usaha tani yang tersebar di 29 kecamatan dan mencakup delapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kabupaten Tangerang. Data primer untuk menyusun IPW di level kecamatan dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Data primer tersebut kemudian diperkuat dengan data sekunder sebagai pelengkap dari berbagai sumber, seperti monografi kecamatan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pertanian setempat.

2.2 Metode Analisis

Tujuan satu yakni identifikasi potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial-ekonomi di Kabupaten Tangerang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk setiap BPP. Sementara itu, tujuan dua yakni masalah utama dalam usaha tani di tingkat kecamatan dan kabupaten dianalisis dengan menggunakan metode GMP (Gawat, Mendesak, Penyebaran) untuk menganalisis masalah berdasarkan tingkat kegawatan (G), kebutuhan mendesak (M), dan penyebaran (P). Skoring: 1-5 untuk masing-masing aspek, dengan total skor menentukan prioritas masalah. Analisis tersebut sejalan dengan analisis permasalahan yang tertuang dalam IPW di level kecamatan.

Selanjutnya, rekomendasi program akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Analisis SWOT digunakan sebagai metode utama dalam kajian ini untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi objek kajian, sekaligus merumuskan alternatif strategi yang sesuai. SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman), yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal organisasi atau wilayah serta lingkungan eksternalnya. Dalam pelaksanaannya, analisis dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen seperti laporan tahunan, profil wilayah, rencana strategis, dan peraturan terkait, serta data primer dari wawancara dengan pemangku kepentingan dan observasi lapangan, yang seluruhnya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman objek kajian.

Faktor internal kemudian diidentifikasi berdasarkan kondisi internal objek kajian, mencakup sumber daya manusia (kompetensi, jumlah, dan kualitas), sumber daya fisik dan keuangan (fasilitas, anggaran, dan infrastruktur), kelembagaan (struktur organisasi, tata kelola, serta peran dan fungsi), serta proses dan kinerja (efisiensi, efektivitas, dan inovasi). Faktor-faktor yang mendukung pencapaian tujuan dikategorikan sebagai kekuatan, sedangkan faktor-faktor yang menghambat dikategorikan sebagai kelemahan.

Di sisi lain, faktor eksternal diidentifikasi dari lingkungan luar objek kajian, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik wilayah, kebijakan pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten/kota), perkembangan teknologi, pasar, dan persaingan, serta tren dan isu strategis seperti perubahan iklim dan digitalisasi. Faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan dikategorikan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang berpotensi menghambat dikategorikan sebagai ancaman.

Setelah faktor-faktor tersebut diidentifikasi, seluruh faktor disusun dalam bentuk matriks SWOT, yaitu matriks 2×2 yang menghubungkan faktor internal dan eksternal, terdiri dari kekuatan vs peluang (strategi SO), kekuatan vs ancaman (strategi ST), kelemahan vs peluang (strategi WO), dan kelemahan vs ancaman (strategi WT).

Faktor Internal → Faktor Eksternal ↓	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Opportunities)	Strategi SO Memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang.	Strategi WO Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
Ancaman (Threats)	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.	Strategi WT Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Gambar 1. Analisis SWOT

Matriks ini menjadi dasar untuk merumuskan alternatif strategi, yaitu strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang, strategi ST yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, strategi WO yang mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, serta strategi WT yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang diusulkan kemudian diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, kelayakan, dan keterkaitannya dengan tujuan kajian.

Hasil analisis SWOT dan strategi yang dirumuskan selanjutnya divalidasi melalui diskusi dengan tim kajian dan/atau pemangku kepentingan utama, agar hasilnya relevan dan dapat diterima secara substantif. Setelah proses validasi selesai, hasil akhir disajikan dalam bentuk narasi dan matriks SWOT dalam laporan kajian, sehingga analisis SWOT tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar logis untuk perumusan rekomendasi strategis yang konkret dan terukur.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. KEADAAN WILAYAH

Kabupaten Tangerang merupakan sebuah wilayah yang terletak di bagian utara Provinsi Banten, Indonesia, dengan karakteristik geografis yang menarik dan beragam. Secara keseluruhan, kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan mencapai 1.034,54 kilometer persegi, yang pada tahun 2024 terbagi menjadi 29 kecamatan dengan total 274 desa atau kelurahan. Kecamatan Tigaraksa menonjol sebagai yang terluas dengan area 55,30 kilometer persegi, sementara Sepatan merupakan kecamatan terkecil dengan luas hanya 19,22 kilometer persegi. Selain itu, wilayah ini juga mencakup satu pulau yang terletak di Kecamatan Teluknaga, menambah keragaman geografisnya.

Dari segi batas wilayah, Kabupaten Tangerang dikelilingi oleh beberapa daerah strategis. Di sebelah utara, Kabupaten Tangerang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, yang memberikan akses maritim penting. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah barat dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, serta sebelah timur dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Jakarta Barat. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kecamatan Tigaraksa, yang juga menjadi titik referensi untuk mengukur jarak ke kecamatan-kecamatan lain. Jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota

kabupaten bervariasi; Kecamatan Kosambi memiliki jarak terjauh yaitu 31,55 kilometer, sedangkan Tigaraksa sendiri berada di jarak nol kilometer sebagai pusatnya.

Secara geografis, Kabupaten Tangerang terletak pada koordinat 6°00'00'' hingga 6°20'00'' Lintang Selatan dan 106°20'00'' hingga 106°43'00'' Bujur Timur, menempatkannya dalam posisi yang strategis di wilayah Jabodetabek. Topografi wilayah ini didominasi oleh dataran rendah, dengan seluruh desa atau kelurahan berada di kawasan tersebut. Namun, ada 23 desa atau kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sementara 251 desa atau kelurahan lainnya tidak memiliki batas laut. Ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 85 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata ketinggian mencapai 18,67 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Cisauk memiliki ketinggian tertinggi yaitu 53,97 meter di atas permukaan laut, sedangkan Mauk merupakan yang terendah dengan 1,08 meter di atas permukaan laut.

Selain aspek geografisnya, Kabupaten Tangerang juga memiliki iklim yang khas, yang dipengaruhi oleh posisinya di dekat pesisir utara Jawa. Kabupaten Tangerang memiliki topografi datar hingga bergelombang, ketinggian 0-70 mdpl. Jenis tanah dominan aluvial, latosol, dan podsolik merah kuning. Iklim Kabupaten Tangerang menunjukkan pola tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada bulan-bulan tertentu. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mm/tahun dan suhu 26-32°C. Hal tersebut memengaruhi aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari di wilayah ini. Secara umum wilayah Kabupaten Tangerang terhampar pada dataran hingga perbukitan rendah, didominasi oleh jenis tanah aluvial, latosol, podsolik merah kuning, serta grumosol di beberapa lokasi. Curah hujan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun dan suhu rata-rata berkisar antara 26–32°C, menciptakan kondisi yang kondusif bagi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, serta peternakan.

3.2. KONDISI DEMOGRAFI

Kabupaten Tangerang menunjukkan karakter wilayah urban–periurban dengan dinamika kependudukan yang tinggi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk mencapai sekitar 3,40 juta jiwa, meningkat konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk berada pada kisaran 1,13 persen, menunjukkan bahwa tekanan demografis masih berlangsung meskipun mulai melambat dibanding periode sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan kombinasi pertumbuhan alami dan arus migrasi masuk yang kuat, terutama karena peran Kabupaten Tangerang sebagai kawasan penyangga utama DKI Jakarta dan pusat industri di Provinsi Banten. Struktur demografi Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia produktif. Piramida penduduk tahun 2024 memperlihatkan basis yang relatif lebar pada kelompok umur 15–64 tahun, yang menandakan potensi bonus demografi masih berlangsung. Rasio jenis kelamin relatif seimbang, yakni sebesar 103.64 yang berarti bahwa untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 103 laki-laki.

Adapun kondisi demografi secara detail untuk setiap kecamatan pada BPP memiliki karakteristik yang cukup beragam.

BPP Sepatan

BPP Sepatan mengelola wilayah Kecamatan Sepatan, Sepatan Timur dan Sukadiri yang berada di koridor antara pesisir dan wilayah perkotaan). Kecamatan Sepatan pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk 114.589 jiwa. Dalam periode 2020–2024, laju pertumbuhan penduduknya tercatat 2,05 persen per tahun, menunjukkan dinamika kependudukan yang cukup tinggi untuk kecamatan non-pesisir. Sepatan menyumbang sekitar 3,40 persen dari total penduduk Kabupaten Tangerang, menempatkannya sebagai salah satu kecamatan dengan kontribusi penduduk yang signifikan.

Kepadatan penduduk Sepatan mencapai 5.961,97 jiwa per km², yang termasuk sangat tinggi di Kabupaten Tangerang. Angka ini menguatkan karakter Sepatan sebagai wilayah permukiman padat dengan tekanan kependudukan yang besar. Dari sisi struktur jenis kelamin, rasio laki-laki terhadap perempuan di Sepatan berada di atas angka keseimbangan, yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Pola ini lazim pada kecamatan dengan mobilitas tenaga kerja tinggi dan kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi.

Kecamatan Sepatan Timur memiliki jumlah penduduk 108.232 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2020–2024 tercatat 2,11 persen per tahun, sedikit lebih tinggi dibanding Sepatan. Kontribusi Sepatan Timur terhadap total penduduk Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 3,21 persen, mencerminkan peran penting kecamatan ini dalam struktur kependudukan wilayah utara.

Sebagai kecamatan hasil pemekaran, Sepatan Timur menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang relatif agresif. Kepadatan penduduknya berada pada kisaran tinggi, meskipun lebih rendah dibanding Sepatan. Rasio jenis kelamin penduduk Sepatan Timur tercatat 106,53, yang berarti terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Angka ini menunjukkan dominasi laki-laki yang cukup kuat, sejalan dengan karakter wilayah permukiman tenaga kerja dan aktivitas ekonomi penunjang kawasan industri di sekitarnya.

Kecamatan Sukadiri memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah dibanding dua kecamatan lainnya, yakni 67.911 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduknya selama periode 2020–2024 tercatat 1,85 persen per tahun, lebih rendah dibanding Sepatan dan Sepatan Timur. Secara proporsional, Sukadiri hanya menyumbang sekitar 2,01 persen dari total penduduk Kabupaten Tangerang.

Kepadatan penduduk Sukadiri mencapai 2.717,53 jiwa per km², jauh lebih rendah dibanding Sepatan dan Sepatan Timur. Perbedaan ini mencerminkan karakter Sukadiri sebagai kecamatan pesisir dengan pola permukiman yang lebih menyebar. Rasio jenis kelamin Sukadiri berada lebih dekat ke angka seimbang dibanding kecamatan non-pesisir, yang menunjukkan struktur penduduk yang relatif stabil tanpa dominasi kuat salah satu jenis kelamin.

Secara ringkas, Sepatan merupakan kecamatan dengan tekanan kependudukan paling tinggi diantara kecamatan yang menjadi binaan BPP Sepatan. Hal tersebut ditandai oleh jumlah penduduk besar, laju pertumbuhan relatif tinggi, dan kepadatan yang sangat tinggi. Sepatan Timur mengikuti dengan pola pertumbuhan yang bahkan sedikit lebih cepat, meskipun jumlah penduduk dan kepadatannya sedikit lebih rendah. Sukadiri menempati posisi berbeda dengan jumlah penduduk lebih kecil, pertumbuhan lebih lambat, dan kepadatan jauh lebih rendah, yang dipengaruhi langsung oleh karakter pesisir dan pola ekonomi lokal.

Tabel 2. Gambaran Demografi BPP Sepatan tahun 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	Rasio jenis kelamin
Sepatan	114.589	3,4	2,05	5.961,97	105,28
Sepatan Timur	108.232	3,21	3,21	5.505,19	106,53
Sukadiri	67.911	2,01	1,85	2.717,53	104,51

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Kaliasin

BPP Kaliasin membina membina 4 Kecamatan yaitu Balaraja, Jayanti, Kresek, dan Sukamulya yang relatif masih memiliki basis lahan pertanian luas, terutama sawah dan tegalan. Kecamatan Sukamulya, yang terletak di Kabupaten Tangerang, memiliki luas wilayah sekitar 25,44 km² dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 74.409 jiwa pada tahun 2024. Kecamatan ini mencatatkan rasio jenis kelamin sebesar 102,05, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Dengan kepadatan penduduk yang mencapai 2.954,05 jiwa per km², Sukamulya merupakan salah satu kecamatan yang cukup padat di Kabupaten Tangerang. Penduduk di kecamatan ini mayoritas beragama Islam, meskipun terdapat sejumlah kecil pemeluk agama lain seperti Protestan. Secara keseluruhan, Sukamulya menggambarkan kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, meskipun ada tantangan terkait kepadatan yang cukup tinggi.

Di sisi lain, Kecamatan Kresek, yang memiliki luas wilayah sekitar 29,99 km², mencatatkan jumlah penduduk sekitar 72.750 jiwa pada tahun yang sama. Rasio jenis kelamin di Kresek adalah 103,34, yang menunjukkan bahwa laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduknya mencapai 2.427,54 jiwa per km², yang sedikit lebih rendah dibandingkan Sukamulya, namun masih menunjukkan bahwa Kresek adalah daerah dengan tingkat populasi yang padat. Seperti halnya Sukamulya, mayoritas penduduk Kresek juga beragama Islam. Kecenderungan ini mencerminkan karakteristik sosial yang cukup homogen, dengan sebagian besar masyarakatnya memiliki latar belakang agama yang sama.

Kecamatan Balaraja, yang memiliki luas wilayah 32,30 km², menunjukkan kondisi demografi yang cukup menarik. Dengan jumlah penduduk mencapai 122.490 jiwa, Balaraja adalah salah satu kecamatan dengan populasi terbesar di Kabupaten Tangerang. Rasio jenis kelamin di Balaraja tercatat sebesar 103,84, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 3.906,38 jiwa per km², menjadikannya salah satu kecamatan dengan kepadatan tertinggi di daerah tersebut. Seperti dua kecamatan sebelumnya, mayoritas penduduk Balaraja beragama Islam. Populasi yang besar dan padat ini tentunya menuntut perhatian lebih dalam hal penyediaan layanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung kualitas hidup masyarakatnya.

Kecamatan Jayanti, dengan luas wilayah 24,88 km², memiliki jumlah penduduk sekitar 70.840 jiwa pada tahun 2024. Rasio jenis kelamin di Jayanti adalah 103,94, sedikit lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, yang konsisten dengan tren demografis di kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk di Jayanti mencapai 2.879,94 jiwa per km², yang menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup signifikan meskipun tidak setinggi Balaraja. Seperti halnya kecamatan-kecamatan lainnya, mayoritas penduduk Jayanti beragama Islam. Kondisi demografis ini mencerminkan pola pertumbuhan penduduk yang teratur, namun dengan kepadatan yang cukup tinggi yang memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Secara keseluruhan, keempat kecamatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Kepadatan penduduk yang tinggi di masing-masing kecamatan menunjukkan perlunya pengelolaan ruang dan sumber daya yang lebih baik untuk mendukung kualitas hidup masyarakat, baik dari segi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aspek sosial lainnya.

Tabel 3. Gambaran Demografi BPP Kaliasin 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per km ²)	Rasio jenis kelamin penduduk
Sukamulya	75.151	2,23	1,13	2954,05	102,05
Kresek	72.802	2,16	1,4	2427,54	103,34
Balaraja	126.176	3,74	1,65	3906,38	103,84
Jayanti	71.653	2,12	1,31	2879,94	103,94

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Sukatani

BPP Sukatani mempunyai 4 wilayah kerja yaitu Kecamatan Rajeg, Sindang Jaya, Pasar Kemis dan Cikupa. Kecamatan Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, dan Cikupa di Kabupaten Tangerang menunjukkan karakteristik demografi yang beragam, masing-masing dengan tantangan dan potensi yang berbeda dalam hal kependudukan. Di Kecamatan Rajeg, jumlah penduduk mencapai 193.899 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 3,02% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang pesat, yang tentu saja mempengaruhi kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik di daerah tersebut. Kepadatan penduduk di Rajeg mencapai 3.637,88 jiwa per kilometer persegi, yang menggambarkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Selain itu, rasio jenis kelamin di Rajeg menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan rasio 104,81 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Sementara itu, Kecamatan Pasar Kemis memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu mencapai 8.411,23 jiwa per kilometer persegi, Pasar Kemis menjadi salah satu kecamatan dengan densitas penduduk tertinggi di Kabupaten Tangerang. Walaupun data populasi spesifik untuk tahun 2024 tidak tersedia secara rinci dalam laporan ini, tingkat pertumbuhan penduduk di Pasar Kemis diperkirakan sebesar 2,01% per tahun antara 2020 hingga 2024. Rasio jenis kelamin di kecamatan ini juga mencatatkan angka yang menunjukkan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, dengan rasio 102,72 laki-laki per 100 perempuan, yang tidak jauh berbeda dengan kecamatan lainnya di wilayah ini.

Di Kecamatan Sindang Jaya, laju pertumbuhan penduduk sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Rajeg, yaitu 1,93% per tahun pada periode yang sama. Meskipun begitu, kepadatan penduduk di Sindang Jaya tetap cukup tinggi dengan 2.362,72 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelaminnya juga menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan rasio mencapai 103,54 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecamatan ini menunjukkan dinamika penduduk yang cukup stabil meskipun tingkat pertumbuhannya sedikit lebih rendah.

Kecamatan Cikupa, yang berkontribusi sebesar 6,27% terhadap total populasi Kabupaten Tangerang, menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sekitar 2,11% antara 2020 hingga 2024. Kepadatan penduduk di Cikupa tercatat 4.594,33 jiwa per kilometer persegi, mencerminkan tingkat kepadatan yang cukup signifikan, meskipun tidak setinggi Pasar Kemis. Rasio jenis kelaminnya juga serupa dengan kecamatan lainnya, dengan jumlah laki-laki yang sedikit lebih banyak daripada perempuan, yaitu 104,34 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Secara keseluruhan, keempat kecamatan ini menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang relatif tinggi, dengan kepadatan penduduk yang bervariasi, namun cenderung lebih tinggi di Pasar Kemis dan Cikupa. Rasio jenis kelamin yang lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan menjadi hal yang konsisten di semua kecamatan tersebut. Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di Rajeg dan Pasar Kemis, menuntut perhatian khusus dalam hal perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.

Tabel 4. Gambaran Demografi BPP Sukatani 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per km ²)	Rasio jenis kelamin penduduk
Rajeg	193.899	5,75	3,02	3637,88	104,81
Pasar Kemis	258.477	7,66	1,23	8411,23	102,72
Sindang Jaya	97.793	2,90	2,32	2362,72	103,54
Cikupa	211.339	6,27	1,05	4594,33	104,34

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Kronjo

Wilayah Kerja BPP Kronjo meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Mekar Baru. Tiga kecamatan ini memiliki dinamika demografi yang menarik, dengan variasi jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan, dan rasio jenis kelamin. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Kronjo tercatat sebanyak 66.447 jiwa, sementara di Gunung Kaler dan Mekar Baru masing-masing memiliki populasi sebesar 57.007 jiwa dan 44.942 jiwa. Meskipun jumlah penduduk di ketiga kecamatan ini berbeda, masing-masing menunjukkan pola pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Laju pertumbuhan penduduk di ketiga kecamatan juga menunjukkan perbedaan, dengan Kecamatan Mekar Baru mengalami pertumbuhan tercepat di antara ketiganya, yaitu 1,79% per tahun. Sementara itu, Gunung Kaler dan Kronjo memiliki laju pertumbuhan yang sedikit lebih rendah, masing-masing sebesar 1,51% dan 1,29% per tahun. Angka-angka ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat, yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai indikasi dari pertumbuhan ekonomi dan perbaikan dalam kualitas hidup yang terjadi di kawasan ini.

Kepadatan penduduk di ketiga kecamatan ini pun cukup tinggi. Kecamatan Mekar Baru memiliki kepadatan yang paling tinggi, mencapai 1.743,29 jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh Gunung Kaler dengan 1.739,61 jiwa per kilometer persegi, dan Kronjo dengan 1.428,66 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan yang relatif tinggi ini menunjukkan adanya konsentrasi populasi yang cukup padat, yang bisa menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selain itu, rasio jenis kelamin penduduk di ketiga kecamatan ini sedikit lebih condong ke laki-laki. Di Kecamatan Kronjo, rasio jenis kelamin tercatat sebesar 100,92, yang berarti terdapat sedikit lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Rasio ini juga tercatat lebih tinggi di Gunung Kaler dan Mekar Baru, dengan masing-masing angka 102,46 dan 102,93. Angka ini mencerminkan perbedaan jumlah antara pria dan wanita di ketiga kecamatan, meskipun

perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal ini bisa jadi terkait dengan faktor-faktor sosial-ekonomi, serta migrasi dan pola pekerjaan yang mungkin memengaruhi distribusi jenis kelamin di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, ketiga kecamatan ini menunjukkan dinamika kependudukan yang signifikan, yang dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan wilayah hingga penyediaan layanan publik.

Tabel 5. Gambaran Demografi BPP Kronjo 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per km ²)	Rasio jenis kelamin penduduk
Kronjo	66.447	1,97	1,51	1428,66	100,92
Gunung Kaler	57.007	1,69	1,29	1739,61	102,46
Mekar Baru	44.942	1,33	1,79	1743,29	102,93

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Kampung Melayu

BPP Kampung Melayu membina tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kosambi, Pakuhaji, dan Teluknaga yang didominasi wilayah pesisir, dataran rendah, dan dekat dengan bandara maupun kawasan pelabuhan. Kecamatan Teluknaga, Kosambi, dan Pakuhaji di Kabupaten Tangerang menunjukkan variasi yang signifikan dalam kondisi demografi dan kependudukan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Teluknaga tercatat mencapai 171.028 jiwa, sementara Kosambi memiliki 113.813 jiwa, dan Pakuhaji sebanyak 129.632 jiwa. Masing-masing kecamatan ini berkontribusi terhadap total populasi Kabupaten Tangerang, dengan Teluknaga menyumbang sekitar 5,07%, Kosambi 3,37%, dan Pakuhaji 3,84%. Ketiga kecamatan ini juga menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup stabil, di mana Teluknaga mengalami pertumbuhan sebesar 1,82% per tahun, Kosambi 1,89%, dan Pakuhaji 1,81% dalam periode 2020-2024.

Kepadatan penduduk di setiap kecamatan juga menggambarkan tingginya konsentrasi penduduk, yang tercatat di Teluknaga dengan 3.263,27 jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh Kosambi dengan 3.153,59 jiwa/km², dan Pakuhaji dengan 2.376,39 jiwa/km². Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan ini memiliki kepadatan yang relatif tinggi, yang dapat mempengaruhi perencanaan infrastruktur dan pelayanan publik.

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di ketiga kecamatan ini menunjukkan adanya dominasi jumlah laki-laki dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin di Teluknaga tercatat 104,19, di Kosambi 103,90, dan di Pakuhaji 105,92, yang berarti terdapat lebih banyak laki-laki daripada perempuan di setiap kecamatan tersebut. Data ini penting untuk merencanakan berbagai kebijakan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di ketiga kecamatan ini. Dengan laju pertumbuhan yang stabil, kepadatan penduduk yang tinggi, dan komposisi jenis kelamin yang seimbang, ketiga kecamatan ini menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengembangan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.

Tabel 6. Gambaran Demografi BPP Kampung Melayu 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per km ²)	Rasio jenis kelamin penduduk
Teluknaga	171.028	5,07	1,82	3.263,27	104,19
Kosambi	113.813	3,37	1,89	3.153,59	103,90
Pakuhaji	129.632	3,84	1,81	2.376,39	105,92

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Tegal Kunir

BPP Tegal Kunir membina dua kecamatan yakni Kecamatan Mauk dan Kemiri. Pada tahun 2024, Kecamatan Mauk memiliki jumlah penduduk 92.687 jiwa. Besaran ini merepresentasikan sekitar 2,75% dari total penduduk Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan bahwa Mauk merupakan kecamatan dengan kontribusi penduduk menengah dibanding kecamatan lain di wilayah kabupaten. Selama periode 2020–2024, laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Mauk tercatat sebesar 1,43% per tahun.

Angka ini berada sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang (1,93%), mengindikasikan pertumbuhan yang relatif stabil dan tidak terlalu ekspansif. Kondisi tersebut umumnya mencerminkan wilayah yang telah berkembang dengan pola pertumbuhan alami yang moderat. Dari sisi spasial, kepadatan penduduk di Kecamatan Mauk mencapai 2.062,46 jiwa per km². Tingkat kepadatan ini menunjukkan karakter wilayah semi-perkotaan, dengan tekanan penduduk terhadap lahan yang belum setinggi kawasan industri atau pusat urban utama. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Mauk berada pada kisaran sekitar 102, yang berarti terdapat kurang lebih 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio ini mencerminkan struktur penduduk yang relatif seimbang dan umum dijumpai di wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis sektor primer dan jasa lokal.

Kecamatan Kemiri pada tahun 2024 dihuni oleh 52.000 jiwa, menjadikannya salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk relatif kecil di Kabupaten Tangerang. Kontribusi penduduk Kemiri terhadap total penduduk kabupaten tercatat sekitar 1,54%, menunjukkan skala demografis yang lebih terbatas dibanding Mauk. Meskipun jumlah penduduknya lebih kecil, laju pertumbuhan penduduk Kemiri selama 2020–2024 mencapai 2,01% per tahun, yang berarti lebih tinggi dibanding Mauk dan juga sedikit di atas rata-rata kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika pertumbuhan yang cukup aktif, baik dari pertumbuhan alami maupun potensi migrasi masuk.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kemiri sebesar 1.554,56 jiwa per km², relatif lebih rendah dibanding Mauk. Hal ini menunjukkan ketersediaan ruang yang lebih longgar serta karakter wilayah yang masih didominasi oleh penggunaan lahan non-perkotaan. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk Kemiri berada pada kisaran sekitar 101, yang menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Struktur ini mengindikasikan tidak adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam dinamika kependudukan setempat.

Secara keseluruhan, Kecamatan Mauk memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat, mencerminkan wilayah yang relatif mapan. Sebaliknya, Kecamatan Kemiri menunjukkan basis penduduk yang lebih kecil tetapi pertumbuhan yang lebih cepat, menandakan potensi perkembangan demografis di masa mendatang. Kedua kecamatan sama-sama memiliki rasio jenis kelamin yang seimbang, yang merupakan indikator penting bagi stabilitas sosial dan perencanaan pembangunan wilayah.

Tabel 7. Gambaran Demografi BPP Tegal Kunir

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per km ²)	Rasio jenis kelamin penduduk
Mauk	92.687	2,75	1,43	1.554,56	104,64
Kemiri	52.000	1,54	2,01	2.062,46	103,79

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Carenang

BPP Carenang membina empat kecamatan yakni Cisoka, Solear, Tigaraksa, dan Jambe. Cisoka memiliki jumlah penduduk sebanyak 100.020 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,49% selama periode 2020–2024. Kepadatan penduduknya mencapai 3.204,74 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya sebagai salah satu kecamatan dengan kepadatan tinggi. Rasio jenis kelamin di Cisoka adalah 105,19, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Kecamatan ini berkontribusi sebesar 2,97% terhadap total populasi Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Solear memiliki jumlah penduduk yang sedikit lebih banyak, yaitu 105.109 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, yaitu 3,08%. Kepadatan penduduk di Solear adalah 3.085,09 jiwa per kilometer persegi, sedikit lebih rendah dibandingkan Cisoka. Rasio jenis kelamin di Solear juga menunjukkan angka 105,79, yang berarti ada lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Solear berkontribusi sebesar 3,12% terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang.

Tigaraksa, yang memiliki jumlah penduduk terbesar di antara keempat kecamatan ini dengan 166.530 jiwa, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang lebih moderat, yaitu 1,83%. Dengan kepadatan penduduk sebesar 3.011,39 jiwa per kilometer persegi, Tigaraksa juga memiliki rasio jenis kelamin sebesar 102,73, yang lebih seimbang dibandingkan Cisoka dan Solear, namun tetap menunjukkan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kecamatan ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total penduduk Kabupaten Tangerang, yaitu 4,94%. Sementara itu, Jambe memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni 56.995 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,42%. Kepadatan penduduknya mencapai 2.017,52 jiwa per kilometer persegi, yang merupakan yang terendah di antara keempat kecamatan ini. Rasio jenis kelamin di Jambe adalah 104,28, menunjukkan adanya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Jambe memiliki kontribusi terkecil terhadap total penduduk Kabupaten Tangerang, yaitu 1,69%.

Tabel 8. Gambaran Demografi BPP Carenang tahun 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	Rasio jenis kelamin
Cisoka	100.020	2,97	2,49	3.204,74	105,19
Solear	105.109	3,12	3,08	3.085,09	105,79
Tigaraksa	166.530	4,94	1,83	3.011,39	102,73
Jambe	56.995	1,69	2,42	2.017,52	104,28

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

BPP Caringin

BPP Caringin mempunyai wilayah kerja 6 Kecamatan yaitu, Kecamatan Legok, Kelapa Dua, Curug, Panongan, Pagedangan dan Cisauk. Kantor BPP Caringin terletak di Jl. Raya Pandawa Raya Desa Caringin Kecamatan Legok Kab. Tangerang. Berdasarkan data terbaru

dari BPS Kabupaten Tangerang tahun 2025, berikut adalah gambaran lebih rinci tentang kondisi demografi dan sosial-ekonomi di enam kecamatan tersebut. Kecamatan Legok merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang yang memiliki jumlah penduduk sekitar 126.945 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan ini tercatat sebesar 2,11% per tahun antara 2020 hingga 2024. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang stabil, meskipun tidak secepat beberapa kecamatan lainnya.

Kepadatan penduduk di Legok mencapai 3.405,18 orang per kilometer persegi, mencerminkan tingkat populasi yang cukup padat untuk wilayah yang sebagian besar masih merupakan dataran. Rasio jenis kelamin di Legok tercatat sebesar 104,46, yang menunjukkan bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 104 laki-laki. Kecamatan ini terdiri dari 11 desa, dan meskipun tidak berada di tepi laut, wilayah ini memiliki sejumlah fasilitas yang cukup mendukung, termasuk Puskesmas dengan layanan rawat inap. Dengan kondisi geografis yang tidak berbatasan langsung dengan laut, Legok tetap menjadi salah satu kecamatan yang terus berkembang, baik dari sisi penduduk maupun infrastrukturnya.

Kecamatan Panongan, yang terletak di bagian utara Kabupaten Tangerang, memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, yakni sekitar 132.862 jiwa pada 2024. Laju pertumbuhan penduduk di Panongan juga cukup tinggi, yakni 2,20% per tahun, menandakan adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kepadatan penduduk mencapai 3.675,30 orang per kilometer persegi, Panongan adalah salah satu kecamatan yang paling padat di Kabupaten Tangerang. Rasio jenis kelaminnya sedikit lebih rendah daripada Legok, yaitu 103,62, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan di kecamatan ini. Panongan terdiri dari 8 desa, dan meskipun tidak berbatasan langsung dengan laut, wilayah ini memiliki akses yang baik terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk Puskesmas yang dilengkapi dengan layanan rawat inap. Ketersediaan fasilitas dasar tersebut menjadi faktor pendukung bagi terus tumbuhnya populasi dan urbanisasi di wilayah ini.

Curug adalah salah satu kecamatan yang menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dengan jumlah penduduk mencapai 179.883 jiwa pada tahun 2024. Kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,85% per tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan Panongan dan Pagedangan, namun masih menunjukkan peningkatan yang stabil. Kepadatan penduduk di Curug sangat tinggi, mencapai 5.834,67 orang per kilometer persegi, yang menunjukkan tingkat urbanisasi yang sangat cepat. Rasio jenis kelamin di Curug tercatat sebesar 102,30, yang berarti bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. Curug terdiri dari 7 desa dan merupakan wilayah yang terletak cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Meskipun wilayah ini tidak berbatasan dengan laut, Curug tetap menjadi salah satu kecamatan yang sangat berkembang dengan akses mudah menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Kehadiran Puskesmas dengan fasilitas rawat inap juga menjadi faktor yang menunjang kualitas hidup warganya.

Pagedangan, dengan jumlah penduduk sekitar 114.747 jiwa pada 2024, menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Curug, yakni sebesar 3,17% per tahun. Ini menandakan bahwa Pagedangan adalah salah satu kecamatan yang paling cepat berkembang di Kabupaten Tangerang. Kepadatan penduduk di Pagedangan adalah 2.261,02 orang per kilometer persegi, lebih rendah dibandingkan Curug dan Panongan, tetapi tetap menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk wilayah yang sebagian besar berbentuk dataran. Rasio jenis kelamin di Pagedangan mencapai 102,74, yang berarti jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Pagedangan terdiri dari 11 desa, dan meskipun wilayah ini tidak terletak di tepi laut, kawasan ini terus berkembang berkat berbagai infrastruktur yang mendukung, termasuk fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang dilengkapi dengan layanan rawat inap. Kecamatan ini menjadi salah satu kawasan yang sangat menjanjikan bagi perkembangan demografi dan ekonomi di masa mendatang.

Cisauk adalah kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih kecil, yakni sekitar 93.867 jiwa pada 2024. Laju pertumbuhan penduduk di Cisauk mencapai 2,66% per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Curug, namun tetap menunjukkan angka yang stabil. Kepadatan penduduk di Cisauk adalah 3.123,69 orang per kilometer persegi, yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduknya lebih kecil, tingkat kepadatannya tetap cukup signifikan. Rasio jenis kelamin di Cisauk tercatat 102,74, yang menunjukkan jumlah laki-laki yang sedikit lebih banyak daripada perempuan. Cisauk terdiri dari 6 desa dan merupakan wilayah yang tidak terletak di tepi laut, namun tetap berkembang pesat berkat infrastruktur yang terus dibangun. Kecamatan ini juga memiliki fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dengan layanan rawat inap yang memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi warganya.

Kelapa Dua, dengan jumlah penduduk 170.613 jiwa pada 2024, menunjukkan laju pertumbuhan yang stabil sebesar 1,83% per tahun. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu 6.506,98 orang per kilometer persegi, yang mencerminkan tingkat urbanisasi yang sangat pesat. Rasio jenis kelamin di Kelapa Dua adalah 99,27, yang berarti bahwa jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kecamatan ini terdiri dari 6 desa dan tidak terletak di tepi laut, namun memiliki akses yang baik terhadap berbagai fasilitas dasar, termasuk Puskesmas dengan layanan rawat inap. Kelapa Dua menjadi salah satu kecamatan yang terus berkembang baik dari sisi populasi maupun infrastruktur, menjadikannya kawasan yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial di Kabupaten Tangerang.

Dengan kondisi demografi yang terus berkembang di setiap kecamatan, Kabupaten Tangerang menunjukkan tren urbanisasi yang signifikan, diiringi dengan peningkatan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik unik berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan, serta fasilitas yang tersedia, yang semuanya berkontribusi terhadap dinamika pembangunan wilayah yang terus berlangsung.

Tabel 9. Gambaran Demografi BPP Caringin tahun 2024

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju pertumbuhan penduduk (2020-2024) (%)	Kepadatan penduduk (jiwa per km ²)	Rasio jenis kelamin penduduk
Legok	126.945	3,76	2,11	3.405,18	104,46
Panongan	132.862	3,94	2,20	3.675,30	103,62
Curug	179.883	5,33	1,85	5.834,67	102,30
Pagedangan	114.747	3,40	3,17	2.261,02	102,74
Cisauk	93.867	2,78	2,66	3.123,69	102,74
Kelapa Dua	170.613	5,06	1,83	6.506,98	99,27

Sumber: BPS Kab. Tangerang (2024)

3.3. DATA PENGGUNAAN LAHAN

Secara umum, struktur pemanfaatan ruang wilayah pertanian di Kabupaten Tangerang dalam dokumen IPW tersaji sebagai kombinasi: lahan sawah beririgasi (teknis/1/2 teknis/pedesaan) dan tadah hujan; lahan bukan sawah (pekarangan, tegalan/kebun, kolam, rawa, hutan rakyat); dan ex-galian pasir. Pola ini menjadi dasar klasifikasi penggunaan lahan untuk semua BPP: Sepatan, Kaliasin, Sukatani, Kronjo, Kampung Melayu, Tegal Kunir, Carenang, Caringin dengan penekanan komoditas padi sawah, hortikultura dan ternak sesuai potensi masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah kerja.

BPP Sepatan

Wilayah kerja BPP Sepatan berada di bagian utara Kabupaten Tangerang dan merupakan kawasan transisi antara pertanian sawah intensif dengan pesisir, serta tekanan urbanisasi dari arah Kota Tangerang. Karakter penggunaan lahan menunjukkan kombinasi antara lahan produktif primer (sawah dan tambak) dan lahan non-sawah yang berkembang pesat seiring pertumbuhan permukiman.

Lahan sawah di Kecamatan Sepatan tergolong sawah beririgasi teknis penuh, dengan total luas sekitar 635 ha. Seluruh sawah tercatat memperoleh pasokan air dari jaringan irigasi teknis, tanpa klasifikasi setengah teknis, irigasi pedesaan, maupun sawah tadah hujan. Kondisi ini mencerminkan tingkat intensifikasi pertanian yang relatif baik dan mendukung pola tanam padi dua hingga tiga kali setahun. Secara spasial, sawah terkonsentrasi di desa-desa seperti Kayu Bongkok, Kayu Agung, Sarakan, dan Mekar Jaya, yang sekaligus menjadi sentra produksi padi sawah di kecamatan ini (IPW BPP Sepatan, 2024).

Kecamatan Sepatan Timur memiliki luas sawah sekitar 515 ha, dan sama seperti Kecamatan Sepatan, seluruhnya dikategorikan sebagai sawah beririgasi teknis. Tidak ditemukan sawah tadah hujan maupun irigasi setengah teknis. Namun, dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan luas tanam efektif, dari sekitar 1.596 ha (akumulasi tanam tahunan) menjadi 1.030 ha pada 2023–2024 (IPW BPP Sepatan, 2024), yang mengindikasikan alih fungsi lahan ke non-pertanian, terutama permukiman dan infrastruktur.

Berbeda dengan dua kecamatan sebelumnya, Kecamatan Sukadiri memiliki lahan sawah yang paling luas yakni sebanyak 1635 ha dengan irigasi teknis, menunjukkan bahwa Kecamatan Sukadiri merupakan sentra padi di wilayah BPP Sepatan. Sentra produksi padi di Kecamatan Sukadiri berada di Desa Pekayon, Rawa Kidang, Mekar Kondang, Gintung dan Desa Sukadiri, dengan luas tanam pada masing masing desa pada tahun 2024 adalah 616 ha, 474 ha, 462 ha, 454 ha dan 434 ha (IPW BPP Sepatan, 2024).

Lahan bukan sawah di wilayah BPP Sepatan menunjukkan keragaman komoditas yang cukup tinggi. Terdapat 27 ha lahan kering di Kecamatan Sepatan dan 158 ha di Kecamatan Sepatan Timur. Lahan kering banyak dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura terutama di Kecamatan Sepatan dan Sepatan timur, sehingga menjadikan kedua kecamatan ini sebagai sentra hortikultura dan termasuk wilayah agropolitan di Kabupaten Tangerang. Adapun luas lahan kering di Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur yakni 27 ha dan 158 ha.

Kecamatan Sepatan terdapat area penghasil sayuran yakni bayam dan kangkung dengan luas panen sebanyak 86 ha pada tahun 2024, dan perkebunan hortikultura buah seperti jeruk siam, pepaya dan jambu air. Sepatan Timur juga penghasil hortikultura sayuran yakni bayam dan kangkung dengan luas panen sebesar 305 ha dan 363 ha, dan sedikit komoditas cabai besar (luas panen sebanyak 0,6 ha) dan cabai rawit (luas panen sebanyak 0,10 ha) (BPS, 2025). Lahan pertanian bukan sawah juga digunakan untuk tanaman hortikultura buah yakni durian, jeruk siam, pisang, pepaya, jambu air, melinjo dan petai.

Terdapat 152 lahan kering di Kecamatan Sukadiri. Meskipun tidak sebanyak dua wilayah lain, penggunaan lahan non sawah di Kecamatan Sukadiri juga digunakan untuk budidaya hortikultura sayuran (bayam dan kangkung dengan luas panen masing-masing sebesar 5 ha), dan tanaman hortikultura buah (Mangga, Buah Naga dan Jambu Air) (BPS, 2025).

Tabel 10. Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering BPP Sepatan tahun 2023

Kecamatan	Lahan sawah (ha) ^{*)}	Lahan kering (ha) ^{**)}
Sepatan	635	27
Sepatan Timur	515	158
Sukadiri	1,635	152

Sumber: ^{*)}IPW BPP Sepatan (2024) dan ^{**) <https://data.go.id/dataset>}

BPP Kaliasin

Wilayah kerja BPP Kaliasin yang mencakup Kecamatan Sukamulya, Kresek, Balaraja, dan Jayanti memperlihatkan struktur penggunaan lahan pertanian yang dominan, terutama melalui dominasi lahan sawah pada sebagian kecamatan. Luas lahan sawah yang berada di kawasan BPP Kaliasin mencapai sekitar 5.643 ha, sedangkan lahan bukan sawah sekitar 3.503 ha, sehingga total luasan penggunaan lahan yang terdata berada pada kisaran 9.146 ha. Dari total sawah tersebut, komposisinya cenderung didominasi sawah beririgasi sekitar 4.004 ha (sekitar 71%) dan sisanya sawah tadah hujan sekitar 1.639 ha (sekitar 29%). Secara detail struktur penggunaan lahan di BPP Kaliasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Struktur penggunaan lahan pertanian di BPP Kaliasin (ha)

Jenis lahan	Sukamulya	Kresek	Balaraja	Jayanti
Lahan sawah	1.437	1.847	1.077	1.282
Irigasi teknis	1.213	1.465		
Irigasi ½ teknis			380	894
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)		52		
Tadah hujan	224	330	697	388
Lahan bukan sawah	2.545	339	1.741	315
Tegal	148	7	526	157
Pekarangan	394	228	798	16
Kolam/ Tambak			14	39
Rawa				
Lain-lain	566	104	403	5

Sumber: IPW BPP Kaliasin (2024)

Struktur penggunaan lahan pertanian di wilayah BPP Kaliasin memperlihatkan karakteristik yang berbeda di tiap kecamatan.

Kecamatan Sukamulya memiliki total lahan sawah seluas 1.437 hektare, dengan dominasi irigasi teknis sebesar 1.213 hektare. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sukamulya relatif stabil dalam produksi padi karena dukungan sistem irigasi yang baik. Namun, wilayah ini juga memiliki lahan bukan sawah yang luas, mencapai 2.545 hektare, dengan pekarangan dan kategori lain-lain yang cukup besar. Implikasi kebijakan bagi Sukamulya adalah perlunya program diversifikasi pertanian, misalnya pengembangan hortikultura dan peternakan rumah tangga, untuk memanfaatkan potensi lahan bukan sawah sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Kecamatan Kresek menempati posisi tertinggi dalam luas lahan sawah, yaitu 1.847 hektare, dengan dominasi irigasi teknis sebesar 1.465 hektare. Hal ini menjadikan Kresek sebagai pusat produksi padi yang sangat bergantung pada sistem irigasi terstruktur. Namun, lahan bukan sawah di Kresek relatif kecil (339 hektare), sehingga ruang untuk diversifikasi terbatas. Kebijakan yang relevan adalah fokus pada peningkatan efisiensi irigasi dan penerapan teknologi hemat air, serta optimalisasi produktivitas lahan sawah melalui intensifikasi dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan.

Kecamatan Balaraja memiliki lahan sawah seluas 1.077 hektare, dengan proporsi besar pada sawah tadah hujan (697 hektare). Kondisi ini menunjukkan kerentanan terhadap variabilitas iklim dan ketidakpastian produksi. Di sisi lain, Balaraja memiliki lahan bukan sawah yang cukup besar, mencapai 1.741 hektare, didominasi oleh tegalan dan pekarangan. Implikasi kebijakan bagi Balaraja adalah perlunya program adaptasi iklim, seperti pengembangan varietas tahan kekeringan dan sistem informasi iklim, serta pemanfaatan lahan bukan sawah untuk komoditas bernilai tinggi guna mengurangi ketergantungan pada padi.

Kecamatan Jayanti memiliki lahan sawah seluas 1.282 hektare, dengan dominasi irigasi setengah teknis (894 hektare). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengairan di Jayanti masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan stabil. Lahan bukan sawah di Jayanti relatif kecil (315 hektare), sehingga kebijakan yang relevan adalah memperkuat infrastruktur irigasi dan mendorong praktik manajemen air berbasis komunitas. Dengan demikian, Jayanti dapat meningkatkan produktivitas padi sekaligus mengurangi risiko akibat ketergantungan pada sistem irigasi yang belum optimal.

Secara keseluruhan, analisis per kecamatan ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan pertanian di BPP Kaliasin harus bersifat spesifik wilayah. Sukamulya dan Balaraja dapat diarahkan pada diversifikasi pertanian, Kresek pada intensifikasi sawah beririgasi teknis, sementara Jayanti pada peningkatan efisiensi irigasi. Pendekatan berbasis karakteristik lokal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pertanian di masing-masing wilayah.

BPP Sukatani

Wilayah kerja BPP Sukatani meliputi empat kecamatan, yaitu Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, dan Cikupa. Secara spasial, wilayah ini membentuk satu hamparan pertanian dataran rendah yang masih didominasi oleh aktivitas budidaya tanaman pangan, khususnya padi sawah. Struktur penggunaan lahannya menunjukkan bahwa sawah tetap menjadi elemen utama lanskap pertanian, sementara lahan bukan sawah berfungsi sebagai pendukung dan ruang diversifikasi usaha tani. Jika dilihat secara agregat, karakter penggunaan lahan BPP Sukatani mencerminkan wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sistem persawahan dan ketersediaan air irigasi.

Lahan sawah merupakan penggunaan lahan terbesar di wilayah BPP Sukatani. Di Kecamatan Sindang Jaya, total lahan sawah tercatat seluas 1.702 hektare. Dari luas tersebut, 910 hektare berupa sawah beririgasi teknis dan 792 hektare berupa sawah tadah hujan. Proporsi ini menunjukkan bahwa sekitar 53,5 persen sawah di Sindang Jaya memiliki kepastian pasokan air melalui sistem irigasi teknis, sementara 46,5 persen lainnya masih bergantung langsung pada curah hujan. Kondisi ini menciptakan dua sistem produksi padi yang berjalan berdampingan dan menuntut pendekatan pengelolaan yang berbeda, terutama dalam penentuan waktu tanam dan pengelolaan risiko iklim.

Kecamatan Sindang Jaya memiliki lahan sawah seluas 1.702 ha terdiri dari 910 ha sawah irigasi teknis dan 792 ha sawah tadah hujan. Variasi ketersediaan sawah bervariasi di tingkat desa di Kecamatan Sindang Jaya. Desa Sindang Asih memiliki luas sawah terbesar, yaitu 519 hektare, terdiri dari 274 hektare irigasi teknis dan 245 hektare tadah hujan. Desa Sindang Sono menyusul dengan total 348 hektare sawah, terdiri dari 181 hektare irigasi teknis dan 167 hektare tadah hujan. Desa Badak Anom memiliki 327 hektare sawah, namun dengan dominasi tadah hujan sebesar 211 hektare dibandingkan irigasi teknis 116 hektare. Desa Wanakarta mengelola 249 hektare sawah, Sukaharja 185 hektare, sedangkan Desa Sindang Panon dan Desa Sindang Jaya masing-masing hanya memiliki sawah tadah hujan seluas 45 hektare dan 29 hektare. Distribusi ini memperlihatkan bahwa risiko kekeringan dan fluktuasi produksi padi lebih besar pada desa-desa dengan dominasi sawah tadah hujan.

Selain sawah, Sindang Jaya memiliki lahan bukan sawah seluas 211 hektare. Lahan ini didominasi oleh tegalan atau ladang seluas 174 hektare, atau sekitar 82,5 persen dari total lahan darat. Pekarangan tercatat seluas 17 hektare, sementara lahan kehutanan rakyat seluas 19 hektare. Skala lahan darat yang relatif kecil dibandingkan sawah menunjukkan bahwa fungsi utamanya adalah sebagai pelengkap, baik untuk palawija, hortikultura, maupun tanaman tahunan skala rumah tangga, bukan sebagai pengganti fungsi sawah.

Kecamatan Rajeg menunjukkan karakter yang berbeda. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan persawahan dataran rendah dengan dukungan jaringan irigasi dari Sungai Cisadane. Luas wilayah pertanian Rajeg tercatat sekitar 5.299 hektare, dengan lahan potensi pertanian aktif sekitar 2.492 hektare. Penggunaan lahan sawah di Rajeg didominasi oleh irigasi teknis, sehingga pola budidaya padi relatif seragam dan intensif. Ketergantungan pada irigasi teknis menjadikan stabilitas fungsi jaringan irigasi sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan penggunaan lahan sawah di kecamatan ini.

Di Kecamatan Pasar Kemis, struktur penggunaan lahan pertanian lebih terbatas dan terkonsentrasi. Total lahan sawah yang masih tercatat mencapai sekitar 400 hektare, dan seluruhnya berada pada kategori irigasi setengah teknis. Sawah ini terutama terkonsentrasi di Desa Pangadegan seluas 243 hektare, Desa Sindang Sari seluas 120 hektare, Desa Kutabumi seluas 35 hektare, dan Desa Sukamantri seluas 2 hektare. Desa dan kelurahan lainnya tidak lagi tercatat memiliki sawah. Angka ini menunjukkan bahwa sawah hanya menempati sebagian kecil dari luas wilayah kecamatan, dan tekanan alih fungsi lahan telah mempersempit ruang pertanian secara signifikan.

Lahan bukan sawah di Pasar Kemis tersebar dalam skala kecil dan berbentuk pekarangan serta tegalan. Luas pekarangan per desa umumnya berada pada kisaran 2 hingga 6 hektare, sementara tegalan berkisar antara 1 hingga 4 hektare. Jika dijumlahkan, kontribusi lahan bukan sawah ini relatif kecil dibandingkan luas sawah, namun memiliki peran penting sebagai ruang adaptif bagi kegiatan pertanian rumah tangga di tengah keterbatasan lahan. Penggunaan lahan lain seperti perkebunan besar, kehutanan negara, kolam, dan tambak tidak tercatat secara signifikan di kecamatan ini.

Kecamatan Cikupa menunjukkan pola penggunaan lahan yang lebih sederhana namun mencerminkan wilayah transisi. Lahan sawah yang masih dikelola petani tercatat seluas 279 hektare dan digunakan untuk budidaya padi. Di luar sawah, terdapat lahan darat seluas 36 hektare yang dimanfaatkan untuk hortikultura, terutama sayuran daun dan sayuran buah. Dengan total lahan pertanian sekitar 315 hektare, sawah masih mendominasi sekitar 88,6 persen, sedangkan lahan darat hanya sekitar 11,4 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sawah tetap menjadi basis utama, tetapi petani mulai memanfaatkan lahan kering untuk usaha tani bernilai ekonomi lebih cepat.

Jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan lahan BPP Sukatani memperlihatkan dominasi sawah padi sebagai struktur inti lanskap pertanian. Sindang Jaya dan Rajeg menjadi wilayah dengan basis sawah terluas, masing-masing dengan lebih dari 1.700 hektare dan ribuan hektare wilayah pertanian yang didukung irigasi teknis. Pasar Kemis menunjukkan sawah yang menyusut dan terkonsentrasi, sementara Cikupa memperlihatkan skala sawah yang lebih kecil dengan tambahan fungsi hortikultura. Lahan bukan sawah seperti pekarangan, tegalan, kolam, rawa, dan hutan rakyat hanya menempati porsi kecil dan berfungsi sebagai penyangga. Tidak ditemukan peran signifikan penggunaan lahan lain seperti perkebunan besar, tambak, maupun bekas galian dalam struktur ruang pertanian wilayah ini. Gambaran ini menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan wilayah kerja BPP Sukatani perlu berfokus pada perlindungan dan optimalisasi sawah, peningkatan kinerja sistem irigasi, serta pemanfaatan lahan darat secara selektif untuk mendukung keberlanjutan usaha tani.

Adapun stuktur pengngunaan lahan di BPP Sukatani dapat dilihat pada Table berikut:

Tabel 12. Stuktur Penggunaan Lahan di BPP Sukatani

Jenis lahan	Sidang Jaya ^{a)}	Rajeg ^{b)}	Pasar Kemis ^{c)}	Cikupa ^{d)}
Lahan sawah	1702	Na	400	279
Irigasi teknis	910			
Irigasi ½ teknis			400	
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)				
Tadah hujan	792			
Lahan bukan sawah	211	Na		36
Tegal	174		24	
Pekarangan	17		34	
Kolam/ Tambak/ situ			2	
Rawa				
Kehutanan	19			
Total lahan pertanian		5299		

Sumber: ^{a)}IPW Kec. Sindang Jaya

^{b)}IPW Kec. Rajeg

^{c)} IPW Kec. Pasar Kemis

^{d)}IPW Kec. Cikupa

BPP Kronjo

Wilayah kerja BPP Kronjo yang mencakup Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, dan Mekar Baru. Kecamatan Gunung Kaler memiliki luas lahan pertanian sawah sebesar 2.505 hektare yang tersebar di sembilan desa. Seluruh sawah dimanfaatkan untuk padi sawah dengan sistem irigasi teknis dan setengah teknis seluas 1.998 hektare, serta sawah tadah hujan seluas 507 hektare. Desa dengan sawah terluas adalah Tamiang seluas 331 hektare dan Gunung Kaler seluas 319 hektare. Pola tanam didominasi padi dua kali setahun dengan indeks pertanaman rata rata 1,9 hingga 2,0. Luas tanam mencapai 4.808 hektare per tahun, yang menunjukkan intensifikasi lahan berjalan aktif.

Kecamatan Kronjo memiliki luas sawah sebesar 2.337 hektare yang tersebar di sepuluh desa. Sawah irigasi teknis mendominasi seluas 1.073 hektare, irigasi setengah teknis 555 hektare, dan sawah tadah hujan 709 hektare. Desa Pasilan memiliki sawah terluas mencapai 366 hektare, diikuti Muncung 278 hektare dan Pagedangan Udik 281 hektare. Luas tanam padi mencapai 4.052 hektare per tahun dengan indeks pertanaman berkisar 1,3 hingga 2,0. Produktivitas padi rata rata berada pada angka 5,53 ton per hektare.

Secara total, wilayah kerja BPP Kronjo didominasi oleh lahan sawah dengan total lebih dari 4.800 hektare sawah aktif. Sistem irigasi teknis dan setengah teknis menjadi tulang punggung produksi padi, dengan kontribusi lebih dari 60 persen luas sawah. Sawah tadah hujan tetap signifikan dan menjadi faktor pembatas pada musim kemarau. Lahan bukan sawah berfungsi sebagai penyangga ekonomi rumah tangga tani melalui pekarangan, kebun rakyat, dan kolam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama wilayah BPP Kronjo terletak pada sawah irigasi dan intensitas pemanfaatan lahan yang tinggi. Tantangan utama ada pada pengelolaan air, optimalisasi lahan tadah hujan, dan pemanfaatan lahan non sawah agar

memberi nilai tambah nyata bagi petani.

Tabel 13. Struktur Penggunaan Lahan BPP Kronjo

Jenis lahan	Gunung Kaler ^{a)}	Kronjo ^{b)}	Mekar Baru
Lahan sawah	2505	2335	na
Irigasi teknis		1073	
Irigasi ½ teknis	1998	555	
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)			
Tadah hujan	507	709	
Lahan bukan sawah	na	na	na

Sumber: ^{a)} IPW Kec. Gunung Kaler

^{b)} IPW Kec. Kronjo

BPP Kampung Melayu

Dalam Kecamatan Kosambi, penggunaan lahan sebagian besar didominasi oleh pertanian sawah, baik yang menggunakan irigasi teknis, semi-teknis, maupun tadah hujan. Berdasarkan data tahun 2024, luas lahan sawah yang menggunakan irigasi teknis tercatat sebanyak 58 hektar, sedangkan yang menggunakan irigasi setengah teknis berjumlah 5 hektar. Sisanya, sekitar 7 hektar, merupakan sawah dengan sistem irigasi pedesaan (tadah hujan) yang lebih bergantung pada curah hujan. Lahan non-sawah, seperti pekarangan dan tegalan/kebun, juga cukup berkembang, di mana jenis tanaman yang banyak ditanam adalah sayuran daun seperti bayam dan kangkung.

Namun, masalah yang dihadapi adalah konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman, terutama di desa-desa seperti Salemban Jaya dan Rawa Burung, yang sebelumnya memiliki lahan pertanian yang luas. Konversi lahan ini mengurangi luas tanah yang dapat digunakan untuk pertanian, yang berdampak pada berkurangnya produksi pangan.

Di Kecamatan Pakuhaji, sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian padi, terutama dengan irigasi teknis sebesar 2478 ha, dengan luas sawah terbesar mencapai 321 hektar di desa Buaran Mangga dan 286 hektar di Kramat. Selain itu, terdapat pula lahan pertanian non-sawah seperti tegalan dan kebun, yang ditanami sayuran seperti kangkung dan bayam, serta tanaman buah seperti melon dan semangka. Namun, konversi lahan untuk pembangunan industri dan pemukiman juga menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan sektor pertanian di wilayah ini.

Kecamatan Teluknaga memiliki luas wilayah 82,755 km² dan sebagian besar lahan digunakan untuk sawah irigasi. Secara keseluruhan di Kecamatan Teluk Naga terdapat 392,74 hektar lahan sawah irigasi teknis. Luas sawah terbesar berada di Desa Tegal Angus dengan luas sawah sebesar 67 hektar, kemudian Pangkalan dan Desa Kampung Besar dengan luas sawah masing-masing sebesar 67 hektar dan 65.74 hektar. Secara keseluruhan, luas tanam padi di Kecamatan Teluknaga mencakup sekitar 1.289 hektar dengan luas panen mencapai 1.136 hektar pada tahun 2024. Selain itu, pertanian hortikultura juga berkembang dengan komoditas seperti bayam dan kangkung.

Penggunaan lahan lainnya di Kecamatan Teluknaga termasuk tegalan dan kebun yang digunakan untuk menanam berbagai sayuran dan buah-buahan. Namun, seperti di kecamatan lainnya, alih fungsi lahan untuk pembangunan kawasan industri dan perumahan menjadi masalah besar yang mengurangi luas tanah yang tersedia untuk pertanian.

Dalam ketiga kecamatan ini, sektor pertanian masih mendominasi penggunaan lahan, namun tantangan utama adalah konversi lahan untuk tujuan non-pertanian yang semakin meningkat, yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan di masa depan.

Adapun struktur penggunaan lahan di BPP Kampung Melayu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Struktur Penggunaan Lahan BPP Kampung Melayu (ha)

Jenis lahan	Kosambi	Paku Haji	Teluk Naga
Lahan sawah	71	2487	392,74
Irigasi teknis	58	2478	392,74
Irigasi ½ teknis	5		
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)			
Tadah hujan	7	9	
Lahan bukan sawah	10	469	167

Sumber: IPW BPP Kampung Melayu

BPP Tegal Kunir

Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri, yang terletak di Kabupaten Tangerang, memiliki kondisi penggunaan lahan yang berbeda-beda, yang tentunya mempengaruhi prioritas kebijakan dan program penyuluhan pertanian yang harus diterapkan.

Di Kecamatan Mauk, total luas sawah mencapai 2.569 hektar, yang sebagian besar merupakan lahan sawah dengan irigasi teknis, yaitu sekitar 2.099 hektar sedangkan sisanya 470 hektar adalah lahan sawah tadah hujan. Sementara itu, terdapat 1297 hektar lahan bukan sawah. Sekitar 476 Ha digunakan untuk pekarangan dan 599 hektar ladang, sedangkan tambak mencakup 101 hektar serta 121 hektar kategori penggunaan lahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini masih mengandalkan pertanian padi sebagai komoditas utama, sementara potensi pengembangan lain seperti hortikultura dan budidaya tambak masih terbatas.

Kondisi ini memiliki implikasi terhadap prioritas kebijakan pertanian di Kecamatan Mauk. Dengan dominasi penggunaan lahan untuk sawah beririgasi pedesaan dan tadah hujan, program penyuluhan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas padi sangat diperlukan. Mengingat terbatasnya teknologi irigasi, prioritas kebijakan harus mencakup pengembangan sistem irigasi yang lebih efisien, serta peningkatan penggunaan teknologi pertanian yang dapat mendukung peningkatan hasil padi, seperti penggunaan bibit unggul dan pemupukan berimbang. Selain itu, mengingat banyaknya lahan yang digunakan untuk pekarangan dan ladang, program yang mendukung diversifikasi pertanian melalui pengembangan tanaman hortikultura dan palawija dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Di sisi lain, Kecamatan Kemiri memiliki total luas lahan sawah sekitar 1.772 Ha, dengan sebagian besar lahan sawah dengan irigasi teknis yang tercatat seluas 1.594 Ha. Dominasi lahan sawah irigasi teknis di Kecamatan Kemiri memberikan keunggulan dalam hal pengelolaan air, meskipun terdapat juga area yang bergantung pada irigasi pedesaan dan sedikit area tadah hujan. Komoditas utama di Kemiri juga mencakup padi dan sayuran, dengan fokus pada produksi padi sawah yang cukup signifikan. Di luar lahan sawah, lahan non-sawah seperti pekarangan, ladang, dan lahan penggunaan lain menyumbang total 218 Ha.

Implikasi dari kondisi penggunaan lahan di Kecamatan Kemiri adalah pentingnya penguatan sektor pertanian dengan fokus pada peningkatan produktivitas padi beririgasi teknis. Program penyuluhan harus berfokus pada peningkatan efisiensi pemupukan, pemberdayaan petani dalam penggunaan teknologi pertanian modern, dan peningkatan pengelolaan irigasi yang ada. Sementara itu, potensi tambak di Kemiri perlu didorong untuk lebih dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, dengan adanya lahan non-sawah yang cukup banyak, kebijakan yang mendorong diversifikasi usaha tani, terutama untuk sayuran dan buah-buahan, akan membantu meningkatkan ketahanan pangan serta memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, perbedaan karakteristik penggunaan lahan di kedua kecamatan ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang harus diprioritaskan dalam program penyuluhan pertanian. Kecamatan Mauk, yang lebih bergantung pada sawah dengan irigasi pedesaan dan tadah hujan, perlu program yang mendukung pengelolaan irigasi dan diversifikasi tanaman, sedangkan Kecamatan Kemiri, dengan mayoritas lahan sawah beririgasi teknis dan potensi tambak, memerlukan kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas padi serta pengembangan sektor perikanan dan hortikultura. Kedua kecamatan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik dan berbasis pada potensi masing-masing wilayah untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

Tabel 15. Struktur Penggunaan Lahan BPP Tegal Kunir

Jenis lahan	Mauk	Kemiri
Lahan sawah	2569	1772
Irigasi teknis	2099	1594
Irigasi ½ teknis		133
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)		
Tadah hujan	470	45
Lahan bukan sawah	1297	218
Tegal/Ladang	599	33
Pekarangan	476	65
Kolam/ Tambak/ situ	101	
Rawa		
Kehutanan		
Lain-lain	121	120

Sumber: IPW BPP Tegal Kunir

BPP Carenang

Wilayah kerja BPP Carenang memiliki luas total 14.021,10 hektar. Dari luasan tersebut, lahan pertanian mencapai 8.350,00 hektar atau sekitar 59,55 persen dari total wilayah. Lahan pertanian ini terbagi jelas antara lahan sawah dan lahan bukan sawah, dengan karakter penggunaan yang berbeda antar kecamatan. Adapun struktur penggunaan lahan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Struktur Penggunaan Lahan BPP Carenang

Jenis lahan	Cisoka	Solear	Tigaraksa	Jambe
Lahan sawah	1228	1154	1161	785
Irigasi teknis	523			
Irigasi ½ teknis				
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)				
Tadah hujan	705	1154	1161	785
Lahan bukan sawah	503	764	1637	1118
Tegal/Ladang	315	301	1360	723
Pekarangan	92	461	277	987
Kolam/ Tambak/ situ				
Rawa				
Kehutanan	96			
Perkebunan rakyat				240

Sumber: IPW BPP Carenang

Penggunaan lahan sawah mencapai 4.328,00 hektar. Sawah beririgasi teknis hanya terdapat di Kecamatan Cisoka seluas 523,00 hektar yang memanfaatkan sistem irigasi Ranca Sumur Cidurian. Sawah irigasi setengah teknis tidak tercatat pada wilayah kerja BPP Carenang. Sawah tadah hujan mendominasi dengan luas 3.805,00 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Tigaraksa memiliki sawah terluas yaitu 1.161,00 hektar, diikuti Solear 1.154,00 hektar, Cisoka 705,00 hektar, dan Jambe 785,00 hektar. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap curah hujan terutama di Solear, Tigaraksa, dan Jambe.

Lahan bukan sawah atau lahan darat memiliki luas total 4.022,00 hektar. Lahan pekarangan mencakup 987,00 hektar dan berfungsi sebagai ruang produksi skala rumah tangga, termasuk pemanfaatan oleh Kelompok Wanita Tani. Tegalan atau kebun rakyat menjadi penggunaan terbesar pada lahan darat dengan luas 2.699,00 hektar yang banyak ditanami palawija dan hortikultura. Perkebunan rakyat tercatat seluas 240,00 hektar, sedangkan hutan rakyat seluas 96,00 hektar dan hanya terdapat di Kecamatan Cisoka.

Penggunaan lahan lain di luar pertanian rakyat juga muncul secara spesifik. Tambak tercatat sangat terbatas dan belum menjadi penggunaan dominan pada wilayah kerja BPP Carenang. Sementara itu, lahan ex galian pasir teridentifikasi di Kecamatan Cisoka dan sebagian wilayah Solear, khususnya pada area sekitar Sungai Cidurian. Lahan ex galian ini saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi dikembangkan kembali melalui reklamasi lahan untuk perikanan, pertanian adaptif, atau konservasi air.

Secara keseluruhan, struktur penggunaan lahan BPP Carenang menunjukkan dominasi sawah tadah hujan dan tegalan rakyat. Kondisi ini menuntut strategi pengelolaan air, intensifikasi lahan pekarangan, serta pemulihan lahan ex galian pasir agar Anda dapat meningkatkan produktivitas wilayah secara berkelanjutan dan terukur.

BPP Caringin

Wilayah kerja BPP Caringin memperlihatkan mozaik penggunaan lahan yang kontras antar- kecamatan: ada kecamatan yang masih menyimpan “kantong” sawah cukup luas, ada yang sudah sangat didominasi lahan non-sawah (pekarangan/tegalan), dan ada pula yang menampilkan jejak penggunaan khusus seperti situ/ex-galian pasir atau tambak. Secara umum, struktur penggunaan lahan terbagi dalam tiga kelompok besar: lahan sawah (irigasi teknis/½ teknis/pedesaan dan tadah hujan), lahan bukan sawah (pekarangan, tegalan/kebun, kolam, rawa, hutan rakyat), serta penggunaan lain (misalnya perkebunan besar/PTP, tambak, dan ex-galian pasir/situ). Adapun secara lebih detail struktur penggunaan lahan BPP Carenang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Stuktur Penggunaan Lahan BPP Caringin

Jenis lahan	Legok	Panongan	Curug	Pagedangan	Cisauk	Kelapa Dua
Lahan sawah	625,3	534	108	185,2	310	25
Irigasi teknis						
Irigasi ½ teknis						
Irigasi lainnya (pedesaan/ Irigasi Rawa Lebak)						
Tadah hujan	625,3	534	108	185,2	310	25

Lahan bukan sawah	1728	1018,96	648.98	555,54	932,56	612
Tegal	1496	797,96	43		117,2	487
Ladang			573,98			
Pekarangan	232	136	23	73,27	69,65	
Tambak			9	199,78	215,9	
Situ/Ex-galian pasir		9			160,78	
Lainnya (Bera)		85		282,49		125

Sumber: IPW BPP Caringin

Di Kecamatan Legok, keberadaan sawah masih menonjol, tetapi hampir seluruhnya tercatat sebagai sawah tadah hujan seluas 625,3 Ha, sedangkan kategori irigasi teknis, $\frac{1}{2}$ teknis, maupun irigasi pedesaan tercatat 0. Pada saat yang sama, struktur lahan bukan sawah di Legok didominasi oleh tegalan/kebun (tegal) 1.496 Ha dan pekarangan 232 Ha, sehingga total lahan bukan sawahnya mencapai 1.728 Ha; kategori lain seperti kolam, rawa, hutan rakyat, maupun tambak dalam rekap ini tercatat 0. Dengan komposisi tersebut, Legok dapat dibaca sebagai wilayah yang masih menyisakan sawah cukup luas, namun tekanan pemanfaatan lahan kering (terutama tegal) juga sangat dominan dibanding pekarangan.

Berbeda dengan Legok, Kecamatan Panongan menunjukkan pola sawah yang “terkonsentrasi” pada jaringan irigasi tingkat lokal: seluruh sawahnya tercatat sebagai irigasi pedesaan seluas 534,00 Ha, sementara irigasi teknis, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis, maupun tadah hujan tercatat 0 pada rekap. Pada kelompok lahan bukan sawah, Panongan didominasi tegalan/kebun (tegal/huma) 797,96 Ha dan pekarangan 136,00 Ha, disertai bera 85,00 Ha serta situ/ex-galian pasir 9,00 Ha, sehingga total lahan bukan sawahnya menjadi 1.018,96 Ha. Artinya, Panongan masih punya sawah yang jelas dan relatif besar, tetapi karakter ruang non-sawahnya juga kuat—terutama tegal/huma—dengan tambahan catatan adanya lahan bera dan situ/ex-galian yang meski kecil, penting untuk membaca dinamika pemanfaatan lahan.

Di Kecamatan Curug, skala sawah jauh lebih kecil dan secara eksplisit disebut sebagai sawah tadah hujan total 108 Ha (dengan catatan kecenderungan menyusut akibat alih fungsi lahan). Dominasi Curug justru berada pada kelompok lahan non-sawah yang tercatat sangat besar, yaitu 2.560,00 Ha, dengan komponen menonjol berupa pekarangan 573,98 Ha. Pada rincian yang sama, Curug juga mencatat ladang 43 Ha, tegalan/kebun 18,6 Ha, kolam 28,10 Ha, serta adanya tambak 9 Ha, sementara kategori situ ditandai tidak ada. Konfigurasi ini mengisyaratkan Curug sebagai wilayah dengan intensitas pemanfaatan non-sawah tinggi (terutama pekarangan), di mana sawah menjadi sisa yang relatif kecil dan rentan terhadap perubahan fungsi.

Untuk Kecamatan Pagedangan, dokumen menampilkan dua sudut pandang yang saling melengkapi. Dari ringkasan ekosistem, total potensi lahan usaha tani tercatat 740,74 Ha, dengan sawah tadah hujan 185,20 Ha dan lahan kering 555,54 Ha, serta bera 0. Namun pada tabel penggunaan yang lebih operasional, rincian lahan menunjukkan bahwa porsi lahan kering/terbangun sangat nyata melalui pekarangan 422,86 Ha, disusul situ/ex-galian pasir 199,78 Ha dan tegalan/kebun 73,27 Ha; sawah tadah hujan tetap 185,20 Ha. Pada rekap tabel penggunaan tersebut, jumlah lahan kering tercatat 711,56 Ha dan total keseluruhan (sawah + lahan kering) menjadi 896,76 Ha. Yang paling “berbicara” dari Pagedangan adalah besarnya komponen situ/ex-galian pasir, yang menjadikan kecamatan ini bukan hanya soal sawah vs non-sawah, tetapi juga jejak penggunaan lahan spesifik yang memengaruhi tata air, produktivitas, dan opsi pemanfaatan lahan ke depan.

Sementara itu, Kecamatan Cisauk tercatat memiliki sawah yang seluruhnya masuk kategori tadah hujan total 310,0 Ha (tanpa irigasi teknis/ $\frac{1}{2}$ teknis/pedesaan), dengan rincian sebaran per desa seperti Cisauk 111,43 Ha, Suradita 52,06 Ha, Cibogo 7,81 Ha, Dangdang

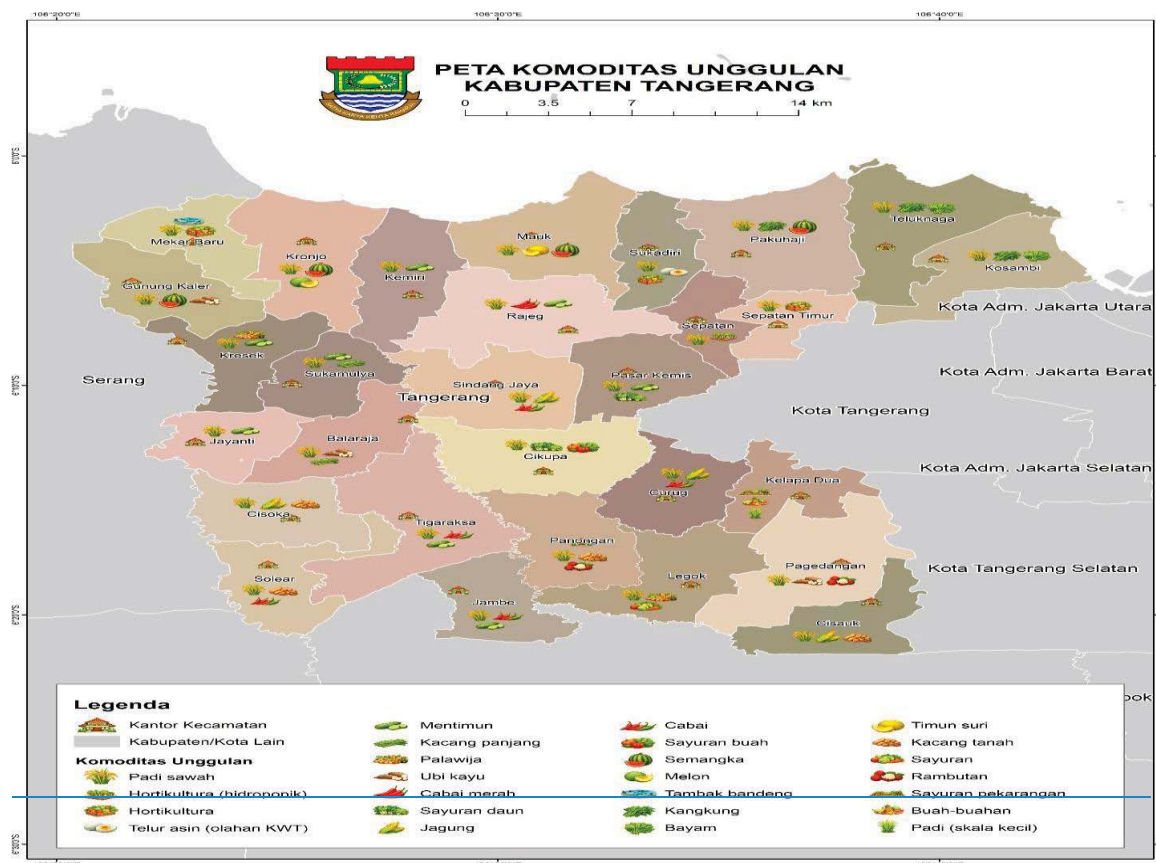
59,40 Ha, dan Mekarwangi 79,30 Ha (Sampora tercatat 0). Pada kelompok lahan bukan sawah, Cisauk memperlihatkan karakter yang lebih beragam dibanding kecamatan lain karena memunculkan kategori “ekologis” dan “jejak aktivitas” sekaligus: hutan rakyat 301,56 Ha, tegal 117,2 Ha, pekarangan 69,65 Ha, serta perkebunan rakyat 67,42 Ha. Selain itu, Cisauk juga mencatat penggunaan lain yang sangat relevan untuk analisis spasial dan lingkungan, yakni ex-galian pasir 160,78 Ha, sementara tambak seluas 215,9 ha. Dengan demikian, Cisauk dapat dipahami sebagai wilayah yang sawahnya masih cukup nyata (meski tadah hujan), namun lanskap non-sawahnya memperlihatkan keberadaan hutan rakyat dan bekas galian sebagai faktor pembentuk ruang yang tidak bisa diabaikan.

Di Kecamatan Kelapa Dua, skala sawah sangat kecil: sawah hanya tercatat sebagai tadah hujan 25 Ha dan kategori irigasi lainnya 0. Sebaliknya, lahan bukan sawahnya didominasi tegal 487 Ha dan kategori lain-lain 125 Ha, sehingga total lahan bukan sawah mencapai 612 Ha, sementara pekarangan, ladang, hutan rakyat, perkebunan rakyat, dan tambak tercatat 0 pada rekap tabel ini. Pola ini menandai Kelapa Dua sebagai wilayah dengan “sisa” sawah yang minimal, serta struktur lahan kering yang kuat—sebuah konfigurasi yang biasanya berkaitan erat dengan tekanan urbanisasi, fragmentasi lahan, dan pergeseran basis mata pencaharian.

3.4 POTENSI PERTANIAN

Kabupaten Tangerang memiliki basis SDM yang relatif kuat untuk menopang pembangunan pertanian, meskipun berada di wilayah penyangga megapolitan Jabodetabek yang mengalami tekanan urbanisasi tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai sekitar 3,40 juta jiwa, dengan struktur umur yang masih didominasi usia produktif. Kondisi ini menciptakan *labour pool* yang potensial untuk sektor pertanian, khususnya jika diarahkan melalui kebijakan regenerasi petani dan peningkatan keterampilan.

Tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 98,57% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas dasar SDM relatif baik untuk menerima inovasi pertanian, adopsi teknologi budidaya, serta penguatan agribisnis berbasis digital. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang efisien dan berdaya saing. Setiap wilayah BPP memiliki potensi pertanian yang relatif berbeda-beda, berikut adalah peta komoditas unggulan Kabupaten Tangerang:



Gambar 2. Peta Komoditas Unggulan Kabupaten Tangerang

Adapun uraian detail potensi pertanian untuk setiap BPP di Kabupaten Tangerang, adalah:

BPP Sepatan

Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sepatan mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, dan Kecamatan Sukadiri. Ketiga wilayah ini membentuk satu kesatuan lanskap pertanian sawah irigasi yang relatif homogen, dengan padi sawah sebagai komoditas utama, namun memiliki karakteristik kelembagaan dan skala potensi yang berbeda. Secara umum, wilayah BPP Sepatan merupakan salah satu kantong produksi padi penting di Kabupaten Tangerang, ditopang oleh ketersediaan irigasi teknis, intensitas tanam yang tinggi, serta keberadaan kelembagaan petani yang cukup aktif.

Di Kecamatan Sepatan, basis pertanian didominasi oleh lahan sawah seluas sekitar 635 hektare, yang seluruhnya telah berstatus irigasi teknis. Kondisi ini memungkinkan petani melakukan budidaya padi secara intensif sepanjang tahun. Pada tahun 2024, luas tanam padi mencapai sekitar 1.270 hektare, yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan ditanami padi dua kali dalam setahun. Dengan total produksi padi sebesar 6.772 ton GKP dan produktivitas rata-rata sekitar 5,3 ton per hektare, Kecamatan Sepatan memperlihatkan kinerja produksi yang relatif stabil dan efisien untuk wilayah peri-urban.

Dari sisi sumber daya manusia dan kelembagaan, Kecamatan Sepatan memiliki 19 kelompok tani (Poktan) dan 8 Kelompok Wanita Tani (KWT), sehingga total kelembagaan petani yang aktif mencapai 27 kelompok. Jumlah petani yang terorganisir dalam kelompok tani dan KWT tercatat sekitar 582 orang. Sebagian besar kelompok tani di kecamatan ini berfokus pada padi sawah, sedangkan KWT berperan penting dalam pengembangan hortikultura pekarangan, budidaya sayuran, dan bahkan mulai mengadopsi teknologi hidroponik. Pola tanam yang berkembang secara dominan adalah padi-padi dalam satu tahun, sejalan dengan indeks pertanaman (IP) yang mendekati 200 persen.

Beranjak ke Kecamatan Sepatan Timur, karakter pertaniannya masih sangat serupa dengan Kecamatan Sepatan, namun dengan skala kelembagaan dan jumlah petani yang lebih besar. Kecamatan ini memiliki luas sawah sekitar 515 hektare, yang juga seluruhnya merupakan sawah beririgasi teknis. Pada tahun 2024, luas tanam padi mencapai 1.030 hektare, menegaskan pola tanam dua kali setahun. Produksi padi tercatat sekitar 5.281 ton GKP, dengan produktivitas rata-rata 5,1 ton per hektare. Meskipun produktivitasnya sedikit lebih rendah dibanding Kecamatan Sepatan, volume produksi tetap signifikan karena intensitas tanam yang tinggi.

Kelembagaan petani di Kecamatan Sepatan Timur tergolong sangat kuat. Tercatat terdapat 22 kelompok tani dan 6 KWT, sehingga total kelembagaan berjumlah 28 kelompok. Jumlah petani yang tergabung dalam kelembagaan ini mencapai sekitar 1.440 orang, menjadikan Sepatan Timur sebagai kecamatan dengan jumlah petani terorganisir terbanyak kedua di wilayah BPP Sepatan. Komoditas unggulan tetap didominasi oleh padi sawah, namun banyak kelompok tani yang mulai mengombinasikan usahatani dengan hortikultura. Peran KWT di kecamatan ini cukup strategis dalam mendukung ketahanan pangan keluarga serta diversifikasi pendapatan rumah tangga petani. Sama seperti Kecamatan Sepatan, pola tanam yang berkembang adalah padi, dengan indeks pertanaman mendekati 200 persen.

Sementara itu, Kecamatan Sukadiri merupakan wilayah dengan potensi pertanian terbesar di antara ketiga kecamatan dalam lingkup BPP Sepatan. Kecamatan ini memiliki luas sawah sekitar 1.635 hektare, yang hampir seluruhnya merupakan sawah irigasi teknis. Skala lahan yang luas ini tercermin pada capaian luas tanam tahun 2024 yang mencapai 3.262 hektare,

dengan luas panen sekitar 3.255 hektare. Produksi padi di Kecamatan Sukadiri tercatat mencapai 17.848 ton GKP, dengan produktivitas rata-rata sekitar 5,5 ton per hektare, yang merupakan angka tertinggi dibanding dua kecamatan lainnya.

Dari sisi kelembagaan, Kecamatan Sukadiri memiliki 38 kelompok tani dan 4 KWT, sehingga total terdapat 42 kelembagaan petani yang aktif. Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan KWT mencapai sekitar 1.882 orang, menjadikan Sukadiri sebagai pusat konsentrasi petani sawah di wilayah BPP Sepatan. Komoditas utama yang dikembangkan hampir seluruhnya adalah padi sawah, namun KWT dan beberapa kelompok tani mulai mengembangkan hortikultura serta usaha pengolahan hasil pertanian. Salah satu contoh adalah pengembangan produk olahan telur asin oleh KWT Kondang Sejahtera, yang menunjukkan adanya potensi penguatan agribisnis berbasis rumah tangga. Pola tanam di Kecamatan Sukadiri juga sangat intensif, dengan rasio luas tanam terhadap luas sawah yang menunjukkan indeks pertanaman sekitar 200 persen.

Secara keseluruhan, ketiga kecamatan di bawah wilayah kerja BPP Sepatan menunjukkan potensi pertanian yang kuat dan relatif seragam, dengan padi sawah sebagai komoditas unggulan utama, didukung oleh irigasi teknis dan pola tanam dua kali setahun. Perbedaan utama terletak pada skala lahan, jumlah petani, dan kekuatan kelembagaan. Kecamatan Sukadiri menempati posisi paling dominan dari sisi luas lahan dan produksi, sementara Kecamatan Sepatan Timur unggul dalam jumlah petani terorganisir. Di sisi lain, Kecamatan Sepatan menunjukkan dinamika diversifikasi yang menarik melalui peran aktif KWT dalam hortikultura dan teknologi budidaya alternatif. Secara strategis, kondisi ini memberikan landasan yang sangat kuat bagi pengembangan pertanian berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, serta transformasi agribisnis di wilayah BPP Sepatan.

Tabel 18. Potensi Pertanian BPP Sepatan

Kecamatan	Sepatan	Sepatan Timur	Sukadiri
Jumlah Poktan	19	22	38
Jumlah KWT	8	6	4
Total kelembagaan	27	28	42
Jumlah petani terorganisir (anggota)	582	1440	1882
Komoditas unggulan	Padi sawah; diversifikasi hortikultura & hidroponik (KWT)	Padi sawah; padi + hortikultura (sebagian Poktan); hortikultura (KWT)	Padi sawah; hortikultura (KWT/sebagian kelompok); pengolahan (contoh: telur asin pada KWT tertentu)
Pola tanam (indikatif)	Dominan padi-padi (IP $\approx$ 200%)	Dominan padi-padi (IP $\approx$ 200%)	Dominan padi-padi (IP $\approx$ 200%)
Indeks Pertanaman (IP) ~	2.00	2.00	2.00

Sumber: IPW BPP Sepatan

BPP Kaliasin

Potensi pertanian di wilayah kerja BPP Kaliasin yang meliputi Kecamatan Sukamulya, Kresek, Balaraja, dan Jayanti secara umum didominasi oleh usahatani padi sawah dengan dukungan kelembagaan petani yang cukup kuat serta didukung pola tanam yang relatif seragam, yakni padi-bera-padi. Di Kecamatan Sukamulya, luas sawah irigasi mencapai kurang lebih 1.437 hektare dengan total luas panen padi sekitar 2.081 hektare dalam satu tahun tanam, yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan sawah mengalami lebih dari satu kali tanam padi

per tahun. Produktivitas padi di kecamatan ini berkisar 5,26 ton per hektare, sehingga secara agregat menghasilkan produksi padi yang signifikan sebagai penyangga pangan di wilayah BPP Kaliasin.

Selain padi, Sukamulya juga mengembangkan hortikultura seperti mentimun dengan produktivitas sekitar 19,25 ton per hektare, kacang panjang sekitar 15,1 ton per hektare, serta cabai dan sayuran lain yang memanfaatkan lahan sawah setelah panen padi maupun lahan pekarangan. Dari sisi kelembagaan, di Sukamulya terdapat 39 kelompok tani dan 9 Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di delapan desa Benda, Bunar, Buniayu, Kaliasin, Kubang, Merak, Parahu, dan Sukamulya—dengan tiap kelompok beranggotakan rata-rata 30-an petani sehingga jumlah petani yang terorganisir mencapai 1,833 orang. Pola tanam padi di Sukamulya secara umum berupa padi–bera–padi di sekitar 1.437 hektare, dengan jeda bera dipakai sebagian petani untuk menanam sayuran jangka pendek sehingga dapat menambah sumber pendapatan tanpa mengganggu siklus tanam padi utama.

Kecamatan Kresek memiliki karakter agroekosistem yang sangat mendukung pengembangan padi dan hortikultura dengan luas sawah sekitar 1.847 ha dan jenis tanah dominan Grumosol pada ketinggian rata-rata hampir 8 meter di atas permukaan laut. Produktivitas padi di Kresek berada pada kisaran 48–55 kuintal per hektare (4,8–5,5 ton per hektare), yang menunjukkan bahwa potensi hasil padi di wilayah ini cukup baik, apalagi ditunjang sistem irigasi teknis, irigasi desa, dan tadah hujan yang tersebar di 9 desa seperti Kresek, Talok, Renged, Patrasana, Jengkol, Kemuning, Rancailat, Pasir Ampo, dan Koper.

Hortikultura unggulan di Kresek adalah mentimun dengan produktivitas rata-rata sekitar 66 kuintal per hektare yang umumnya ditanam pada lahan sawah setelah panen padi atau pada lahan kering yang memiliki akses air. Kelembagaan petani di Kresek juga cukup kuat; di tiap desa terdapat beberapa kelompok tani dan KWT, ditopang oleh lembaga pendukung seperti P3A (perkumpulan petani pemakai air), kios saprotan, serta ketersediaan alsintan seperti hand tractor berjumlah sekitar 147 unit, sprayer lebih dari 200 unit, dan sekitar 60-an unit huller yang tersebar di wilayah kecamatan. Pola tanam yang dominan masih padi–bera–padi, terutama di hamparan sawah seluas sekitar 280 hektare yang secara eksplisit tercatat dikelola dalam pola tersebut, sedangkan sisa lahan sawah menerapkan kombinasi padi–padi–palawija atau padi–padi–sayuran sesuai dengan ketersediaan air dan preferensi petani.

Di Kecamatan Balaraja, struktur penggunaan lahan memperlihatkan kombinasi kuat antara sawah dan lahan kering. Luas sawah sekitar 1.077 hektare, sedangkan lahan bukan sawah (tegal, pekarangan, kolam, dan lainnya) mencapai sekitar 1.741 hektare, sehingga total lahan pertanian lebih dari 2.800 hektare. Komoditas utama di sawah adalah padi, dengan luas panen sekitar 2.154 hektare dan produktivitas rata-rata 48,6 kuintal per hektare, sehingga produksi total padi di Balaraja melampaui 100 ribu ton gabah kering panen per tahun. Komoditas palawija dan hortikultura juga berkembang, terutama ubi kayu dengan produktivitas lebih dari 13 ton, kacang panjang sekitar 35 kuintal per hektare, dan mentimun sekitar 140 kuintal per hektare, yang mencerminkan orientasi sebagian petani pada komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Dari sisi kelembagaan, tercatat sekitar 26 kelompok tani di Balaraja dengan total anggota 1,516 anggota yang tersebar di desa Telagasari, Saga, Tobat, Sukamurni, Gembong, Cangkudu, Sentul, dan Sentul Jaya. Di luar poktan, terdapat pula kelembagaan pendukung seperti P3A, Mitra Cai, kelompok ekonomi seperti KPK, penangkar benih, dan UPJA yang meskipun jumlahnya belum banyak, namun memainkan peran penting dalam penyediaan air, permodalan, benih, dan layanan alsintan. Pola tanam di lahan sawah Balaraja relatif seragam, yakni padi–padi–bera pada seluruh luas sawah sekitar 1.077 hektare, di mana pada dua musim tanam berturut-turut petani menanam padi dan pada satu musim berikutnya sebagian lahan dibiarkan bera atau ditanami komoditas sela sesuai kondisi air; pola ini dikelola oleh sejumlah besar poktan seperti Cariu I–II, Iwul, Rangkong, Lobang, Galebeg, Sukamantri, Gembong Kaler, dan lainnya.

Kecamatan Jayanti, yang juga menjadi bagian dari wilayah kerja BPP Kaliasin, memiliki

luas wilayah sekitar 21,01 kilometer persegi dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning (Pods.MK) dan ketinggian 0–13,5 meter di atas permukaan laut. Luas sawah di Jayanti sekitar 1.282–1.287 hektare, dengan luas panen padi tercatat mencapai sekitar 2.574 hektare dalam satu tahun, sehingga produktivitas rata-rata berada di kisaran 53,5 kuintal per hektare. Selain padi, mentimun menjadi komoditas hortikultura unggulan dengan luas tanam sekitar 38 hektare dan produktivitas rata-rata sekitar 170 kuintal per hektare, yang menunjukkan potensi pendapatan tinggi dari komoditas ini jika dibarengi akses pasar yang baik. Dari sisi kelembagaan, Jayanti memiliki sekitar 45 kelompok tani yang tersebar di delapan desa, yaitu Jayanti, Cikande, Pasir Muncang, Sumur Bandung, Dangdeur, Pangkat, Pasir Gintung, dan Pabuaran, dengan total petani yang terorganisir mencapai 2.333 orang. Banyak kelompok di Jayanti, seperti Sukamulya, Gandasari, Makmur Jaya, Muhara Makmur, Rengkod Makmur, dan Sri Rahayu, mengelola lahan sawah dan lahan kering sekaligus, sehingga mereka berperan sebagai penggerak utama dalam intensifikasi padi dan pengembangan hortikultura. Pola tanam utama di Jayanti juga padi–bera–padi di sekitar 1.287 hektare sawah yang dikelola oleh 45 kelompok tani, dengan sebagian lahan atau musim dimanfaatkan untuk menanam mentimun dan sayuran lain sebagai usaha diversifikasi dan peningkatan pendapatan.

Secara keseluruhan, keempat kecamatan di bawah BPP Kaliasin memperlihatkan struktur pertanian yang didominasi usahatani padi sawah dengan produktivitas berkisar antara sekitar 4,8 hingga 5,5 ton per hektare, didukung oleh kelembagaan petani yang relatif kuat dan ketersediaan sarana prasarana yang cukup memadai. Jumlah kelompok tani dan KWT di seluruh wilayah ini mencapai puluhan hingga mendekati seratus kelembagaan, dengan total anggota terorganisir yang jika dijumlahkan untuk Kresek dan Jayanti saja sudah lebih dari 4.000 petani, belum termasuk Sukamulya dan Balaraja yang juga memiliki puluhan kelompok dengan rata-rata anggota puluhan orang perkelompok. Pola tanam yang seragam (padi–bera–padi dan padi–padi–palawija/sayuran) menunjukkan orientasi kuat pada komoditas padi sebagai basis ketahanan pangan, sementara hortikultura seperti mentimun, kacang panjang, dan sayuran lainnya menjadi sumber diversifikasi dan peningkatan pendapatan rumah tangga tani.

Tabel 19. Potensi Pertanian BPP Kaliasin

Kecamatan	Sukamulya	Kresek	Balaraja	Jayanti
Jumlah Poktan	39	50	26	45
Jumlah KWT	9	9	7	11
Total kelembagaan (Poktan+KWT)	48	59	33	56
Jumlah petani terorganisir (anggota poktan)	1.813	2.662	1.516	2.333
Komoditas unggulan	Padi sawah; mentimun; kacang panjang; cabai; ternak ayam buras, itik, domba/kambing, sapi, kerbau	Padi sawah; mentimun; palawija; ternak kerbau, kambing/domba, ayam kampung, itik	Padi sawah; ubi kayu; kacang panjang; mentimun; aneka buah (pisang, mangga, rambutan, nanas, dsb.	Padi sawah; mentimun; ternak sapi, kambing, ayam kampung, itik
Pola tanam utama	Padi – bera – padi; padi – palawija/sayuran	Padi – bera – padi; padi – palawija/sayuran	Padi – bera – padi; padi – palawija/sayuran	Padi – bera – padi; padi – palawija/sayuran

Sumber: IPW BPP Kaliasin

BPP Sukatani

Potensi pertanian di empat kecamatan wilayah kerja BPP Sukatani memperlihatkan karakter yang saling melengkapi: Rajeg sebagai lumbung padi irigasi teknis berskala besar, Sindang Jaya sebagai sentra padi dan hortikultura dengan dukungan kelembagaan kuat, Pasar Kemis sebagai wilayah transisi dengan tekanan alih fungsi lahan namun masih menyisakan kantong produksi padi dan hortikultura, serta Cikupa sebagai kantong padi-sayuran skala lebih terbatas yang didukung kelembagaan petani dan KWT di desa-desa kunci.

Kecamatan Rajeg merupakan dataran rendah dengan total luas wilayah pertanian 5.299 ha, di mana lahan potensi pertanian yang tercatat mencapai 2.492 ha dan didominasi sawah irigasi teknis yang mendapat pasokan air dari Sungai Cisadane. Komoditas utama yang diusahakan petani adalah padi sawah, sedangkan cabai merah dan mentimun menjadi komoditas hortikultura penting; di sisi peternakan berkembang usaha sapi anakan yang difokuskan pada inseminasi buatan dan peningkatan kemampuan petani dalam pembuatan pakan sendiri. Produktivitas padi di Rajeg relatif tinggi, berkisar antara 4,8–5,2 ton/ha gabah kering panen, dengan produksi per desa mencapai 681,2 ton di Rajeg Mulya hingga 2.365 ton di Pangarengan pada satu musim tanam.

Secara kelembagaan, Rajeg mempunyai struktur kelompok tani yang padat dan merata di 13 desa/kelurahan; Sukatani memiliki 4 poktan dewasa dan 3 KWT, Daon 6 poktan, Jambu Karya 6 poktan dengan 2 KWT, Pangarengan 8 poktan dengan 3 KWT, serta desa lain seperti Ranca Bango, Sukamanah, Lembangsari, Rajeg, Rajeg Mulya, Mekarsari, Tanjakan, Tanjakan Mekar, dan Sukasari masing-masing memiliki 2–6 kelompok. Jika seluruh rekap dijumlah, jumlah kelompok tani dewasa di Rajeg mencapai sekitar 55 kelompok dan KWT sekitar 13 kelompok, sehingga total kelembagaan formal sekitar 68 unit organisasi petani yang berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, sekaligus unit produksi. Rata-rata tiap poktan mengelola 20–70 ha lahan dengan anggota 30–70 orang, sehingga petani yang terorganisir dapat diperkirakan di atas 2.000 orang, terutama pada komoditas padi yang menjadi basis usaha tani utama di wilayah ini. Pola tanam utama yang diterapkan adalah padi dua kali setahun (padi–padi–bera), dan pada beberapa hamparan irigasi baik dilakukan pergiliran dengan cabai merah atau mentimun sesuai ketersediaan air dan tenaga kerja.

Kecamatan Sindang Jaya memiliki luas wilayah 40.520 ha dengan penggunaan lahan yang didominasi lahan persawahan, yakni 1.702 ha sawah (910 ha irigasi teknis dan 792 ha tadah hujan) dan 211 ha lahan darat (174 ha tegalan, 17 ha pekarangan, dan 19 ha kehutanan). Kondisi agroekosistem berupa dataran rendah dengan ketinggian 15–22 mdpl, tanah aluvial pH 5–6, serta curah hujan rata-rata 61,78 mm/tahun, menjadikan wilayah ini cocok untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Jumlah penduduk tujuh desa mencapai 94.470 jiwa dengan 48.085 laki-laki dan 46.385 perempuan, sehingga ketersediaan tenaga kerja pertanian relatif memadai meskipun tidak seluruhnya terserap di sektor pertanian.

Komoditas unggulan Sindang Jaya adalah padi sawah, dengan produktivitas 4,5–5,1 ton/ha GKP; produktivitas tertinggi terdapat di Desa Badak Anom sebesar 5,1 ton/ha, sedangkan desa lain seperti Wanakerta, Sindang Panon, dan Sindang Jaya berada pada kisaran 4,8–4,9 ton/ha. Di samping padi, jagung dan cabai menjadi komoditas pangan penting; jagung mencapai produktivitas 12–13 ton/ha di Sindang Sono dan Badak Anom, sedangkan cabai di Sindang Asih, Sindang Sono, dan Badak Anom mencapai sekitar 19 ton/ha. Potensi peternakan juga menonjol: tercatat populasi ayam ras 240 ekor, kambing 190 ekor, sapi 105 ekor, dan ayam buras 2.350 ekor, yang umumnya dikelola secara terintegrasi dengan usaha tani tanaman pangan dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan.

Secara kelembagaan, Sindang Jaya memiliki 1 Posluhdes, 5 gapoktan, 33 poktan, dan 7 KWT yang tersebar di tujuh desa. Rekap kelembagaan menunjukkan: Sukaharja memiliki 4 poktan dan 1 KWT, Wanakerta 3 poktan dan 1 KWT, Sindang Sono 7 poktan dan 1 KWT,

Sindang Asih 6 poktan dan 1 KWT, Sindang Jaya 4 poktan dan 1 KWT, Sindang Panon 5 poktan dan 1 KWT, serta Badak Anom 4 poktan dan 1 KWT. Beberapa kelompok besar antara lain Harapan Mulya di Sindang Jaya (kelas lanjut, luas 42 ha, 94 anggota, komoditas padi) dan Daya Karya Boga di desa yang sama (kelas pemula, luas 49 ha, 71 anggota, komoditas padi, mentimun, terong), sementara di Badak Anom kelompok Sabrang Mandiri mengelola padi, jagung, cabai, dan kacang panjang dengan luas 25 ha dan 55 anggota. Jika diakumulasikan, jumlah petani yang terorganisir melalui keanggotaan poktan di Sindang Jaya diperkirakan lebih dari 1.500 orang, mengingat sebagian besar kelompok memiliki 30–90 anggota.

Pola tanam yang terbiasa dilakukan petani adalah padi–bera–padi, dengan variasi padi–padi–bera pada lahan irigasi teknis yang airnya relatif lebih terjamin; pada sejumlah petak, padi diikuti oleh hortikultura seperti jagung dan cabai ketika ketersediaan air dan tenaga kerja mendukung. Penggunaan alat dan mesin pertanian sudah mulai berkembang, ditandai dengan kepemilikan 15 unit hand traktor, 15 pompa air, 35 hand sprayer, 10 power thresher, dan 5 huller, yang mendukung efisiensi pengolahan tanah dan panen padi. Namun demikian, hasil analisis masalah dengan metode GMP menunjukkan masih rendahnya penerapan pemupukan berimbang dan pengendalian OPT terpadu, sehingga aspek teknologi budidaya padi masih menjadi fokus utama penyuluhan di kecamatan ini.

Kecamatan Pasar Kemis memiliki luas wilayah 28,874 km² dengan karakter wilayah yang sedang mengalami tekanan alih fungsi lahan cukup kuat akibat urbanisasi, pengembangan permukiman, dan kawasan industri. Lahan sawah yang tersisa terkonsentrasi di Desa Pangadegan, Kutabumi, dan Sindang Sari, dengan luas berturut-turut 243 ha, 35 ha, dan 120 ha, sehingga total sawah irigasi teknis yang masih produktif mencapai sekitar 400 ha. Di luar sawah, masih terdapat lahan non-sawah berupa pekarangan dan ladang di desa-desa seperti Pangadegan, Sindang Sari, Kutabumi, Kutajaya, Sukamantri, Pasar Kemis, Sukaasih, Gelam Jaya, dan Kutabaru, yang menjadi basis pengembangan hortikultura dan Pekarangan Pangan Lestari.

Komoditas utama Pasar Kemis adalah padi sawah dan hortikultura sayuran. Data produktivitas tahun 2024 menunjukkan luas tanam dan panen padi 800 ha dengan produktivitas rata-rata 5,5 ton/ha gabah kering panen dan total produksi 1.466,67 ton dalam dua musim tanam, dengan kontribusi terbesar dari Pangadegan (486 ha dengan produksi 2.673 ton), Kutabumi (74 ha dengan 407 ton), dan Sindang Sari (240 ha dengan 1.320 ton). Komoditas hortikultura yang berkembang meliputi mentimun, kacang panjang, kangkung, bayam, dan berbagai sayuran daun, serta sejumlah tanaman tahunan seperti cocor bebek, sukun, dan lamtoro yang banyak dijumpai di kawasan sawah dan kebun sekitar permukiman. Di sektor peternakan, terdapat kelompok seperti Harmonis Farm di Sukamantri yang mengembangkan rumput odot sebagai pakan ternak dengan populasi kambing/domba dan sapi yang cukup besar pada skala kelompok.

Kelembagaan tani di Pasar Kemis relatif kuat dan menjadi tulang punggung pelestarian sisa lahan pertanian. Rekap data menunjukkan terdapat 10 poktan dan 10 KWT yang tersebar di sembilan desa; Pangadegan sendiri memiliki 5 poktan, Kutabumi 2 poktan dan 1 KWT, Sindang Sari 2 poktan dan 1 KWT, sedangkan desa lainnya (Kutajaya, Sukamantri, Kutabaru, Pasar Kemis, Sukaasih, dan Gelam Jaya) lebih didominasi KWT yang bergerak di hortikultura pekarangan dan pengolahan hasil. Contoh kelompok di Pangadegan antara lain Subur Mandiri (65 anggota, 57 ha sawah, komoditas padi, cabai, terong, kacang panjang, mentimun, sayuran daun) dan Tani Mukti (70 anggota, 70 ha sawah dengan komoditas serupa), sementara di Kutabumi terdapat KWT Kurma Asri (30 anggota) yang fokus pada terong, cabai, dan sayuran daun serta produk olahan seperti kerupuk dan aneka camilan. Jika dihitung dari data anggota per kelompok di tabel rinci, jumlah petani dan pelaku usaha tani yang terorganisir di poktan dan KWT Pasar Kemis mencapai lebih dari 515 orang, termasuk petani sawah dan pelaku UMKM pengolahan hasil di KWT.

Pola tanam yang umum diterapkan di sawah adalah padi–bera–padi dan padi–padi–bera, dengan penanaman padi umumnya dimulai pada awal musim hujan sesuai kalender musim yang memperlihatkan intensitas hujan tinggi di awal tahun. Pada beberapa hamparan, setelah panen padi petani beralih ke hortikultura sayuran daun yang siklus tanamnya lebih pendek dan dapat memanfaatkan sisa kelembaban tanah dan akses air di dekat sumber air; kondisi ini menjelaskan adanya hamparan campuran padi-hortikultura di beberapa desa seperti Pangadegan dan Sindang Sari. Di tingkat kelembagaan, teridentifikasi masalah utama berupa rendahnya penerapan pemupukan berimbang, pergiliran varietas, penggunaan benih berlabel, dan pengendalian OPT pada padi, serta lemahnya pemahaman anggota KWT terhadap pemanfaatan pekarangan dan pengolahan hasil, sehingga penyuluhan diarahkan untuk demonstrasi teknologi dan penguatan kapasitas kelompok.

Kecamatan Cikupa memiliki luas wilayah 42,68 km² dengan struktur ruang yang semakin terurbanisasi, namun masih menyisakan kantong pertanian berupa lahan sawah seluas 279 ha dan lahan darat hortikultura seluas 36 ha yang dikelola secara aktif oleh petani setempat. Lahan sawah terkonsentrasi di Kelurahan Bunder dan desa-desa seperti Sukadamai, Pasir Jaya, Pasir Gadung, Cibadak, dan Budi Mulya, sedangkan lahan darat hortikultura tersebar di desa yang sama dan dimanfaatkan untuk budidaya sayuran daun, sayuran buah, dan tanaman hortikultura lain bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini menjadikan Cikupa sebagai kantong produksi padi sekaligus sayuran di tengah perkembangan kawasan industri dan permukiman sekitar.

Produktivitas padi sawah di Cikupa cukup baik; di Kelurahan Bunder luas tanam dan panen 40 ha dengan produktivitas 510 kw/ha (sekitar 5,1 ton/ha) dan produksi 204 ton, sementara di Sukadamai 40 ha dengan 5,0 ton/ha (200 ton), di Pasir Jaya 20 ha dengan 4,9 ton/ha (98 ton), di Pasir Gadung 22 ha dengan 5,2 ton/ha (114,4 ton), di Cibadak 45 ha dengan 5,1 ton/ha (229,5 ton), dan di Budi Mulya 40 ha dengan 4,9 ton/ha (196 ton). Komoditas hortikultura utama di lahan darat adalah sayuran daun dan sayuran buah, yang banyak diusahakan oleh KWT seperti KWT Sehati di Sukadamai dan KWT Tangguh Mandiri di Pasir Jaya dengan basis lahan pekarangan dan kebun kecil.

Dari sisi kelembagaan, Cikupa memiliki sejumlah poktan dan KWT yang terdistribusi di desa-desa kunci; rekap menunjukkan Kelurahan Bunder memiliki 1 poktan dewasa, Sukadamai 2 poktan dan 1 KWT, Pasir Jaya 1 poktan dan 1 KWT, Pasir Gadung 1 poktan, Cibadak 1 poktan, Budi Mulya 2 poktan serta Sukamulya terdapat 1 KWT dan Talaga 1 poktan meskipun tidak semuanya mempunyai sawah luas. Dengan demikian, total kelembagaan formal yang teridentifikasi di kawasan inti pertanian Cikupa sedikitnya mencakup 9 poktan dan 3 KWT, atau 12 kelembagaan tani. Contoh kelompok utama adalah Poktan Bunder di Kelurahan Bunder dengan luas lahan 40 ha, 46 anggota, dan komoditas padi-palawija, serta poktan Tunas Gebang dan Gebang Manat di Sukadamai yang mengelola sawah padi masing-masing seluas 15 ha dan 25 ha dengan anggota 18 dan 43 orang. Secara agregat, jumlah petani yang terorganisir melalui kelompok di Cikupa sebanyak 222 orang, terutama di desa-desa yang masih memiliki sawah dan KWT aktif.

Pola tanam di Cikupa mengikuti ketersediaan air irigasi dan hujan, di mana pada lahan sawah umumnya diterapkan satu hingga dua kali tanam padi per tahun, sedangkan pada lahan darat hortikultura budidaya sayuran dilakukan hampir sepanjang tahun dengan penyesuaian komoditas pada musim hujan dan kemarau. Pola umum yang dapat dirangkum adalah padi pada musim hujan di lahan sawah dan hortikultura di lahan darat pada musim kemarau atau jeda tanam padi, sehingga kombinasi padi–hortikultura menjadi penopang pendapatan rumah tangga tani.

Tabel 20. Potensi Pertanian BPP Sukatani

Kecamatan	Rajeg ^{a)}	Sindang Jaya ^{b)}	Pasar Kemis ^{c)}	Cikupa ^{d)}
Jumlah Poktan	59 poktan	33 poktan	10 poktan	9 poktan
Jumlah KWT	13 KWT	7 KWT	10 KWT	3 KWT
Total kelembagaan	72 kelembagaan	40 kelembagaan	20 kelembagaan	12 kelembagaan
Jumlah petani terorganisir	na	1.805	515	222
Komoditas unggulan	Padi sawah; cabai merah; mentimun; sapi anakan	Padi sawah; jagung; cabai; mentimun; terong; ternak sapi, kambing, ayam	Padi sawah; hortikultura (mentimun, kacang panjang, sayuran daun); ternak kecil	Padi sawah; hortikultura sayuran daun dan buah
Pola tanam utama	Padi-padi-bera; padi-horti-bera	Padi-bera-padi; padi-padi-bera	Padi-bera-padi; padi-padi-bera	Padi (musim hujan)-horti (musim kemarau)

Sumber: ^{a)}IPW Kec. Rajeg

^{b)} IPW Kec. Sindang Jaya

^{c)} IPW Kec. Pasar Kemis

^{d)} IPW Kec. Cikupa

BPP Kronjo

Potensi pertanian di wilayah kerja BPP Kronjo jika dilihat per kecamatan menunjukkan struktur agraris yang kuat, dengan padi sawah sebagai komoditas utama yang didukung kelembagaan petani yang relatif mapan dan peluang peningkatan IP serta diversifikasi hortikultura dan ternak.

Kecamatan Kronjo memiliki luas lahan sekitar 2.407 ha, dengan pemanfaatan lahan didominasi sawah yang tersebar di 10 desa, antara lain Kronjo, Muncung, Pagedangan Ilir, Pagedangan Udik, Pasilian, Pagenjahan, Bakung, Blukbuk, Pasir, dan Cirumpak. Jumlah penduduk mencapai 66.447 jiwa (33.376 laki-laki dan 33.071 perempuan), yang menjadi basis tenaga kerja usahatani padi dan hortikultura dengan sebaran cukup merata di seluruh desa; desa Bakung merupakan desa terpadat dengan 9.057 jiwa.

Dari sisi kelembagaan, di Kronjo berkembang sedikitnya 57 kelompok tani dan 10 KWT, dengan contoh di Desa Kronjo terdapat tiga kelompok tani dewasa (Palawad, Lentera, Sumur Karang Tandon) dan satu KWT Karya Prasama, serta deretan kelompok di desa lain seperti Tani Mukti, Raja Tani, Muncung, Muncung Berkah, Bunga Lestari, dan Embun Pagi di Muncung. Jumlah petani yang terorganisir di Kecamatan Kronjo sebanyak 3.639 orang melalui struktur poktan dan KWT yang tersebar di seluruh desa.

Komoditas unggulan utama di Kecamatan Kronjo adalah padi sawah irigasi dan tadah hujan, dengan luas tanam 4.052 ha per tahun dan produktivitas gabah rata-rata 5,3–5,6 ton/ha, dengan potensi peningkatan hingga sekitar 6,0 ton/ha melalui penerapan teknologi budidaya seperti jajar legowo dan pengairan berselang. Di beberapa desa, seperti Pagedangan Udik, Pagenjahan, Pasir, dan Cirumpak, indeks pertanaman sudah mencapai IP 170–200, sedangkan desa lain seperti Blukbuk masih sekitar IP 130, menunjukkan adanya ruang peningkatan intensitas tanam pada musim tanam kedua.

Pola tanam utama di Kronjo adalah padi–padi–palawija atau padi–padi–hortikultura, di mana musim tanam pertama didominasi padi, dan musim tanam kedua mulai dikembangkan semangka, melon, timun suri, serta sayuran daun di lahan sawah maupun lahan kering dekat sumber air. Komoditas ternak yang mendukung sistem usahatani terintegrasi antara lain sapi, kambing, dan ayam; misalnya data rekap komoditas menunjukkan populasi sapi lebih dari 2.300 ekor dan ayam sekitar 2.000 ekor di seluruh desa, yang berpotensi dikembangkan sebagai usaha sampingan maupun integrasi dengan usaha tanaman pangan.

Kecamatan Gunung Kaler merupakan bagian dari wilayah kerja BPP Kronjo yang sangat agraris, dengan luas lahan sawah sekitar 2.505 ha yang tersebar di 9 desa: Gunung Kaler, Onyom, Kandawati, Cipaeh, Cibetok, Tamiang, Kedung, Sidoko, dan Rancagede. Kondisi agroekosistem ditandai lahan datar sampai bergelombang, ketinggian 0–5 mdpl, jenis tanah aluvial–podsolik–grumosol dengan pH 5,5–6,5 dan suhu 28–33°C, yang sangat sesuai untuk pengembangan padi sawah dan hortikultura dataran rendah.

Jumlah penduduk di Gunung Kaler mencapai 57.007 jiwa (28.850 laki-laki dan 28.157 perempuan) dengan desa Tamiang sebagai desa terbesar (9.022 jiwa), sehingga pasokan tenaga kerja tani cukup melimpah. Lahan sawah di desa Gunung Kaler (319 ha), Tamiang (331 ha), Kandawati (289 ha), dan desa lainnya menopang sistem produksi padi dengan intensitas tanam tinggi dan potensi pengembangan ternak ruminansia kecil serta unggas.

Kelembagaan petani cukup kuat dengan 58 kelompok tani dewasa dan 2 KWT yang tersebar di seluruh desa. Jumlah anggota kelompok sebanyak 4.014 petani, merupakan yang terbanyak dibandingkan kecamatan lain di wilayah BPP Kronjo. Komoditas unggulan di Gunung Kaler adalah padi sawah dengan luas tanam 4.808 ha per tahun dan produktivitas rata-rata 5,53 ton/ha, dengan rentang 5,3–5,8 ton/ha antar desa dan potensi peningkatan hingga sekitar 5,8 ton/ha melalui peningkatan IP dan teknologi budidaya. Selain padi, komoditas hortikultura seperti semangka, melon, timun suri, dan sayuran daun serta komoditas perkebunan rakyat (ubi kayu, kacang tanah) dikembangkan khususnya pada musim tanam kedua dan lahan darat dekat sumber air, di samping ternak kambing dan itik yang dinilai masih sangat potensial dikembangkan.

Pola tanam utama di Gunung Kaler didominasi padi–padi–hortikultura dengan indeks pertanaman IP 190–200 di hampir semua desa, kecuali Sidoko yang masih sekitar IP 145 karena kendala ketersediaan air. Pada musim tanam pertama petani umumnya menanam padi dengan sistem irigasi teknis sampai setengah teknis, sedangkan pada musim tanam kedua sebagian lahan masih dapat dimanfaatkan untuk semangka, melon, timun suri, atau sayuran sehingga memberikan peluang peningkatan pendapatan rumah tangga tani.

Kecamatan Mekar Baru juga memiliki kelembagaan petani yang cukup kuat, tercatat sebanyak 53 kelompok termasuk KWT dengan anggota aktif keseluruhan mencapai 2.379 anggota. Kecamatan Mekar Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kronjo dan Gunung Kaler. Wilayah Mekar Baru berada di sebelah barat Kecamatan Kronjo dan di sebelah utara serta timur Kecamatan Gunung Kaler, sehingga secara fungsional menjadi bagian dari hamparan pertanian lahan sawah dataran rendah yang sama dan mendukung keterpaduan sistem irigasi dan pemasaran hasil.

Secara agroekologis dan sosial ekonomi, potensi Mekar Baru serupa dengan Kronjo dan Gunung Kaler, yakni basis petani padi sawah, dukungan irigasi yang terhubung dengan daerah sekitarnya, dan peluang pengembangan hortikultura serta ternak kambing–itik sebagai komoditas pendukung yang sejalan dengan pola usaha di Kronjo dan Gunung Kaler.

Tabel 21. Potensi Pertanian BPP Kronjo

Kecamatan	Kronjo	Gunung Kaler	Mekar Baru
Jumlah Poktan	57 poktan	58 poktan	Na
Jumlah KWT	10 KWT	2 KWT	Na
Total kelembagaan (Poktan+KWT)	77 kelembagaan	60 kelembagaan	53 kelembagaan
Jumlah petani terorganisir (perkiraan anggota)	3.639	4.014	2.379
Komoditas unggulan utama	Padi sawah; hortikultura sayuran, semangka, melon, timun suri; ternak sapi, kambing, ayam	Padi sawah; hortikultura (sayuran, semangka, melon, timun suri); ternak kambing, itik, ayam	Padi sawah dan hortikultura dataran rendah (mengikuti pola wilayah sekitarnya)
Pola tanam utama	Padi–padi–palawija/hortikultura, IP 150–200	Padi–padi–hortikultura, IP 190–200 (Sidoko ±145)	Padi–padi–palawija/hortikultura (diasumsikan sehamparan irigasi dengan Kronjo–Gunung Kaler)

Sumber: IPW BPP Kronjo

BPP Kampung Melayu

Gambaran potensi pertanian di wilayah kerja BPP Kampung Melayu menunjukkan basis produksi pangan yang kuat di tiga kecamatan, yaitu Kosambi, Teluknaga, dan Pakuhaji, dengan struktur kelembagaan petani yang relatif mapan serta pola tanam berbasis padi dan sayuran daun yang intensif.

Di Kecamatan Kosambi, wilayah kerja BPP Kampung Melayu mencakup 7 desa dan 3 kelurahan dengan luas wilayah 29,452 km², ketinggian 0–3 meter dpl dan topografi datar, sehingga sangat sesuai untuk pengembangan padi sawah dan sayuran dataran rendah. Lahan sawah yang masih tersisa terpusat di tiga desa utama, yaitu Salemban Jaya seluas 18 ha, Belimbing 15 ha, dan Rawa Burung 25 ha, seluruhnya beririgasi teknis dan menjadi kantong produksi padi sawah kecamatan. Selain sawah, di desa-desa lain seperti Jati Mulya dan Rawa Rengas berkembang lahan kering dan pekarangan yang dimanfaatkan untuk sayuran serta usaha ternak skala rumah tangga.

Kelembagaan petani di Kosambi terbentuk dalam 13 kelompok tani aktif dengan rincian 7 kelompok tani dewasa dan 6 Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar terutama di Salemban Jaya, Belimbing, Rawa Burung, Rawa Rengas, Jati Mulya, dan Salemban Jati. Jika rata-rata anggota tiap kelompok berkisar 20–30 orang (misalnya Melati II beranggotakan 14 orang, Mekar Jaya III di Rawa Burung 36 orang, Gombang II di Belimbing 18 orang, Jatimulya Berseri dan Srikandi masing-masing 25 orang), terdapat 307 petani yang tergabung dalam kelembagaan ini. Struktur kelembagaan diperkuat oleh 2 gapoktan aktif di Salemban Jaya dan Rawa Burung yang berfungsi sebagai simpul agregasi produksi dan akses sarana produksi.

Komoditas unggulan Kosambi adalah padi sawah sebagai komoditas utama dan kangkung serta bayam sebagai komoditas hortikultura daun yang diproduksi secara intensif di lahan sawah dan lahan pekarangan. Pada tahun 2023, padi sawah ditanam di lahan seluas 120 ha dengan

luas panen yang sama, produktivitas 51,30 ku/ha dan produksi 840 ton; pada tahun 2024 terjadi penurunan luas tanam menjadi 104 ha dengan produktivitas relatif stabil 51,20 ku/ha dan produksi 728 ton, penurunan ini terkait alih fungsi lahan. Kangkung pada 2024 memiliki luas tanam 23 ha dengan produktivitas 90 ku/ha dan produksi 207 ton, sedangkan bayam ditanam di 11 ha dengan produktivitas 91 ku/ha dan produksi sekitar 100,1 ton, menjadikan sayuran daun ini penting bagi pasokan sayur harian.

Pola tanam di Kosambi secara umum mengikuti pola padi-padi atau padi-bera pada lahan sawah irigasi teknis, diselingi sayuran daun di petak-petak yang dekat dengan permukiman, terutama di Rawa Burung dan Belimbing dimana kelompok seperti Mekar Jaya III dan Gombang II mengusahakan kombinasi padi dan sayuran. Di lahan kering dan pekarangan, siklus tanam lebih fleksibel dengan rotasi sayuran daun dan sedikit tanaman tahunan, sedangkan ternak kambing (sekitar 121 ekor pada 2024) serta unggas (ayam buras dan itik dengan produksi telur mencapai lebih dari 300.000 butir per tahun) menjadi penopang sistem usaha tani terpadu.

Kecamatan Teluknaga yang memiliki luas 82,755 km² dengan ketinggian 1–7 meter dpl dan batas utara Laut Jawa merupakan lumbung padi pesisir yang sangat penting dalam wilayah kerja BPP Kampung Melayu. Lahan sawah irigasi teknis masih relatif luas dan tersebar di desa-desa sentra padi, antara lain Kampung Melayu Timur (23 ha), Teluknaga (25 ha), Bojong Renged (17 ha), Kebon Cau (12 ha), Babakan Asem (35 ha), Kampung Melayu Barat (23 ha), Pangkalan (67 ha), Tegal Angus (93 ha), Lemo (32 ha), dan Kampung Besar 65,74 ha, sehingga total sawah irigasi teknis di desa-desa tersebut mencapai sekitar 402,74 ha. Lahan di desa pesisir seperti Tanjung Burung, Tanjung Pasir, dan Muara didominasi oleh non-sawah dan perikanan, namun tetap terintegrasi dalam sistem penyuluhan.

Kelembagaan petani di Teluknaga tergolong kuat dengan 41 kelompok tani yang tercatat hingga 2024, terdiri dari 28 kelompok tani dewasa dan 13 KWT, serta didukung oleh 10 gapoktan yang tersebar di desa-desa seperti Bojong Renged, Kebon Cau, Kampung Besar, Tegal Angus, dan Pangkalan. Data anggota menunjukkan, misalnya, Bojong Renged memiliki 2 poktan dewasa dengan 39 anggota dan 1 KWT dengan 30 anggota, Kampung Besar memiliki 5 poktan dengan 73 anggota dan 1 KWT dengan 20 anggota, Tegal Angus mempunyai 6 poktan dengan 174 anggota. Kecamatan Teluk Naga memiliki jumlah petani yang terorganisir mencapai 943 petani.

Komoditas unggulan di Teluknaga adalah padi sawah sebagai komoditas utama dan sayuran daun (kangkung dan bayam) sebagai hortikultura unggulan, disertai pengembangan ternak kambing dan ayam buras di hampir semua desa. Pada tahun 2023, padi sawah memiliki luas tanam 780 ha dan luas panen 593 ha, dengan produktivitas 52,33 ku/ha dan produksi 3.083 ton; pada 2024 luas tanam melonjak menjadi 1.289 ha dengan luas panen 1.136 ha, produktivitas 52,20 ku/ha dan produksi 59.299 ton, menggambarkan peningkatan program tanam yang sangat signifikan dalam satu tahun. Kangkung pada 2024 ditanam di 204,5 ha dengan produktivitas 128,89 ku/ha dan produksi 26.358,005 ton, sementara bayam di 181,5 ha dengan produktivitas 106,22 ku/ha dan produksi sekitar 1.128,93 ton, menjadikan Teluknaga salah satu sentra sayuran daun pesisir yang cukup besar.

Dari sisi peternakan, populasi kambing di Teluknaga pada 2024 mencapai 801 ekor dengan produktivitas 14 kg/ekor/tahun dan produksi daging 36.286 kg, sementara ayam buras dipelihara sekitar 6.190 ekor dan itik 6.242 ekor dengan produksi telur mencapai 1.407.010 butir per tahun. Pola tanam di Teluknaga didominasi oleh padi sawah satu sampai dua kali setahun di lahan irigasi teknis, dengan sela-sela musim tanam dimanfaatkan untuk sayuran daun di sebagian petakan yang dekat permukiman seperti di Teluknaga, Kampung Besar, Bojong Renged, dan Kebon Cau. Di lahan pekarangan dan lahan kering, petani menanam hortikultura daun secara intensif dan memelihara ternak kecil sebagai diversifikasi pendapatan, sementara desa pesisir seperti Tanjung Pasir dan Muara mengombinasikan pertanian lahan kering dengan perikanan laut dan tambak.

Kecamatan Pakuhaji, dengan luas wilayah 54,55 km² dan ketinggian 0–10 meter dpl, memiliki karakter lahan sawah yang luas namun menghadapi tekanan kuat alih fungsi lahan akibat pembangunan industri dan perumahan. Data 2022 menunjukkan luas sawah mencapai 2.478 ha, yang tersebar antara lain di Bonisari (93 ha), Rawa Boni (150 ha), Kiara Payung (147 ha), Gaga (216 ha), Buaran Bambu (230 ha), Pakuhaji (90 ha), Pakualam (116 ha), Buaran Mangga (321 ha), Surya Bahari (152 ha), Sukawali (109 ha), Kramat (285 ha), Kalibaru (258 ha), dan Kohod (240 ha), sementara total lahan pertanian bukan sawah mencapai 469 ha. Akibat alih fungsi, luas efektif sawah turun menjadi sekitar 2.145 ha, tetapi program peningkatan indeks pertanaman (IP) dan bantuan benih PIP berhasil menjaga dan bahkan meningkatkan produksi padi.

Kelembagaan petani di Pakuhaji sangat berkembang, dengan 65 kelompok tani dan 1 kelompok tani ternak yang terdaftar di SIMLUHTAN, meskipun 7 di antaranya telah tidak aktif karena lahan dikuasai pengembang dan tidak lagi dapat digarap. Selain itu terdapat 21 KWT yang tersebar di 14 desa/kelurahan serta 11 gapoktan seperti Kramat Jaya di Kramat, Gaga Cemerlang di Gaga, Mitra Tani di Kohod, Buaran Mangga di Buaran Mangga, Sukawali di Sukawali, Suryabahari di Surya Bahari, Mutiara Laksana di Laksana, dan lain-lain. Total terdapat sebanyak 3.559 petani yang tergabung kelembagaan petani di Kecamatan Paku Haji.

Komoditas unggulan Pakuhaji adalah padi sawah sebagai komoditas basis, didukung hortikultura sayuran dataran rendah (terutama kangkung dan bayam) serta dalam skala lebih kecil buah-buahan semusim seperti semangka dan melon. Pada 2022 luas sawah 2.478 ha menjadi basis bagi peningkatan intensitas tanam; pada 2023 luas tanam padi mencapai 5.225 ha dengan luas panen 4.033 ha, produktivitas 54 ku/ha dan produksi 21.778 ton, sedangkan pada 2024 luas tanam 4.404 ha dengan luas panen 5.541 ha, produktivitas 55 ku/ha dan produksi melonjak menjadi 30.475 ton, atau terjadi peningkatan produksi sekitar 8.697 ton. Kenaikan produksi tersebut sangat dipengaruhi oleh program Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) seluas 1.800 ha yang tersebar di 14 desa, termasuk peningkatan IP dari 200 menjadi 300 di sekitar 337 ha yang memperoleh bantuan benih pada 2024.

Pada subsektor hortikultura, data produksi BPS menunjukkan bahwa bayam menghasilkan 616–647 kuintal per tahun dan kangkung 555–1.071 kuintal pada periode 2020–2023, dengan luas panen yang meningkat dari 8 ha menjadi 48 ha untuk masing-masing komoditas, menandakan peran penting sayuran daun dalam diversifikasi usaha tani. Sementara itu, pada subsektor peternakan terdapat 1 kelompok tani ternak dan berbagai lembaga penunjang usaha tani seperti 4 kios saprodi, 1 pasar, 1 bank, serta BPP, yang bersama 11 gapoktan membentuk ekosistem agribisnis yang saling terkait.

Pola tanam di Pakuhaji terdokumentasi dengan jelas, dengan pola utama padi–bera–padi di lahan sawah irigasi teknis serta pola sayuran–sayuran–sayuran di lahan hortikultura dataran rendah. Pola ini diperkuat oleh data progres tanam PIP yang menunjukkan banyak kelompok, seperti Tunas Harapan di Bonisari (33 ha), Kayu Putih di Rawa Boni (28 ha), Rawa Badak di Laksana (30 ha), dan berbagai kelompok di Buaran Mangga, yang melakukan tanam dua hingga tiga kali setahun dengan produktivitas yang meningkat dari 50–52 ku/ha menjadi 55–60 ku/ha. Dengan demikian, pola tanam yang mengombinasikan padi IP 200–300 dan sayuran tiga kali setahun, disertai potensi integrasi dengan ternak kambing dan unggas, menjadikan Pakuhaji salah satu pusat intensifikasi pertanian di wilayah kerja BPP Kampung Melayu.

Tabel 22. Potensi Pertanian BPP Kampung Melayu

Kecamatan	Kosambi	Teluknaga	Paku Haji
Perkiraan jumlah petani (pelaku utama tergabung kelembagaan)	307 petani	943 petani	3559 petani tergabung dalam 65 poktan, 1 poktan ternak (tidak aktif), 21 KWT.

Kelembagaan petani (Poktan & KWT)	13 poktan (7 dewasa, 6 KWT), 2 gapoktan; 1 penyuluh PNS dan 2 penyuluh swadaya	41 poktan (28 dewasa, 13 KWT), 10 gapoktan, 4 penyuluh PNS/PPPK & swadaya).	65 poktan + 1 poktan ternak (7 tidak aktif), 21 KWT, 11 gapoktan, 9 POSLUHDES sebagai simpul kelembagaan desa.
Komoditas unggulan	Padi sawah (104 ha, produksi 728 ton), kangkung (23 ha dengan produksi 207 ton), bayam (11 Ha dengan produksi 100,1 ton)	Padi sawah (luas tanam 1.289 ha, panen 1.136 ha, produksi 59.299 ton), kangkung (204,5 ha, 26.358 ton), bayam (181,5 ha, 1.128,93 ton), kambing (801 ekor, 36.286 kg daging).	Padi sawah (luas tanam 54.404 ha, luas panen 5.541 ha, produksi 30.475 ton) kangkung (48 ha dengan produksi 648 kuintal) & bayam (48 ha dengan produksi sebesar 617 kuintal)
Pola tanam utama	Padi-padi atau padi-bera di sawah irigasi teknis; sayuran daun di sela musim dan pekarangan.	Padi 1–2 kali setahun di sawah irigasi teknis; hortikultura daun (kangkung, bayam) di lahan sawah & pekarangan.	Padi-bera-padi di sawah irigasi teknis dengan IP 200–300; sayuran-sayuran-sayuran di lahan hortikultura dataran rendah.

Sumber: IPW BPP Kampung Melayu

BPP Tegal Kunir

BPP Tegal Kunir yang mencakup Kecamatan Mauk dan Kemiri, berperan sebagai basis produksi padi sawah dengan irigasi sederhana serta perkembangan usaha palawija dan ternak. Kelompok tani di wilayah ini aktif dan integrasi usaha pertanian menjadi salah satu ciri utamanya.

Potensi pertanian di wilayah kerja BPP Tegal Kunir membentang di dua kecamatan yaitu Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri, yang secara keseluruhan memiliki luas lahan sawah sekitar 4.341 ha, terdiri atas 2.569 ha di Mauk dan 1.772 ha di Kemiri. BPP Tegal Kunir juga memiliki lahan bukan sawah, terdiri dari 1075 di Kecamatan Mauk dan 218 ha di Kecamatan Kemiri. Kedua kecamatan ini berada di dataran rendah dengan jenis tanah dominan aluvial, ketinggian 0–18 mdpl, dan suhu rata-rata harian 28–31°C, sehingga sangat kondusif untuk pengembangan usahatani padi sawah dan hortikultura. Struktur ruang wilayahnya mencakup 11 desa dan 1 kelurahan di Mauk serta 7 desa di Kemiri, yang membentuk mosaik hamparan sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, dan pekarangan-lahan kering yang dimanfaatkan untuk palawija, sayuran, buah-buahan, dan ternak.

Dari sisi sumber daya manusia, basis petani di wilayah BPP Tegal Kunir tergolong kuat dan padat, tercermin dari jumlah anggota kelompok tani dan kelembagaan yang terbentuk. Di Kecamatan Mauk tercatat total anggota kelompok tani sebanyak 1.939 orang (laki-laki dan perempuan) yang tersebar dalam puluhan kelompok tani di 12 desa. Di Kecamatan Kemiri jumlah anggota kelompok tani mencapai 1.536 orang, terhimpun 38 kelompok tani dan 2 kelompok ternak (POKNAK), dan 10 KWT. KWT tersebar diseluruh desa di Kecamatan Kemiri, seperti Legok Sukamaju (2 KWT), Rancalabu (2 KWT), Kemiri (1 KWT), Klebet (2 KWT), Patramanggala, Karang anyar, dan Lontar masing-masing terdapat 1 KWT. Tersebarnya KWT tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam sistem usaha tani—mulai dari budidaya pekarangan, hortikultura skala kecil, hingga pengolahan pascapanen—relatif kuat dan terstruktur.

Dari sisi komoditas, pertanian BPP Tegal Kunir bertumpu pada padi sebagai komoditas utama, yang diikuti oleh sayuran hortikultura dan buah-buahan tropis. Di Kecamatan Mauk,

padi sawah menempati seluruh areal sawah seluas 2.569 ha, termasuk 2.099 ha sawah irigasi teknis dan 470 ha sawah tadah hujan, dengan komoditas penyalang berupa palawija dan sayuran pada sebagian lahan. Data produktivitas menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2022–September 2023, luas panen padi di Mauk mencapai 8.639 ha (akumulatif beberapa musim), dengan produktivitas rata-rata 5,16 ton/ha gabah kering panen (GKP) dan total produksi sekitar 46.273 ton GKP. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, sistem budidaya padi di Mauk sudah berada pada kisaran produktivitas menengah, namun masih memiliki ruang peningkatan melalui perbaikan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian OPT yang lebih intensif.

Komoditas hortikultura di Mauk memperlihatkan keragaman dan intensitas usaha yang cukup tinggi, terutama di desa-desa pesisir seperti Buaran Asem dan sekitarnya. Data produktivitas sayuran dari beberapa kelompok tani, misalnya Buaran Asem Tengah, Jamblang, Kepuh Rawa Cabe, Subur Makmur, Karya Sejati, dan Dukuh Jaya, menunjukkan rata-rata produktivitas sekitar 12,6 ton/ha untuk komoditas utama seperti timun suri (12–17 ton/ha), semangka (17–20 ton/ha), kacang panjang (11–13 ton/ha), cabai merah (7–15 ton/ha), paria (17 ton/ha), terung (8–12 ton/ha), dan bawang merah (sekitar 5 ton/ha). Di lahan bukan sawah seluas 1.297 ha, petani juga mengembangkan kebun campuran buah-buahan seperti kelapa, pisang, jambu biji, mangga, pepaya, dan jambu air, yang memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang pasar lokal dan regional.

Di Kecamatan Kemiri, pola komoditas menunjukkan orientasi yang sedikit lebih terkonsentrasi pada padi dan mentimun, dengan basis lahan sawah seluas 1.772 ha. Sebagian besar sawah di Kemiri berupa irigasi fungsional dengan 1.326 ha sawah irigasi dan sekitar 400,7 ha sawah tadah hujan, sehingga keseluruhan hamparan sawah praktis didominasi oleh padi sebagai tanaman utama. Data produktivitas tanaman pangan menunjukkan bahwa tujuh desa di Kemiri—Legok Sukamaju, Rancalabuh, Kemiri, Klebet, Patramanggala, Karang Anyar, dan Lontar—secara kumulatif mengusahakan panen padi seluas 1.772 ha dengan produktivitas rata-rata 53,14 kw/ha atau sekitar 5,31 ton/ha, menghasilkan total produksi gabah sebesar 9.322,8 ton. Produktivitas ini relatif sebanding bahkan sedikit lebih tinggi daripada Mauk, yang mengindikasikan tingkat penerapan teknologi yang cukup baik, sejalan dengan data penerapan teknologi padi sawah di Kemiri yang mencatat penggunaan benih berlabel 75%, pemupukan organik 55%, dosis dan cara pemupukan sesuai anjuran 75%, serta pengamatan dan pengendalian OPT 70%.

Komoditas hortikultura unggulan di Kemiri adalah mentimun, yang tersebar di beberapa desa dengan skala lahan lebih terbatas. Data menunjukkan bahwa di Legok Sukamaju, Rancalabuh, Klebet, Patramanggala, dan Lontar terdapat total luas tanam mentimun sekitar 3,5 ha dengan produktivitas rata-rata 200 kw/ha atau 20 ton/ha, menghasilkan total produksi sekitar 80 ton. Pola pengembangan mentimun ini umumnya mengikuti musim kemarau dan memanfaatkan lahan sawah selepas panen padi atau lahan kering tertentu, dengan dukungan penerapan teknologi yang relatif baik: dosis dan cara pemupukan sesuai anjuran 75%, pengamatan dan pengendalian OPT 65%, serta penanganan panen dan pascapanen 70%, dengan rata-rata tingkat penerapan teknologi 60%. Kombinasi padi dan mentimun menjadikan Kemiri sebagai kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai sentra padi-mentimun terpadu, termasuk integrasi dengan usaha ternak sapi, kambing, ayam kampung, dan itik yang memiliki produktivitas masing-masing 1 ekor anakan/tahun untuk sapi, 30 kg anak/induk/tahun untuk kambing, 35 ekor/induk/tahun untuk ayam kampung, dan 250 butir/ekor/tahun untuk itik.

Pola tanam di kedua kecamatan memperlihatkan karakter intensifikasi padi yang kuat dengan beberapa variasi integrasi palawija dan sayuran. Di Mauk, Tabel Pola Tanam menunjukkan bahwa seluruh areal sawah seluas 2.569 ha masuk dalam pola Padi – Bera dan Padi – Padi – Palawija/Sayuran, yang menggambarkan adanya rotasi musim tanam ganda padi dan satu musim palawija atau sayuran di sebagian petak. Pola Padi – Padi – Palawija/Sayuran membuka ruang bagi pengembangan hortikultura bernilai tambah pada musim kemarau, antara

lain timun suri, semangka, dan sayuran buah lain di desa-desa seperti Buaran Asem, Ketapang, dan Tanjung Anom. Sementara itu, di Kemiri pola tanam padi yang dominan adalah Padi – Bera – Padi di seluruh hamparan 1.772 ha, dengan catatan bahwa pola Padi – Padi – Palawija/Sayuran tercatat 0 ha dalam data resmi. Hal ini menunjukkan bahwa peluang diversifikasi di Kemiri masih terbuka, terutama bila diintegrasikan dengan pengembangan mentimun dan sayuran lain pasca panen padi, sehingga intensitas tanam dan pendapatan petani dapat meningkat.

Sarana dan prasarana penunjang usahatani juga menjadi salah satu penguat potensi di wilayah BPP Tegal Kunir. Di Kecamatan Mauk tercatat 64 unit hand tractor, 64 sprayer, dan 24 huller dalam kondisi baik, serta beberapa peralatan lain seperti power thresher dan caplak legowo yang mendukung mekanisasi budidaya padi. Sementara di Kecamatan Kemiri tersedia 40 hand tractor, 56 sprayer, 13 huller, 3 power thresher, dan 28 caplak legowo, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan alat mesin pertanian cukup memadai untuk mendukung pengelolaan lebih dari 4.300 ha lahan sawah di dua kecamatan tersebut. Ketersediaan alsintan ini memberikan peluang untuk mendorong efisiensi olah tanah, tanam, dan panen, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang kian terbatas.

Secara keseluruhan, potensi pertanian BPP Tegal Kunir ditandai oleh kombinasi kondisi biofisik yang mendukung (tanah aluvial, datar, beririgasi), basis petani yang besar, kelembagaan yang kuat, serta komoditas unggulan yang jelas (padi sawah, hortikultura sayuran dan buah, serta ternak). Dengan produktivitas padi berkisar 5,16–5,31 ton/ha dan produktivitas mentimun sekitar 20 ton/ha, wilayah ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan sekaligus sentra hortikultura dan ternak di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang. Penguatan teknologi budidaya, pemupukan berimbang, pengendalian OPT, serta pengembangan kemitraan pasar akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut dalam kerangka program penyuluhan pertanian yang responsif terhadap kebutuhan petani di Kecamatan Mauk dan Kemiri.

Tabel 23. Potensi pertanian BPP Tegal Kunir

Kecamatan	Mauk	Kemiri
Perkiraan jumlah petani (anggota poktan)	1.939 petani anggota poktan di 12 desa	1.536 petani anggota poktan di 7 desa
Perkiraan jumlah kelembagaan petani	85 poktan aktif; dan 13 KWT	38 poktan 2 kelompok peternak dan 10 KWT
Komoditas unggulan	Padi sawah (luas panen sebanyak 2.569 ha), palawija, sayuran (timun suri, semangka, kacang panjang, terung, cabai merah, paria), buah-buahan (kelapa, pisang, mangga, jambu, pepaya, jambu air), serta ternak sapi, kambing, ayam kampung, itik	Padi sawah (luas panen sebanyak 1.772 ha) dengan produktivitas rata-rata 5,31 ton/ha; mentimun (3,5 ha, produktivitas 20 ton/ha, produksi 80 ton); sayuran lain (kacang panjang, mentimun, terung) dan ternak sapi, kambing, ayam kampung, itik
Pola tanam utama	Padi – Padi – Palawija/Sayuran dan Padi – Bera di seluruh areal sawah 2.569 ha; intensitas tanam padi tinggi dengan sayuran/palawija sebagai penyelang musim kemarau	Padi – Bera – Padi di seluruh areal 1.772 ha; pola Padi – Padi – Palawija/Sayuran belum tercatat (0 ha), sehingga peluang diversifikasi hortikultura pasca padi masih sangat Besar

Sumber: IPW BPP Tegal Kunir

BPP Carenang

Wilayah kerja BPP Carenang yang mencakup Kecamatan Cisoka, Solear, Tigaraksa, dan Jambe memiliki potensi pertanian yang sangat strategis karena lebih dari separuh ruang wilayahnya berupa lahan pertanian produktif. Secara keseluruhan, luas wilayah BPP Carenang mencapai 14.021,10 hektar dengan komposisi lahan pertanian sekitar 8.350 hektar atau 59,55% dari total wilayah, terdiri atas 4.328 hektar lahan sawah dan 4.022 hektar lahan darat/non sawah. Lahan sawah ini tersebar di Kecamatan Cisoka seluas 1.228 hektar (523 hektar beririgasi teknis dan 705 hektar tadah hujan), di Solear 1.154 hektar, di Tigaraksa sekitar 1.197 hektar, dan di Jambe sekitar 733 hektar, sehingga menjadikan padi sawah sebagai komoditas pangan utama yang relatif merata di keempat kecamatan. Kondisi agroekosistem berupa dataran rendah pada ketinggian sekitar 51–70 meter di atas permukaan laut dengan jenis tanah aluvial, latosol, dan podsolik merah kuning ber-pH 5,5–6,5 memberikan dasar kesesuaian yang baik bukan hanya untuk padi, tetapi juga untuk jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan hortikultura.

Dari sisi kelembagaan petani, struktur sosial ekonomi pertanian di wilayah BPP Carenang ditopang oleh 123 kelompok tani dan 32 Kelompok Wanita Tani (KWT), sehingga total kelembagaan mencapai 155 unit yang tersebar di 4 kecamatan dan lebih dari 40 desa. Di Kecamatan Cisoka sendiri terdapat 40 kelompok tani dan 9 KWT (total 49 kelembagaan) yang tersebar di 10 desa, seperti Carenang, Bojongloa, Karangharja, dan Sukatani, dengan keanggotaan tiap kelompok umumnya puluhan petani. Kecamatan Solear memiliki 26 kelompok tani dan 7 KWT (total 33 kelembagaan) di 7 desa, dengan jumlah anggota kelompok antara 25 hingga 74 orang, menunjukkan basis rumah tangga tani yang cukup besar untuk ukuran kecamatan yang didominasi sawah tadah hujan. Tigaraksa memiliki 41 kelompok tani dengan komposisi kelas kemampuan didominasi kelas lanjut dan dilengkapi gapoktan serta lumbung pangan di beberapa desa, namun jumlah petani yang tercatat hanya sekitar 388 jiwa atau sekitar 0,24% dari total penduduk 161.595 jiwa, menandakan adanya tantangan regenerasi petani di tengah tekanan urbanisasi. Sementara itu, Kecamatan Jambe memiliki 30 kelompok tani dan 5 KWT (total 35 kelembagaan) yang tersebar di 10 desa, dengan kelas kelompok didominasi pemula dan lanjut, sehingga masih terbuka ruang besar bagi penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kemampuan manajerial usaha tani.

Potensi komoditas di wilayah BPP Carenang menunjukkan kombinasi yang seimbang antara tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan peternakan. Di Cisoka, padi sawah menguasai 1.228 hektar lahan dengan pola irigasi teknis dan tadah hujan, didukung oleh sumber air seperti Bendung Ranca Sumur–Cidurian dan pemanfaatan eks galian pasir melalui sistem pipanisasi. Komoditas jagung hibrida berkembang di kelompok Janur Sejahtera Desa Bojongloa seluas sekitar 5 hektar dan di kelompok Cinibung Gemilang Desa Karangharja seluas sekitar 16 hektar, sementara kacang tanah tersebar di kelompok-kelompok seperti Mekar Jaya dan lainnya. Di Solear, total 1.154 hektar lahan sawah tadah hujan dimanfaatkan petani untuk padi, yang kemudian diputar menjadi palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, singkong, dan ubi jalar, serta hortikultura seperti cabai dan mentimun; beberapa desa, seperti Solear, Cikuya, dan Cikareo, memadukan padi dengan palawija dan sayuran, sementara peternakan sapi dan domba menambah diversifikasi pendapatan.¹

Tigaraksa sebagai kecamatan terluas (sekitar 5.279,80 hektar) sekaligus pusat pemerintahan kabupaten memiliki struktur komoditas yang lebih variatif dan intensif. Padi sawah dengan luas tanam sekitar 1.197 hektar menghasilkan produksi sekitar 7.433 ton gabah kering panen per tahun dengan produktivitas lebih dari 6 ton per hektar, menjadikannya lumbung pangan utama di wilayah BPP Carenang. Selain padi, jagung hibrida ditanam di lahan sekitar 10 hektar dengan produksi 62 ton (62 kw/ha), cabai seluas 3 hektar dengan produktivitas sekitar 102 kw/ha, kacang panjang 18 hektar dengan produksi 183,78 ton, mentimun 18 hektar

dengan produksi 163,35 ton, kangkung dan bayam masing-masing 7 hektar dengan produksi lebih dari 80–110 ton, melon 1,7 hektar dengan produksi 4,45 ton, kacang tanah 7 hektar, serta ubi kayu 18 hektar dengan produksi 721,80 ton dan ubi jalar 3 hektar dengan produksi 113,70 ton. Populasi ternak di Tigaraksa juga signifikan dengan sekitar 382 ekor sapi, 135 ekor kerbau, 412 ekor kambing, 865 ekor domba, lebih dari 3.300 ekor ayam kampung, dan sekitar 220.000 ekor ayam pedaging, sehingga mendukung integrasi tanaman–ternak dan penyediaan pupuk organik.

Kecamatan Jambe, dengan luas wilayah sekitar 2.762 hektar, memperlihatkan kekuatan pada kombinasi padi sawah dan hortikultura. Lahan sawah sekitar 733 hektar dimanfaatkan penuh dengan luas tanam dan panen yang sama, menghasilkan produksi sekitar 3.799 ton padi dengan produktivitas 5,1–5,3 ton per hektar, yang tersebar di desa-desa seperti Jambe, Taban, Mekarsari, Rancabuaya, Sukamanah, dan lainnya. Di luar padi, Jambe unggul dalam diversifikasi hortikultura: cabai, mentimun, kacang panjang, paria, tomat, terong, dan jamur tiram menjadi komoditas penting di desa-desa seperti Daru, Taban, Pasir Barat, dan Sukamanah. Salah satu ikon komoditas spesifik adalah jeruk lemon California seluas sekitar 5 hektar di Poktan Manukung Desa Rancabuaya, yang dikombinasikan dengan padi sawah, kacang tanah, sapi, dan domba dalam satu hamparan usaha tani terpadu. Sub-sektor peternakan di Jambe juga menonjol, dengan sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan bebek yang tersebar hampir di seluruh desa, sehingga memberikan peluang besar integrasi usaha tani tanaman–ternak dan pengembangan pupuk organik maupun usaha olahan hasil ternak.

Pola tanam di wilayah BPP Carenang sangat dipengaruhi oleh kondisi tadah hujan dan variabilitas musim, termasuk dampak El-Nino yang menyebabkan penurunan luas tanam padi di beberapa tahun terakhir. Di banyak lokasi sawah terutama di Tigaraksa dan Cisoka, petani menerapkan pola padi–padi–palawija atau padi–padi–bera pada lahan dengan ketersediaan air lebih baik, sementara di lahan yang lebih kering pola padi–palawija–bera atau padi–bera–bera masih dijumpai. Pada lahan kering dan pekarangan, pola tanam palawija–palawija–hortikultura dengan kombinasi kacang tanah, kacang panjang, jagung, sayuran, serta tanaman tahunan seperti pepaya dan jeruk menjadi pilihan utama. Di Solear dan Jambe, pergiliran padi musim hujan dengan kacang tanah, kacang panjang, ubi jalar, singkong dan cabai setelah panen padi menjadi strategi utama untuk memaksimalkan pendapatan dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga serta kebutuhan pasar.

Secara kelembagaan dan sumber daya manusia, wilayah BPP Carenang memiliki modal sosial yang penting sekaligus tantangan. Jumlah kelompok tani dan KWT yang mencapai 155 kelembagaan menunjukkan jaringan sosial yang relatif terbangun dengan baik, tetapi rendahnya proporsi petani terhadap total penduduk di kecamatan seperti Tigaraksa (0,24%) mengindikasikan perlunya penguatan regenerasi petani dan peningkatan daya tarik sektor pertanian, misalnya melalui mekanisasi, pertanian berbasis IT, dan pengembangan agribisnis yang lebih menjanjikan.

Di sisi lain, keberadaan gapoktan, koperasi, dan akses ke lembaga keuangan serta pasar menjadi peluang untuk memperbaiki tata niaga, memotong rantai tataniaga yang merugikan petani, dan mengembangkan fungsi kelompok tani sebagai terminal agribisnis. Dengan potensi lahan sawah 4.328 hektar, lahan kering 4.022 hektar, ratusan kelompok tani dan KWT, serta keragaman komoditas dari padi, jagung, kacang-kacangan, hortikultura, hingga ternak ruminansia dan unggas, BPP Carenang memiliki basis kuat untuk dikembangkan sebagai sentra produksi pangan dan hortikultura yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.

Tabel 24. Potensi pertanian per kecamatan (BPP Carenang)

Kecamatan	Cisoka	Solear	Tigaraksa	Jambe
Perkiraan jumlah petani*	1969 anggota petani	1460 anggota petani	na	na
Jumlah kelembagaan (poktan + KWT)	49 (40 poktan, 9 KWT)	33 (26 poktan, 7 KWT)	30 poktan dan 12 KWT yang tergabung dalam 10 gapoktan	27 poktan dan 4 KWT
Komoditas unggulan utama	Padi sawah, jagung hibrida, kacang tanah, pepaya, hortikultura, ayam pedaging plasma	Padi sawah, kacang tanah, kacang panjang, singkong, ubi jalar, cabai, mentimun, sayuran, sapi, Kerbau	Padi sawah, jagung hibrida, cabai, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam, melon, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sapi, ayam pedaging	Padi sawah, cabai, mentimun, kacang panjang, paria, tomat, terong, jamur tiram, jeruk lemon California, sapi, kambing, domba, ayam, bebek
Pola tanam utama	Padi-padi-bera; padi-palawija/hortikultura; palawija di lahan kering	Padi musim hujan, dilanjut palawija (kacang tanah, kacang panjang, ubi jalar) dan hortikultura	Padi-padi-palawija/hortikultura; padi-bera; palawija berulang pada lahan kering	Padi musim hujan, diikuti palawija dan hortikultura; variasi sesuai desa dan akses air

Sumber: IPW Kec Cisoka, IPW Kec. Solear dan BPP carenang

BPP Caringin

Potensi pertanian di wilayah kerja BPP Caringin yang mencakup Kecamatan Legok, Panongan, Curug, Pagedangan, Cisauk, dan Kelapa Dua sangat besar, meskipun sebagian wilayah mengalami tekanan alih fungsi lahan dan perubahan iklim.

Wilayah kerja BPP Caringin memiliki karakter umum dataran rendah-bergelombang, tanah aluvial-latosol-podsolik, serta iklim basah-tropis yang mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan rakyat. Sebagian besar lahan sawah merupakan sawah tadah hujan sehingga pola tanam padi dan palawija sangat bergantung pada ketersediaan air hujan dan rentan terhadap kekeringan (El Nino) maupun banjir pada lokasi-lokasi tertentu.

Kecamatan Curug memiliki luas sawah sekitar 108 ha, seluruhnya sawah tadah hujan, dengan tambahan lahan kering/pekarangan yang cukup luas untuk hortikultura dan palawija. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani/pekebun sekitar 645 jiwa, dengan kelembagaan petani berupa 10 kelompok tani dan sekitar 7 kelompok wanita tani (KWT) yang sebagian besar masih pada kelas pemula dan lanjut. Komoditas unggulan utama adalah padi sawah, jagung, dan sayuran (cabe, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam, ubi kayu, ubi jalar) dengan pola tanam dominan padi-padi-bera pada lahan sawah serta palawija-hortikultura pada lahan kering.

Dari sisi kinerja usahatani, produktivitas padi sawah mencapai sekitar 6,1 ton/ha dengan tren penurunan luas tanam akibat alih fungsi lahan, sedangkan jagung dan sayuran mengalami fluktuasi produksi akibat kekeringan, namun beberapa komoditas seperti cabe dan kacang panjang menunjukkan peningkatan produktivitas. Populasi ternak (sapi, kambing, domba, ayam ras dan ayam lokal) juga cukup besar sehingga membuka peluang integrasi tanaman-ternak.

Kecamatan Panongan memiliki luas wilayah sekitar 3.500,94 ha dengan potensi lahan sawah sekitar 534 ha, hampir seluruhnya sawah tadah hujan, serta lahan non-sawah (ladang, tegal, pekarangan) yang dimanfaatkan untuk hortikultura, palawija dan perkebunan rakyat. Jumlah penduduk sekitar 128–136 ribu jiwa, dengan petani sekitar 7.694 orang, dan terdapat 17 kelompok tani (poktan) serta 7 KWT dengan komposisi kelas kelompok didominasi kelas lanjut dan pemula, tanpa kelompok madya dan utama. Komoditas unggulan utama adalah padi sawah (komoditas prioritas nasional), diikuti palawija (kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) dan hortikultura (kacang panjang, mentimun, terung, kangkung, bayam, rambutan).

Dalam beberapa tahun terakhir, luas tanam padi turun dari sekitar 1.361 ha menjadi 1.053 ha karena alih fungsi lahan, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman, dengan produktivitas sekitar 5,8–6 ton/ha. Pola tanam utama di Panongan adalah padi–padi–bera pada lahan sawah tadah hujan, sedangkan di lahan kering dikembangkan palawija dan sayuran semusim yang disesuaikan dengan ketersediaan air.

Kecamatan Pagedangan memiliki luas wilayah sekitar 49,96 km² dengan luas sawah sekitar 185,2 ha, tersebar di desa-desa seperti Karang Tengah, Malangnengah, Jatake, Situgadung, dan Cijantra. Jumlah kelompok tani aktif mencapai 28 (17 poktan dewasa dan 11 KWT) dengan 2 gapoktan, yang menunjukkan kelembagaan petani cukup hidup dan berpotensi menjadi motor pengembangan agribisnis kawasan. Komoditas unggulan utama di Pagedangan adalah padi sawah, palawija (ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah), sayuran (kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam), dan buah-buahan (rambutan, pisang, pepaya, mangga), dengan pola tanam utama padi–palawija/sayuran–bera.

Kecamatan Legok (juga dalam wilayah kerja BPP Caringin) memiliki karakter agroekosistem yang mirip dengan Pagedangan dan Panongan, berupa dataran dengan sawah tadah hujan dan lahan kering cukup luas yang ditanami padi, palawija, sayuran, tanaman tahunan serta di beberapa lokasi usaha ternak ruminansia kecil dan unggas. Tingkat penerapan inovasi teknologi pada komoditas utama (padi, jagung, kacang tanah, sayuran) berada pada kisaran 38– 52 persen, menunjukkan masih terbuka peluang besar peningkatan produktivitas melalui perbaikan teknik budidaya.

Kecamatan Cisauk memiliki potensi sawah irigasi dan tadah hujan dengan luas indeks pertanaman yang masih relatif rendah (umumnya IP 200), serta areal lahan darat yang dimanfaatkan untuk jagung, sayuran, tanaman hias, dan tanaman keras. Di Cisauk terdapat 39 kelompok tani padi sawah dengan total luas tanam sekitar 219 ha dan produktivitas padi di atas 5,5 ton/ha, serta pengembangan palawija (kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) dan hortikultura (cabe, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam) dan 6 KWT. Pola tanam utama adalah padi–padi–bera untuk sawah dan palawija/sayuran pada lahan kering, dengan beberapa wilayah menghadapi risiko kekeringan dan banjir.

Kecamatan Kelapa Dua secara administratif relatif lebih urban dengan luas wilayah sekitar 2.927 ha dan luas lahan sawah terbatas (sekitar 25 ha), namun memiliki lahan bukan sawah (pekarangan dan ladang) sekitar 612 ha yang potensial untuk pengembangan hortikultura pekarangan, sayuran, dan buah-buahan. Kelembagaan petani di Kelapa Dua terdiri dari 2 poktan dan 2 KWT yang berperan dalam pemanfaatan pekarangan, urban farming, serta pengembangan komoditas sayuran dan buah segar untuk pasar lokal kawasan permukiman padat.

Tabel 25. Potensi pertanian BPP Caringin

Kecamatan	Legok ^{a)}	Panongan ^{b)}	Curug ^{c)}	Pagedangan ^{d)}	Cisauk ^{e)}	Kelapa Dua
Perkiraan jumlah petani anggota	1440 petani anggota	1008 petani anggota	645 petani anggota	699 petani anggota	617 petani anggota	96 petani anggota
Jumlah kelembagaan (poktan + KWT)	39 poktan dan 6 KWT	17 poktan dan 7 KWT	10 poktan 7 KWT	28 poktan terdiri dari 17 kelompok tani dewasa dan 11 KWT	16 poktan dan 8 KWT	2 Poktan dan 2 KWT
Komoditas unggulan utama	Padi sawah, palawija, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam, rambutan, ternak sapi, kerbau, kambing	Padi, jagung, cabai, kacang tanah, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam, ubi kayu, rambutan, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam	Padi, jagung, cabe, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik	Padi, cabai, kacang tanah, kacang panjang, timun, kangkung, bayam, ubi kayu, ubi jalar, rambutan, pepaya	Padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabai, kacang panjang, mentimun, kangkung, bayam, rambutan, ayam, kambing, sapi	Padi, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, sapi, kambing, ayam
Pola tanam utama	Padi-palawija/sayuran-bera	Padi-padi-bera;palawija/sayuran-bera	Padi-padi-bera;padi-palawija-horti	Padi-palawija/sayuran-bera	Padi-padi-bera;palawija/sayuran	Padi+padi+bera

Sumber: ^{a)} IPW Kec. Legok^{b)} IPW Kec. Panongan^{c)} IPW Kec. Curug^{d)} IPW Kec. Pagedangan^{e)} IPW Kec. Cisauk

3.5. POTENSI BENCANA

3.5.1. REKAPITULASI POTENSI BENCANA PER BPP

BPP Sepatan

Secara umum, wilayah ini tidak dicatat sebagai daerah rentan kekeringan atau banjir. Di Kecamatan Sepatan hanya terdapat satu desa yang potensial kekeringan yakni Mekar Jaya dan dua desa potensial kekeringan di Kecamatan Sepatan Timur yakni Desa Gempol Sari dan Jati Mulya. Sedangkan di Kecamatan Sukadiri tidak terdapat risiko banjir dan kekeringan. Akan tetapi, serangan hama seperti wereng dan penggerek batang tetap menjadi ancaman. Upaya pencegahan terintegrasi sangat diperlukan melalui penguatan kelompok tani dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Tabel 26. Potensi Bencana BPP Sepatan

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Sepatan	Satu desa potensial (Desa Mekar Jaya)	Tidak	Penggerek batang
Sepatan Timur	Dua desa potensial (Desa Gempol Sari dan Jati Mulya)	Tidak	Penggerek batang
Sukadiri	Tidak	Tidak	Penggerek Batang, Wereng

Sumber: IPW BPP Sepatan

BPP Kaliasin

Potensi kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan sangat nyata di Sukamulya, menyebabkan gagal panen dan pengurangan luas tanam. Terdapat 114 ha lahan sawah potensial kekeringan yang tersebar diseluruh desa di Kecamatan Sukamulya. Potensi lahan sawah yang kekeringan pada musim kemarau berada di Desa Buniayu dan Desa Benda. Pada musim penghujan terdapat 25 ha lahan potensi banjir yang terletak di Desa Bunar, Buniayu, Kaliasin, Kudang dan Sukamulya.

Dibandingkan dua kecamatan lainnya, Kecamatan Kresek memiliki lokasi pertanian potensial kekeringan dan banjir yang cukup tinggi. Sekitar 93 ha lahan pertanian yang tersebar di Desa Jengkol, Renged, Kemuning, Kresek dan Patrasana. Sementara itu sebanyak 84 ha lahan pertanian potensial banjir pada saat musim penghujan menyebabkan kemungkinan keterlambatan tanam dan menurunkan mutu panen. Wilayah potensial banjir di Kecamatan Kresek berada di desa Renged, Ranca Ilat, Talok, Koper dan Pasir Ampo.

Di Kecamatan Jayanti terdapat 18 ha lahan pertanian rawan banjir, yakni di Desa Cikande dan Pasir Muncang dan sekitar 25 ha lahan potensial banjir pada musim penghujan yakni di Desa Pasir Muncang, Dangdeur dan Pasir Gintung. Dimusim kemarau, terdapat 33 ha lahan pertanian potensial kekeringan.

Kecamatan Balaraja merupakan wilayah yang relatif aman terhadap potensi bencana. Hanya 22 ha lahan potensial kekeringan pada musim kemarau dan 13 ha potensial banjir pada musim penghujan. Meskipun relatif sedikit namun upaya mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif bencana.

Serangan penggerek batang dan wereng dominan di area BPP Kaliasin, sehingga diperlukan optimalisasi penggunaan pestisida dan pelatihan identifikasi dini terhadap gejala serangan OPT.

Tabel 27. Potensi Bencana BPP Kaliasin

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Sukamulya	114 ha potensial kekeringan	25 ha potensial banjir	Wereng dan Penggerek batang
Kresek	93 ha potensial kekeringan	84 ha potensial banjir	Wereng
Jayanti	33 ha potensial kekeringan	18 ha rawan banjir, 25 ha potensial banjir	Wereng, Penggerek Batang
Balaraja	22 ha potensial kekeringan	13 ha potensial banjir	Wereng, Penggerek Batang, Keong Mas, Burung Pipit dan Tikus

Sumber: IPW BPP Kaliasin

BPP Sukatani

Kecamatan-kecamatan di bawah BPP Sukatani relatif aman dari permasalahan yang terkait bencana hidrometeorologi dan hama. Tidak ada kecamatan yang rawan bencana dan serangan

hama. Kecamatan Sindang Jaya dan Rajeg merupakan kecamatan yang potensial kekeringan ketika kemarau tiba, sedangkan Rajeg merupakan satu satunya kecamatan di BPP Sukatani yang potensial banjir ketika musim penghujan. PT seperti penggerek batang dan wereng tetap menjadi perhatian utama, khususnya pada areal sawah non-irigasi serta pada musim-musim transisi di Kecamatan Pasar Kemis.

Tabel 28. Potensi Bencana BPP Sukatani

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Sindang Jaya	Potensial kekeringan	Tidak	Tidak ada
Rajeg	Potensial kekeringan	Potensial banjir	Tidak ada
Pasar Kemis	Tidak	Tidak	Wereng, Penggerek batang, Kerdil Rumput

Sumber: IPW Kab Tangerang

BPP Kronjo

Kecamatan Gunung Kaler termasuk wilayah yang harus diwaspadai terkait bencana kekeringan dan banjir. Terdapat 325 ha lahan pertanian potensial kekeringan pada musim kemarau yang tersebar di semua desa di Kecamatan Gunung Kaler, sementara 15 ha rawan kekeringan di Desa Sidoko. Sementara itu terdapat 62 ha lahan pertanian potensial banjir yang tersebar di hampir seluruh desa di Kecamatan Gunung Kaler kecuali Desa Tamiang. Sekitar 15 ha lahan rawan banjir tersebar di Desa Kedung, Gunung Kaler dan Ranca Gede.

Kecamatan Kronjo juga termasuk yang perlu mendapat perhatian terkait potensi bencana kekeringan dan banjir. Sekitar 215 ha lahan pertanian di Kecamatan Kronjo yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau dan 125 ha rawan kekeringan pada musim kemarau. Desa rawan kekeringan di Kecamatan Kronjo yaitu Desa Kronjo, Muncung, Pasilian, Bakung, Blukbuk, Pagedangan udik dan Pagedangan Ilir. Sementara itu wilayah rawan banjir yakni Desa Muncung, Pasilian, Bakung, Pasir, Cirumpak, Pagedangan Udik dan Pagedangan Ilir.

Serangan penggerek batang tetap menjadi tantangan dominan bagi petani di kedua kecamatan di BPP Kronjo. Potensi serangan ulat grayak di beberapa desa di Kecamatan Kronjo seperti Desa Kronjo, Muncung dan Pasilian. Sementara Wereng Batang Coklat potensi menyerang Desa Pagenjahan, Bakung, Pasir, Cirumpak, Pagedangan Udik dan Ilir dan seluruh desa di Kecamatan Gunung Kaler. Selain itu, potensi serangan hama tikus teridentifikasi di Kecamatan Gunung Kaler. Oleh sebab itu, upaya pengendalian hayati dan pelatihan pengamatan hama secara rutin harus diperkuat.

Tabel 29. Potensi Bencana BPP Kronjo

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Gunung Kaler ^{a)}	325 ha potensial kekeringan 15 ha rawan kekeringan	62 ha potensial banjir dan 14 ha rawan banjir	Wereng, Penggerek batang dan Tikus
Kronjo ^{b)}	215 ha potensial kekeringan dan 125 rawan kekeringan	145 potensial banjir dan 80 ha rawan banjir	Penggerek batang, Wereng dan Ulat grayak

Sumber: ^{a)}IPW Kec. Gunung Kaler

^{b)}IPW Kec. Kronjo

BPP Kampung Melayu

BPP Kampung Melayu memiliki karakter wilayah yang lebih stabil, tidak menonjol kasus

kekeringan maupun banjir. Di Kecamatan Kosambi terdapat satu desa potensial banjir yakni Desa Salemban Jaya dan dua desa potensial kekeringan yakni Desa Rawa Burung dan Belimbing. Di Kecamatan Paku Haji terdapat 6 desa berpotensi kekeringan yakni desa Kramat, Kohod, Gaga, Surya Bahari, Buaran Bambu, Kiara Payung dan 5 desa potensi banjir yakni Desa Kramat, Desa Kalibaru, Desa Laksana, Desa Buaran Mangga dan Desa Buaran Bambu. Di Kecamatan Teluk Naga juga terdapat rata-rata 1-2 ha wilayah pertanian potensial banjir dan kekeringan di setiap desa.

Selain itu, kerawanan terhadap penggerek batang tetap ada seiring perubahan musim di seluruh kecamatan di bawah BPP Kampung Melayu. Sehingga perlu diwaspadai agar stabilitas produksi tetap terjaga, terutama pada komoditas padi dan sayuran. Khusus di Kecamatan Kosambi, selain penggerek batang hama wereng dan beluk juga termasuk hama utama yang potensial dan perlu dimitigasi sehingga dampak negatif terhadap penurunan produktivitas pertanian dapat diminimalkan.

Tabel 30. Potensi Bencana BPP Kampung Melayu

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Kosambi	Potensial	Potensial	Penggerek batang, Wereng, Beluk
Paku Haji	Potensial	Potensial	Penggerek batang
Teluknaga	Potensial	Potensial	Penggerek batang

Sumber: IPW Kab Tangerang

BPP Tegal Kunir

Wilayah BPP Tegal Kunir bukan merupakan daerah rawan atau potensial banjir, namun terdapat wilayah potensial kekeringan pada musim kemarau sehingga perlu perhatian terhadap sistem pengairan sehingga menghindari gagal panen. Sementara itu, hama penggerek batang masih menjadi masalah kronis di wilayah ini, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Selain itu juga teridentifikasi potensial serangan hama wereng baik di Kecamatan Mauk maupun Kecamatan Kemiri. Sehingga, mitigasi dan intervensi pengendalian diarahkan pada reformulasi dosis pestisida dan pendekatan pertanian ramah lingkungan.

Tabel 31. Potensi Bencana BPP Tegal Kunir

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Mauk	Potensial	Tidak	Penggerek batang dan wereng
Kemiri	Potensial	Tidak	Penggerek batang dan wereng

Sumber: IPW Kab Tangerang

BPP Carenang

Wilayah BPP Carenang sangat identik dengan ancaman kekeringan akibat dominasi lahan tadah hujan. Fenomena El Niño berdampak signifikan bagi keberlangsungan tanam padi, karena sumber air sangat tergantung curah hujan musiman. Ketika hujan tertunda atau volume berkurang, petani mengalami gagal panen dan pendapatan mereka menurun drastis. Di Kecamatan Cisoka hampir seluruh desa potensial kekeringan di musim kemarau kecuali Desa Karang Harja dan Cibugel. Sementara, hanya satu desa yang potensial banjir di Kecamatan Jambe yaitu Desa Karang Harja dan satu desa rawan banjir yaitu Desa Bojongloa.

Di Kecamatan Jambe, desa desa yang memiliki lahan pertanian potensial kekeringan yakni Desa Jambe, Tipar Jaya, Daru, Taban, Mekar Sari dan Kutruk sedangkan desa desa yang potensial dan rawan banjir yakni desa Rancabuaya dan Sukamanah serta Desa Pasir Barat dan Ancol Pasir. Kecamatan solear tidak memiliki lahan pertanian yang rawan atau potensial banjir namun memiliki lahan pertanian yang rawan kekeringan. Sementara itu, Kecamatan Tigaraksa

memiliki lahan pertanian yang potensial kekeringan dan banjir.

Terdapat beragam hama yang berpotensi menyerang pertanaman di Kecamatan Cisoka. Wereng batang coklat berpotensi menyerang pertanaman di Desa Cisoka, Karang Harja dan Bojongloa. Penggerek batang padi merupakan hama utama di Desa Sukatani, Carenang dan Cibugel. Sundep potensial menyerang tanaman di Desa Jeungjingdan Cempaka sedangkan Tungro dan Tikus merupakan hama potensial di Desa Slapajang dan Caringin. Sementara itu, Hama utama di Kecamatan Jambe yakni hama wereng dan hawar daun. Sedangkan di Kecamatan Solear dan Tigaraksa potensial serangan hama wereng, penggerek batang dan hawar daun.

Tabel 32. Potensi Bencana BPP Carenang

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Cisoka ^{a)}	Potensial	Potensial	Wereng, Penggerek, Tikus, Sundep, Tungro
Jambe ^{b)}	Potensial	Potensial	Wereng, Hawar Daun
Solear ^{b)}	Rawan kekeringan	Tidak	Wereng, Penggerek batang, Hawar Daun
Tigaraksa ^{b)}	Potensial	Potensial	Wereng, Penggerek batang, Hawar Daun

Sumber: ^{a)}IPW Kec. Cisoka

^{b)} IPW Kab, Tangerang

BPP Caringin

Tidak teridentifikasi lahan pertanian rawan dan potensial banjir di wilayah BPP Caringin. Terutama Curug dan Kelapa Dua merupakan wilayah yang aman dari potensi banjir maupun kekeringan. Wilayah kecamatan lain yakni Legok, Pagedangan, Kemuning dan Cisauk menunjukkan adanya potensi kekeringan pada saat musim kemarau. Sehingga perlu intervensi irigasi untuk mengurangi dampak negatif kekeringan terhadap produksi pertanian di wilayah yang berpotensi terdampak. Hama utama berupa wereng, penggerek batang, tikus, hawar daun dan burung pipit menyebabkan penurunan produksi padi di kecamatan-kecamatan BPP Caringin. Diperlukan pengendalian hama terpadu untuk membasmi hama target utama.

Tabel 33. Potensi Bencana BPP Caringin

Kecamatan	Kekeringan	Banjir	Hama Utama
Curug	Tidak	Tidak	-
Kelapa Dua	Tidak	Tidak	-
Legok	Potensial	Tidak	Wereng, Tikus, Hawar Daun
Pagedangan	Potensial	Tidak	Hawar daun
Kemuning	Potensial	Tidak	Wereng, penggerek batang, tikus
Cisauk	Potensial	Tidak	Burung pipit, tikus

Sumber: IPW Kab. Tangerang

3.5.2. AGREGAT KABUPATEN TANGERANG

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari IPW Kecamatan dan BPP di Kabupaten Tangerang, dapat diidentifikasi bahwa risiko hidrometeorologi paling menonjol terkonsentrasi pada BPP Kronjo, BPP Kaliasin, BPP Carenang, dan sebagian BPP Kampung Melayu. BPP Kronjo memiliki tingkat eksposur tertinggi karena Kecamatan Gunung Kaler dan Kronjo sama-sama menghadapi kombinasi kekeringan dan banjir dalam luasan signifikan. Total indikatif potensi kekeringan di BPP Kronjo mencapai sekitar 540 ha, ditambah area rawan kekeringan sekitar 140 ha; sementara potensi banjir mencapai lebih dari 200 ha dengan tambahan area rawan banjir sekitar 90 ha. BPP Kaliasin

juga memperlihatkan risiko tinggi, terutama di Kecamatan Sukamulya, Kresek, Jayanti, dan Balaraja, dengan total potensi kekeringan sekitar 262 ha dan potensi/kerawanan banjir sekitar 165 ha. Pada BPP Carenang, pola ancaman lebih kompleks karena kekeringan tersebar luas di Cisoka, Jambe, Solear, dan Tigaraksa, sedangkan banjir muncul secara selektif di Cisoka, Jambe, dan Tigaraksa. BPP Kampung Melayu menunjukkan potensi kekeringan dan banjir pada seluruh kecamatan binaan, yaitu Kosambi, Pakuhaji, dan Teluknaga, meskipun sebagian besar dinyatakan dalam bentuk kategori potensial, bukan luasan hektare yang terukur.

Pada kelompok risiko menengah hingga rendah, BPP Sepatan, Sukatani, Tegal Kunir, dan Caringin memperlihatkan pola ancaman yang lebih terbatas secara spasial. BPP Sepatan relatif tidak tercatat sebagai wilayah rentan banjir, dengan potensi kekeringan terbatas pada Desa Mekar Jaya di Kecamatan Sepatan serta Desa Gempol Sari dan Jati Mulya di Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Sukadiri tidak menunjukkan risiko kekeringan maupun banjir. BPP Sukatani secara umum juga relatif aman, meskipun Sindang Jaya dan Rajeg memiliki potensi kekeringan, serta Rajeg menjadi satu-satunya kecamatan yang juga memiliki potensi banjir. BPP Tegal Kunir tidak dikategorikan sebagai wilayah potensial banjir, tetapi Kecamatan Mauk dan Kemiri tetap memiliki potensi kekeringan pada musim kemarau. Sementara itu, BPP Caringin menunjukkan karakter yang relatif terkendali terhadap banjir karena tidak teridentifikasi lahan pertanian rawan maupun potensial banjir; risiko utama hanya berupa potensi kekeringan di Legok, Pagedangan, Kemuning, dan Cisauk, sedangkan Curug dan Kelapa Dua relatif aman dari kekeringan maupun banjir.

Dari sisi organisme pengganggu tanaman, hampir seluruh BPP menghadapi tekanan hama yang berulang, terutama penggerek batang dan wereng, sehingga risiko bencana pertanian tidak hanya bersumber dari kekeringan dan banjir, tetapi juga dari gangguan biotik yang dapat menurunkan produktivitas. Penggerek batang muncul sebagai hama utama di BPP Sepatan, Kampung Melayu, Tegal Kunir, Kronjo, Carenang, Kaliasin, Sukatani, dan Caringin; sedangkan wereng tercatat dominan di BPP Kaliasin, Sukatani, Kronjo, Tegal Kunir, Carenang, Caringin, serta sebagian Kampung Melayu. Beberapa BPP memiliki diversifikasi hama yang lebih tinggi, seperti BPP Carenang dengan wereng, penggerek, tikus, sundep, tungro, dan hawar daun; BPP Kronjo dengan penggerek batang, wereng, ulat grayak, dan tikus; serta BPP Caringin dengan wereng, penggerek batang, tikus, hawar daun, dan burung pipit. Dengan demikian, prioritas mitigasi perlu diarahkan secara berbeda antar-BPP: penguatan irigasi dan tata kelola air untuk Kronjo, Kaliasin, Carenang, dan Kampung Melayu; pemantauan kekeringan musiman untuk Tegal Kunir, Sepatan, Sukatani, dan Caringin; serta penerapan pengendalian hama terpadu lintas BPP untuk mengurangi risiko kehilangan hasil pada komoditas padi dan tanaman pangan lainnya.

3.6. REKOMENDASI PENANGANAN

BPP Sepatan

Tanaman Pangan

Pada subsektor tanaman pangan, permasalahan pengendalian OPT, pemupukan berimbang, dan penggunaan benih berlabel teridentifikasi sebagai masalah prioritas di wilayah yang terjadi pada sebagian besar usahatani padi sawah irigasi teknis. Petani belum menerapkan pengairan berselang karena distribusi air tidak merata, sehingga integrasi antara teknologi irigasi, pemupukan, dan pengendalian OPT menjadi kebutuhan kunci.

Hortikultura

Budidaya sayuran di pekarangan dan lahan sawah setelah padi menghadapi masalah umum yang sama: pemupukan tidak berimbang, pengendalian OPT tidak terpadu, perempelan cabe jarang dan sortasi hasil belum baku. Hal ini menurunkan efisiensi biaya dan harga jual produk hortikultura.

Ternak

Tata letak kandang kambing, ayam, dan itik belum sesuai anjuran, dengan sanitasi yang rendah dan manajemen pakan yang tidak mengikuti standar kebutuhan nutrisi ternak. Pengetahuan peternak tentang pengendalian penyakit dan vaksinasi rendah, sementara tata laksana pemeliharaan belum seragam dan terdokumentasi.

Umum

Secara umum, permodalan kelompok tani belum kuat, pemasaran hasil belum dilakukan secara kolektif, dan partisipasi anggota kelompok dalam kegiatan masih rendah. Kondisi ini menghambat kemampuan kelompok untuk memanfaatkan skala ekonomi, baik dalam pembelian sarana produksi maupun pemasaran hasil.

Tabel 34. Matriks Prioritas Masalah BPP Sepatan (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT & pemupukan tidak berimbang	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Benih berlabel belum umum	3	3	4	10	3
Tanaman Pangan	Pengelolaan air & irigasi tidak merata	3	4	3	10	3
Hortikultura	Pengendalian OPT & pemupukan sayur	3	3	4	10	3
Hortikultura	Perempelan cabe & sortasi	3	3	3	9	4
Ternak	Sanitasi kandang & manajemen pakan	4	4	4	12	2
Ternak	Pengetahuan penyakit & vaksinasi	4	4	4	12	2
Umum	Permodalan & pemasaran kolektif	3	4	4	11	3
Umum	Partisipasi anggota rendah	3	3	3	9	4

Wilayah Sepatan dan sekitarnya didominasi sawah irigasi teknis, dengan prioritas masalah pada OPT, pemupukan, dan kesehatan ternak.

Pengendalian OPT & pemupukan tidak berimbang (padi) – Prioritas 1

Masalah ini sangat gawat karena mengurangi produktivitas padi, sementara sebagian besar petani menggantungkan pendapatannya pada musim padi. Mendesak karena pola serangan OPT mengikuti pola tanam yang intensif. Penyebarannya luas di seluruh desa. SL-PHT padi, kalibrasi dosis pupuk, dan praktek pemupukan sesuai fase pertumbuhan menjadi inti kegiatan penyuluhan.

Sanitasi kandang & penyakit ternak – Prioritas 2

Di daerah padat penduduk, sanitasi kandang buruk dan minimnya vaksinasi dapat memicu wabah penyakit yang merugikan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Masalah ini cukup gawat dan menyebar, sehingga penyuluhan tentang biosecurity, vaksinasi massal, dan penataan kandang perlu dimasukkan ke RKTP tiap tahun.

Benih berlabel, pengelolaan air, dan OPT hortikultura – Prioritas 3

Benih berlabel dan pengelolaan air irigasi berkaitan dengan stabilitas hasil jangka panjang, namun sering dianggap masalah menengah oleh petani. Pengendalian OPT horti berada di prioritas yang sama karena skala usaha horti biasanya lebih kecil, meski intensif. Kegiatan bisa

berupa demplot varietas unggul dan pengaturan rotasi tanaman plus manajemen irigasi di tingkat jaringan tersier.

Permodalan dan pemasaran kolektif – Prioritas 3–4

Kelembagaan ekonomi lemah membuat petani sulit bernegosiasi harga dan mengakses kredit. Meski tidak langsung “membunuh tanaman”, masalah ini gawat untuk kesinambungan usaha dan perlu dimasukkan dalam program penguatan kelembagaan dan bisnis kelompok.

BPP Kaliasin

Tanaman Pangan

Pada BPP Kaliasin, misalnya di Kecamatan Balaraja keberadaan lahan lahan sawah sekitar 1.077 ha dengan produktivitas padi sawah sekitar 48,6 kw/ha, namun tingkat penerapan teknologi benih berlabel, pemupukan berimbang, dan pengendalian OPT masing-masing masih sekitar 30–40%. Hal ini sejalan dengan masalah benih non-label, dosis pupuk tidak tepat, dan pengendalian OPT rendah, sehingga peningkatan adopsi teknologi dasar budidaya padi menjadi fokus utama untuk mendongkrak produktivitas.

Hortikultura

Produktivitas sayuran seperti mentimun di Balaraja mencapai 140 kw/ha, menunjukkan potensi tinggi, tetapi penerapan teknologi pemupukan dan pengendalian OPT baru di kisaran 55–65%, sehingga masih ada gap antara potensi hasil dan realisasi di lapang. Perempelan tunas air cabe, penataan ajir, dan sortasi hasil di tingkat petani belum optimal meskipun pasar sayuran di kawasan industri dan kota terdekat cukup besar.

Ternak

Di wilayah Sukamulya, terdapat populasi sapi, kambing, dan unggas yang cukup besar, dan analisis prioritas masalah ternak sapi menempatkan manajemen kesehatan ternak, vaksinasi, dan sistem perkandangan sebagai masalah dengan skor G–M–P tinggi. Hal ini menguatkan narasi bahwa keterbatasan pakan hijauan, sanitasi kandang, dan pengetahuan IB merupakan isu kunci yang perlu dijawab melalui sekolah lapang atau demplot manajemen ternak terpadu.

Umum

Meskipun pertanian masih dominan di wilayah BPP Kaliasin, tekanan alih fungsi lahan mulai dirasakan di Balaraja dan sekitarnya, sementara akses pupuk subsidi dan modal kerja kelompok belum merata di seluruh desa. Kelembagaan petani di Sukamulya cukup banyak dan beragam, namun kemampuan kelembagaan dalam mengelola permodalan dan sarana produksi perlu diperkuat agar dapat menjadi instrumen mengatasi keterbatasan modal dan input.

Tabel 35. Matriks Prioritas Masalah BPP Kaliasin (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT rendah	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Jajar legowo belum diterapkan luas	4	4	4	12	2

Tanaman Pangan	Benih non-label	3	3	4	10	3
Tanaman Pangan	Pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3
Hortikultura	Pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3
Hortikultura	Pengendalian OPT tidak terpadu	4	4	4	12	2
Ternak	Manajemen kesehatan & sanitasi kandang	4	4	4	12	2
Ternak	Pakan hijauan terbatas	4	4	4	12	2
Ternak	Pengetahuan IB rendah	3	3	3	9	4
Umum	Alih fungsi lahan	3	3	3	9	4
Umum	Pupuk subsidi & modal terbatas	3	4	4	11	3

Prioritas masalah dominan BPP Kaliasin (Balaraja, Jayanti, Kresek, Sukamulya) pada aspek teknis budidaya, yakni:

Pengendalian OPT padi dan horti – Prioritas 1–2

Analisis tingkat penerapan teknologi menunjukkan pengamatan dan pengendalian OPT masih di sekitar 40%, sehingga risiko ledakan hama penyakit cukup tinggi. Masalah ini sangat gawat karena menurunkan produksi seperti padi, kacang panjang, mentimun,, dan mendesak karena satu musim tanam yang gagal akan langsung memukul pendapatan petani. Program SL-PHT dan klinik tanaman menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas petani dan transfer teknologi.

Jajar legowo belum luas (padi) – Prioritas 2

Dengan produktivitas padi sekitar 48,6 kw/ha, masih ada ruang peningkatan lewat penerapan jajar legowo, yang dinilai cukup gawat karena berkontribusi pada efisiensi pupuk dan pengendalian gulma. Penyebaran masalah cukup tinggi (banyak petani belum mengadopsi), sehingga demplot dan magang petani menjadi aktivitas penting.

Benih non-label dan pemupukan tidak berimbang – Prioritas 3

Walaupun sangat mempengaruhi potensi hasil, masalah ini sering kali dianggap kurang mendesak oleh petani karena dampaknya tidak secepat serangan hama. Tugas penyuluh adalah mengaitkan benih unggul dan pemupukan berimbang dengan data produktivitas riil di lapang sehingga petani melihat manfaat ekonominya.

Manajemen kesehatan ternak dan pakan hijauan – Prioritas 2

Di Sukamulya dan kecamatan lain, ternak sapi, kambing, dan unggas cukup banyak sehingga penyakit dan kekurangan pakan dapat mengganggu ekonomi rumah tangga. Masalah ini gawat dan cukup menyebar, sehingga program vaksinasi massal, pelatihan pembuatan silase, dan kebun hijauan menjadi prioritas.

Alih fungsi lahan, pupuk subsidi, dan modal – Prioritas 2–3

Walaupun belum sekuat di wilayah peri-urban, tekanan alih fungsi dan keterbatasan pupuk dan modal mulai dirasakan. Kegiatan diarahkan pada penguatan kelembagaan (gapoktan, koperasi) dan advokasi kebutuhan pupuk serta kredit KUR tani.

BPP Sukatani

Tanaman Pangan

Di wilayah urban-periurban ini, sawah tersisa mulai terdesak oleh perumahan dan kawasan industri, sehingga petani menghadapi masalah benih non-label, pemupukan tidak tepat, dan pengendalian OPT padi yang kurang intensif. Penerapan jajar legowo menjadi peluang besar untuk mendapatkan produktivitas lebih tinggi di lahan yang semakin terbatas.

Hortikultura

Cabe dan sayuran pekarangan banyak diusahakan, namun pengendalian OPT masih sporadis, pemupukan tidak berimbang, dan perempelan tunas air masih dianggap pekerjaan tambahan sehingga sering diabaikan. Sortasi hasil lemah menyebabkan produk hanya masuk pasar lokal dengan harga yang kurang menguntungkan.

Ternak

Keterbatasan lahan untuk hijauan pakan di tengah kepadatan permukiman membuat peternak bergantung pada pakan konsentrat dan limbah pertanian. Sanitasi kandang yang dekat dengan rumah penduduk meningkatkan risiko gangguan lingkungan dan penyakit, sementara pengetahuan tentang IB dan manajemen reproduksi masih terbatas.

Umum

Alih fungsi lahan di Rajeg dan Pasar Kemis cukup tinggi, pupuk subsidi sulit diakses secara merata, dan akses modal formal bagi petani kecil dan peternak rakyat masih lemah karena keterbatasan kelembagaan ekonomi.

Tabel 36. Matriks Prioritas Masalah BPP Sukatani (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT & jajar legowo	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Benih non-label & pupuk tidak tepat	3	3	4	10	3
Hortikultura	OPT & pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3
Hortikultura	Perempelan & sortasi hasil	3	3	3	9	4
Ternak	Hijauan & sanitasi kandang	4	4	4	12	2
Ternak	Pengetahuan IB	3	3	3	9	4
Umum	Alih fungsi lahan	4	4	4	12	2
Umum	Pupuk subsidi & modal terbatas	3	4	4	11	3

Di Sindang Jaya, Rajeg, dan Pasar Kemis, tekanan urbanisasi cukup tinggi sehingga prioritas bergeser antara teknis budidaya dan isu struktural.

Pengendalian OPT & jajar legowo (padi) – Prioritas 1

Masalah ini sangat gawat dan mendesak karena lahan yang tersisa harus dimaksimalkan produktivitasnya. Penyebarannya luas di kelompok tani yang masih menanam padi. Suluh lapang yang mengkombinasi jajar legowo, pemupukan tepat, dan PHT menjadi paket utama.

Hijauan pakan & sanitasi kandang – Prioritas 2

Di wilayah padat, keterbatasan hijauan dan sanitasi kandang buruk dapat menurunkan produktivitas ternak serta memunculkan konflik dengan tetangga. Masalah ini cukup menyebar

dan berdampak nyata pada pendapatan rumah tangga. Program prioritas: integrasi ternak dengan lahan pekarangan (vertikultur hijauan), manajemen limbah, dan pengaturan kepadatan ternak di lingkungan padat.

Alih fungsi lahan dan akses pupuk–modal – Prioritas 2–3

Alih fungsi di Rajeg dan Pasar Kemis cukup cepat sehingga perlu respon kebijakan dan strategi diversifikasi usaha tani (horti pekarangan, ternak, usaha nonlahan). Pupuk dan modal terbatas menghambat adopsi teknologi, sehingga penguatan kelompok sebagai pintu akses KUR dan pupuk harus masuk dalam Program.

Benih non-label, pemupukan, OPT horti, dan IB – Prioritas 3–4

Masalah teknis ini tetap penting, namun dalam konteks wilayah yang lahannya makin sempit, prioritas nomor satu adalah menjaga produktivitas lahan yang tersisa dan memastikan keberlanjutan usaha melalui kelembagaan dan diversifikasi.

BPP Kronjo

Tanaman Pangan

Terdapat permasalahan yang cukup tinggi pada pengairan, penerapan jajar legowo, dan pengendalian OPT di wilayah ini, meskipun padi sawah masih menjadi komoditas utama. Petani belum terbiasa mengatur air secara berselang (intermittent irrigation) dan belum menerapkan jajar legowo secara konsisten, sehingga efisiensi air dan peningkatan produktivitas yang mungkin dicapai belum terwujud.

Hortikultura

Komoditas hortikultura seperti semangka dan timun suri sering hanya dijadikan tanaman selingan, dengan pengendalian OPT dan pemupukan yang belum intensif. Sortasi hasil lemah, sehingga harga sangat ditentukan oleh tengkulak dan posisi tawar petani rendah.

Ternak

Peternak di wilayah ini mengandalkan hijauan musiman di tegalan dan pinggir saluran, sehingga pada musim kemarau ketersediaan pakan menjadi masalah serius. Sanitasi kandang dan pengetahuan kesehatan ternak, termasuk vaksinasi dan IB, masih terbatas.

Umum

Harga sayur dan hortikultura sangat tergantung tengkulak karena belum berkembang kelembagaan pemasaran yang kuat. Akses kredit perbankan, seperti dari Bank BJB yang hadir di beberapa kecamatan, belum dimanfaatkan luas oleh petani

Tabel 37. Matriks Prioritas Masalah BPP Kronjo (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT & PHT belum berjalan	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Jajar legowo & pengairan berselang	4	4	4	12	2
Tanaman Pangan	Benih & pupuk tidak sesuai anjuran	3	3	4	10	3
Hortikultura	OPT dan pemupukan horti belum intensif	3	3	4	10	3
Hortikultura	Sortasi rendah	3	3	3	9	4
Ternak	Hijauan terbatas & sanitasi kandang	4	4	4	12	2

Ternak	Pengetahuan kesehatan & IB	3	3	3	9	4
Umum	Ketergantungan pada tengkulak	4	4	4	12	2
Umum	Akses kredit dan pupuk subsidi terbatas	3	4	4	11	3

Di Kronjo dan Gunung Kaler, prioritas masalah padi sawah dan hortikultura sangat jelas tergambar dari analisis GMP.

Pengendalian OPT padi (PHT belum berjalan) – Prioritas 1

Masalah ini sangat gawat karena secara langsung menurunkan hasil dan sering menimbulkan kegagalan panen. Mendesak karena setiap musim tanam selalu muncul OPT utama seperti penggerek, wereng, dan penyakit. Penyebaran luas hampir di semua desa. Kegiatan PHT lapang (identifikasi musuh alami, ambang kendali) menjadi prioritas nomor satu.

Jajar legowo & pengairan berselang – Prioritas 2

Petani belum memahami manfaat teknis dan ekonomis sistem pengairan berselang dan jajar legowo, sehingga IP (indeks pertanaman) dan produktivitas belum optimal. Masalah ini cukup gawat dan menyebar, namun biasanya dianggap “teknis” oleh petani sehingga butuh pendekatan praktik langsung dan perhitungan keuntungan dalam penyuluhan.

Benih & pemupukan tidak sesuai anjuran – Prioritas 3

Dampaknya besar pada jangka menengah, tetapi dalam persepsi petani sering kalah mendesak dibanding hama penyakit. Perbandingan hasil antara petani yang pakai Varietas Unggul Baru dan pupuk berimbang dengan yang masih tradisional diperlukan untuk mendorong adopsi.

Hijauan, sanitasi kandang, dan harga sayur ditentukan tengkulak – Prioritas 2

Pada ternak, pangan dan sanitasi menyentuh keberlangsungan usaha; pada hortikultura, ketergantungan ke tengkulak menurunkan margin petani. Keduanya bersifat gawat dan cukup menyebar. Program perlu memuat pembentukan unit pemasaran bersama, pelatihan negosiasi harga, serta integrasi ternak–tanaman untuk efisiensi pakan dan pupuk kandang.

Akses kredit & pupuk subsidi – Prioritas 3

Meski penting, masalah ini biasanya ditangani melalui penguatan administrasi kelompok dan koordinasi lintas dinas. Penyuluh berperan penting dalam mengorganisir kelompok untuk memenuhi syarat akses KUR dan mengawal RDKK.

BPP Kampung Melayu Tanaman Pangan

Lahan sawah di Kosambi relatif terbatas (misalnya 18 ha di Salemban Jaya dan 15 ha di Belimbing), tetapi tetap menjadi sumber pangan utama bagi rumah tangga petani. Masalah benih non-label dan pemupukan tidak tepat dikombinasikan dengan risiko banjir dan intrusi air laut, sehingga pengendalian OPT dan penerapan jajar legowo di lahan rawan banjir menjadi krusial untuk menjaga produktivitas padi.

Hortikultura

Hortikultura di pesisir berkembang di lahan dataran rendah dan pekarangan, dengan tekanan OPT yang kuat karena kelembapan tinggi dan kedekatan dengan kawasan permukiman padat. Petani belum banyak menerapkan pemupukan berimbang, perempelan cabe, maupun sortasi sesuai standar pasar kota, sehingga banyak hasil yang hanya bisa masuk pasar tradisional dengan harga lebih rendah.

Ternak

Di wilayah ini ternak unggas (ayam dan itik) cukup banyak, namun ketersediaan hijauan untuk ruminansia terbatas karena kompetisi dengan sawah, tambak, dan permukiman. Kandang sering berada di dekat permukiman, dengan sanitasi yang kurang, sehingga risiko penyakit zoonotik dan gangguan bau cukup besar, sementara pengetahuan tentang IB dan kesehatan ternak masih terbatas.

Umum

Data potensi bencana menunjukkan adanya ancaman banjir dan potensi kekeringan di beberapa desa, serta potensi hama penyakit padi (wereng, penggerek batang, blas) yang berkaitan dengan kondisi lahan pesisir yang rentan. Alih fungsi lahan ke tambak, kawasan pergudangan, dan perumahan turut mengurangi luas lahan pertanian, sedangkan distribusi pupuk subsidi dan akses permodalan bagi petani kecil masih menjadi tantangan.

Tabel 38. Matriks Prioritas Masalah BPP Kampung Melayu (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT di lahan rawan banjir rendah	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Jajar legowo belum optimal	4	4	4	12	2
Tanaman Pangan	Benih non-label & pupuk tidak tepat	3	3	4	10	3
Hortikultura	OPT tinggi pada sayuran	4	4	4	12	2
Hortikultura	Pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3
Hortikultura	Perempelan cabe & sortasi lemah	3	3	3	9	4
Ternak	Hijauan terbatas & sanitasi kandang rendah	4	4	4	12	2
Ternak	Pengetahuan IB & kesehatan ternak minim	3	3	3	9	4
Umum	Alih fungsi lahan & pupuk subsidi terbatas	4	4	4	12	2
Umum	Modal petani kecil	3	4	4	11	3

Pengendalian OPT padi di lahan rawan banjir – Prioritas 1

Masalah ini sangat gawat karena kombinasi cekaman banjir dan OPT menyebabkan kerusakan tanaman dalam waktu singkat. Mendesak karena perbaikan sulit dilakukan bila serangan terjadi bersamaan dengan puncak banjir. Penyebarannya luas di sawah pesisir. Diperlukan adopsi varietas toleran, jadwal tanam disesuaikan iklim, dan pengendalian OPT berbasis kalender tanam dan prakiraan cuaca.

Jajar legowo di lahan banjir dan OPT hortikultura – Prioritas 2

Jajar legowo membantu aerasi dan pemanfaatan cahaya di lahan lembab, sehingga berpengaruh pada kesehatan tanaman. Pengendalian OPT hortikultura juga gawat karena menjadi sumber pendapatan harian. Demplot jajar legowo, pemasangan trap, penggunaan mulsa, dan rotasi tanaman menjadi materi utama penyuluhan.

Hijauan pakan & sanitasi kandang – Prioritas 2

Di lahan yang didominasi tambak dan sawah, hijauan pakan sulit dipenuhi, menurunkan bobot badan dan meningkatkan kerentanan ternak terhadap penyakit. Kandang dekat pemukiman dengan sanitasi buruk berisiko menimbulkan konflik sosial. Prioritas kegiatan: kebun pakan bersama, pelatihan manajemen limbah, dan pengaturan jarak kandang dari rumah.

Alih fungsi lahan dan modal – Prioritas 2–3

Alih fungsi lahan ke tambak dan pergudangan sangat nyata, sehingga perlu strategi diversifikasi (ikan, hortikultura pekarangan, ternak kecil) dan penguatan akses modal agar petani dapat beralih usaha dengan tetap di sektor pertanian/perikanan.

BPP Tegal Kunir

Tanaman Pangan

Penggunaan benih non-label dan pemupukan yang tidak seimbang semakin meningkatkan kerentanan tanaman padi terhadap stres abiotik. Penerapan jajar legowo di lahan pertanian masih terbatas, padahal teknologi tersebut dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan air dan cahaya.

Hortikultura

Sayuran dan cabe di wilayah ini banyak diusahakan pada lahan dataran rendah dan dekat tambak, sehingga tekanan OPT tinggi dan penyakit mudah berkembang. Pemupukan berimbang, perempelan cabe, dan sortasi hasil belum konsisten, padahal kebutuhan pasar dan kota cukup besar.

Ternak

Ketersediaan hijauan terbatas karena banyak lahan dimanfaatkan untuk penggunaan lain, sehingga peternak sulit menyediakan pakan hijauan berkualitas sepanjang tahun. Sanitasi kandang dan pengetahuan tentang IB serta kesehatan ternak juga menjadi kelemahan yang mengurangi produktivitas usaha ternak.

Umum

Alih fungsi menekan luas lahan pertanian, sementara pupuk subsidi terbatas dan modal petani serta peternak relatif kecil. Hal ini membuat kemampuan petani untuk berinvestasi dalam teknologi budidaya dan sarana produksi modern menjadi rendah

Tabel 39. Matriks Prioritas Masalah BPP Tegal Kunir (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT & jajar legowo di lahan banjir	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Benih non-label & pupuk tidak seimbang	3	3	4	10	3

Hortikultura	OPT tinggi & pemupukan tidak berimbang	4	4	4	12	2
Hortikultura	Perempelan cabe & sortasi belum konsisten	3	3	3	9	4
Ternak	Pakan hijauan terbatas	4	4	4	12	2
Ternak	Sanitasi kandang & pengetahuan IB	3	3	3	9	4
Umum	Alih fungsi lahan & pupuk subsidi terbatas	4	4	4	12	2
Umum	Modal petani & peternak kecil	3	4	4	11	3

Pengendalian OPT & jajar legowo– Prioritas 1

Masalah ini sangat gawat karena potensi gagal panen tinggi bila OPT dan potensi bencana hidrometeorologi terjadi bersamaan. Mendesak karena jadwal tanam harus sinkron dengan puncak cuaca yang ekstrim. Penyuluhan fokus pada penyesuaian kalender tanam, varietas toleran, jajar legowo, dan pengendalian OPT yang menyesuaikan kondisi lokasi pertanian.

OPT hortikultura & pemupukan tidak berimbang – Prioritas 2

Hortikultura berpotensi menghadapi serangan penyakit, sehingga pengendalian OPT dan pemupukan berimbang dinilai cukup gawat dan menyebar. Program SL hortikultura, penggunaan mulsa, dan pemupukan berimbang menjadi prioritas menengah.

Hijauan pakan dan sanitasi kandang – Prioritas 2

Dengan banyaknya tambak dan sawah, ruang untuk hijauan terbatas sehingga ternak sering kekurangan pakan berkualitas. Sanitasi kandang juga menjadi isu utama karena kelembapan tinggi dan kedekatan dengan saluran air. Kebun hijauan di tepian saluran, pemanfaatan limbah tanaman, dan desain kandang kering menjadi fokus intervensi.

Alih fungsi lahan, pupuk, dan modal – Prioritas 2–3

Alih fungsi ke tambak dan perumahan mengurangi lahan pertanian, sementara pupuk subsidi dan modal usaha terbatas menyulitkan intensifikasi. Program perlu mengarahkan petani pada strategi usaha campuran (padi–ikan–horti–ternak) dengan dukungan akses modal yang lebih baik melalui koperasi/gapoktan.

BPP Carenang

Tanaman Pangan

Di BPP Carenang, budidaya padi sawah masih menghadapi persoalan benih dan teknologi budidaya, di mana petani banyak menggunakan benih turunan dengan vigor rendah dan belum terbiasa mengadopsi varietas unggul berlabel. Pemupukan dilakukan tanpa dasar rekomendasi spesifik lokasi, sehingga unsur hara tidak seimbang dan tanaman menjadi kurang responsif, sementara pengendalian OPT lebih banyak dilakukan saat serangan sudah tinggi dan tanpa pengamatan rutin sehingga potensi kehilangan hasil cukup besar. Penerapan sistem tanam jajar legowo baru dilakukan sebagian kelompok; padahal analisis GMP di wilayah lain yang serupa menunjukkan jajar legowo termasuk masalah dengan skor tinggi, sehingga di Carenang dapat diproyeksikan sebagai prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi input.

Hortikultura

Komoditas sayuran dan cabe di wilayah ini menghadapi tekanan OPT yang cukup tinggi, tetapi petani belum menerapkan pengendalian terpadu dan masih bergantung pada pestisida kimia yang digunakan tanpa membaca label dan dosis anjuran. Pemupukan cabe dan sayuran sering tidak terjadwal dan tidak dibedakan antara fase vegetatif dan generatif, sehingga tanaman

tidak seimbang pertumbuhannya; perempelan tunas air jarang dilakukan sehingga tajuk tanaman menutup dan memicu mikroklima lembab yang mendukung penyakit. Sortasi hasil pascapanen belum menerapkan standar ukuran dan tingkat kemasakan, menyebabkan harga jual rendah karena pedagang harus melakukan sortasi ulang di tingkat tengkulak.

Ternak

Keterbatasan hijauan pakan terutama muncul pada musim kemarau, karena peternak belum membudidayakan hijauan secara khusus dan hanya mengandalkan tegalan serta pinggir saluran irigasi. Sanitasi kandang masih sederhana, dengan lantai tanah atau semen tanpa kemiringan cukup sehingga kotoran menumpuk dan menimbulkan bau, lalat, serta potensi penyakit. Pengetahuan peternak tentang IB masih minim, sehingga kawin alami mendominasi dan interval beranak menjadi panjang, menurunkan efisiensi usaha ternak.

Umum

Alih fungsi lahan ke perumahan dan industri di wilayah dekat Tigaraksa dan Solear menyebabkan sawah semakin menyempit dan memaksa petani menggeser usaha ke hortikultura pekarangan, ternak, atau kerja non-pertanian. Distribusi pupuk bersubsidi sering tidak tepat waktu, dan petani dengan kepemilikan lahan kecil kesulitan mengakses kredit formal karena administrasi dan agunan lemah.

Tabel 40. Matriks Prioritas Masalah BPP Carenang (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT rendah	4	5	5	14	1
Tanaman Pangan	Sistem tanam jajar legowo belum optimal	4	4	4	12	2
Tanaman Pangan	Penggunaan benih non-label	3	3	4	10	3
Tanaman Pangan	Dosis pupuk tidak tepat	3	3	4	10	3
Hortikultura	Pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3
Hortikultura	Pengendalian OPT tidak terpadu	4	4	4	12	2
Hortikultura	Perempelan tunas air belum rutin	3	3	3	9	4
Hortikultura	Sortasi hasil lemah	3	3	3	9	4
Ternak	Pakan hijauan terbatas	4	4	4	12	2
Ternak	Sanitasi kandang rendah	4	4	4	12	2
Ternak	Pengetahuan IB minim	3	3	3	9	4
Umum	Alih fungsi lahan	4	4	4	12	2
Umum	Ketersediaan pupuk bersubsidi terbatas	3	4	4	11	3
Umum	Modal petani terbatas	3	4	4	11	3

Masalah dengan skor tertinggi di BPP Carenang adalah pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura, keterbatasan pakan hijauan serta sanitasi kandang, dan alih fungsi lahan.

Pengendalian OPT rendah (pangan dan horti) – Prioritas 1–2

Masalah ini dikategorikan sangat gawat karena serangan hama dan penyakit langsung menurunkan hasil padi dan sayuran, sehingga pendapatan petani turun signifikan. Secara mendesak, masalah ini tidak dapat ditunda karena siklus hidup OPT pendek; bila tidak ditangani segera, serangan dapat meluas dan biaya pengendalian meningkat. Penyebaran tinggi karena hampir semua kelompok tani di Cisoka, Solear, Tigaraksa, dan Jambe menghadapi OPT yang sama, sehingga materi PHT, pengamatan rutin, dan penggunaan pestisida bijak harus menjadi program utama.

Sistem tanam jajar legowo belum optimal (pangan) – Prioritas 2

Jajar legowo dinilai cukup gawat dan menyebar karena berhubungan dengan kemampuan meningkatkan produktivitas padi di lahan yang tetap. Meski tidak se-mendesak serangan OPT, adopsi teknologi ini penting untuk jangka menengah sebagai strategi peningkatan hasil tanpa menambah luas tanam. Penyuluhan demoplot jajar legowo per desa dan pelatihan praktis menjadi kegiatan prioritas dalam RKTP, dipadukan dengan materi pemupukan dan pengairan.

Benih non-label dan pemupukan tidak tepat (pangan & horti) – Prioritas 3

Kedua masalah ini gawat karena menentukan dasar produktivitas dan efisiensi biaya, namun dinilai sedikit lebih rendah mendesaknya dibanding serangan OPT. Penyebarannya luas karena hampir semua petani menggunakan benih simpanan dan pemupukan “kira-kira”. Kegiatan program dapat berupa fasilitasi akses benih bersertifikat melalui kios saprodi dan BUMDes, serta sekolah lapang pemupukan berimbang berbasis rekomendasi setempat.

Pakan hijauan terbatas & sanitasi kandang rendah (ternak) – Prioritas 2

Keduanya dianggap gawat karena berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas ternak (pertambahan bobot, angka kebuntingan, angka kematian). Masalah ini juga cukup mendesak dan menyebar di semua kecamatan binaan Carenang, sehingga pembentukan plot hijauan pakan ternak, penataan kandang, dan pelatihan kesehatan hewan harus masuk agenda tahunan penyuluhan.

Pengetahuan IB minim (ternak) – Prioritas 4

Masalah ini gawat untuk efisiensi reproduksi, tetapi tingkat penyebarannya relatif lebih terbatas (tidak semua peternak memelihara induk atau siap IB) sehingga berada di prioritas menengah. Kegiatan yang disarankan adalah pengenalan IB di kelompok yang sudah siap, pelatihan deteksi birahi, dan kerja sama teknis dengan petugas kesehatan hewan.

Alih fungsi lahan, pupuk subsidi, dan modal (umum) – Prioritas 2–3

Alih fungsi lahan sangat gawat dan menyebar karena mengurangi daya dukung usaha tani dan bersifat sulit pulih. Pupuk subsidi dan modal terbatas sangat memengaruhi kemampuan petani mengadopsi teknologi, tetapi biasanya ditangani melalui kebijakan lintas sektor. Di Program, hal ini diterjemahkan menjadi advokasi tata ruang, penguatan kelembagaan ekonomi petani (koperasi), dan pengawalan RDKK pupuk.

BPP Caringin Tanaman Pangan

Di kawasan Caringin, tekanan terbesar berasal dari alih fungsi lahan sehingga lahan sawah tersisa cenderung tersebar dan terfragmentasi, membuat pengelolaan irigasi dan

penerapan teknologi seperti jajar legowo menjadi tidak seragam. Penggunaan benih non-label masih dijumpai karena sebagian petani memanfaatkan benih simpanan, sedangkan pemupukan tidak menyesuaikan karakter tanah podsolik merah kuning yang dominan, menyebabkan efisiensi pupuk rendah dan biaya tinggi per unit hasil.

Hortikultura

Komoditas cabe, mentimun, dan sayuran daun di Curug, Kelapa Dua, dan Cisauk terpapar kuat oleh OPT akibat intensifikasi di lahan sempit pekarangan dan lahan sewa, namun pengendalian lebih banyak dengan pestisida sintesis tanpa rotasi bahan aktif sehingga risiko resistensi meningkat. Perempelan tunas air, pengaturan tajuk, dan sortasi hasil untuk memenuhi standar pasar modern (ritel dan hotel–restoran–kafe di kawasan kota baru) belum banyak diterapkan, sehingga produk sulit masuk pasar yang memberikan harga premium.

Ternak

Peternakan sapi, kambing, dan unggas terkonsentrasi di kantong-kantong tertentu; hijauan terbatas karena lahan sekitar banyak berubah menjadi perumahan dan fasilitas komersial. Kandang sering berdekatan dengan pemukiman, sehingga sanitasi yang buruk menimbulkan keluhan bau dan lalat, sementara pemahaman tentang IB dan manajemen reproduksi modern masih rendah sehingga peluang peningkatan produktivitas biologi belum dimanfaatkan optimal.

Umum

Alih fungsi lahan sangat dominan di Curug, Kelapa Dua, dan Pagedangan, yang menurut IPW Pagedangan dipandang sebagai masalah dengan skor cukup tinggi dalam matriks GMP, sehingga di BPP Caringin isu ini logis ditempatkan sebagai prioritas umum. Keterbatasan pupuk bersubsidi dan lemahnya akses modal menghambat ekstensifikasi maupun intensifikasi, terutama bagi petani hortikultura yang memerlukan investasi tinggi untuk sarana produksi dan mulsa.

Tabel 41. Matriks Prioritas Masalah BPP Caringin (G–M–P)

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT rendah	4	4	4	12	2
Tanaman Pangan	Pemupukan tidak spesifik lokasi	3	3	4	10	3
Tanaman Pangan	Penggunaan benih non-label	3	3	3	9	4
Hortikultura	Pengendalian OPT tidak terpadu	4	4	4	12	2
Hortikultura	Pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3
Hortikultura	Perempelan & sortasi belum standar	3	3	3	9	4
Ternak	Pakan hijauan terbatas	4	4	4	12	2
Ternak	Sanitasi kandang & kesehatan ternak	4	4	4	12	2
Ternak	Pengetahuan IB rendah	3	3	3	9	4
Umum	Alih fungsi lahan	5	5	4	14	1
Umum	Pupuk subsidi terbatas	3	4	4	11	3
Umum	Modal usaha terbatas	3	4	4	11	3

Di wilayah Caringin (Curug, Kelapa Dua, Legok, Pagedangan, Kemuning, Cisauk), masalah umum alih fungsi lahan, pengendalian OPT, pakan hijauan, dan sanitasi kandang menempati skor tertinggi.

Alih fungsi lahan – Prioritas 1

Masalah ini sangat gawat karena penurunan luas lahan sawah dan hortikultura secara permanen mengurangi kapasitas produksi wilayah. Mendesak karena pembangunan kawasan perumahan dan komersial terus berjalan, dan penyebarannya luas di kecamatan-kecamatan penyangga kota. Dalam Program, isu ini lebih banyak ditangani lewat advokasi kebijakan (koordinasi dengan kecamatan, Bappeda, dan agraria), penataan pemanfaatan lahan tersisa, dan pengembangan intensifikasi (padi intensif, horti intensif, urban farming).

Pengendalian OPT (pangan & horti) – Prioritas 2

Gawat dan menyebar karena intensifikasi di lahan sempit, iklim lembab, dan kedekatan dengan kawasan pemukiman memicu serangan OPT pada cabe, sayuran, dan padi. Mendesak karena serangan menurunkan hasil secara langsung. Kegiatan yang perlu diprioritaskan adalah sekolah lapang PHT cabe dan padi, penguatan petani pengamat hama, dan pembatasan penggunaan pestisida tertentu yang berisiko tinggi.

Pakan hijauan dan sanitasi kandang (ternak) – Prioritas 2

Ternak di lingkungan padat penduduk sangat sensitif terhadap isu bau, lalat, dan limbah, sehingga sanitasi kandang diberi skor gawat–mendesak. Pakan hijauan juga berdampak besar terhadap produktivitas ternak. Penyuluhan diarahkan pada kandang ramah lingkungan, Manajemen limbah, dan integrasi ternak dengan pemanfaatan pekarangan (menanam rumput gajah, odot, indigofera).

Pemupukan tidak spesifik lokasi, benih non-label, dan IB rendah – Prioritas 3–4

Masalah ini penting namun relatif kalah mendesak dibanding tekanan alih fungsi lahan dan OPT. Pemecahan dilakukan lewat penyuluhan teknis, demplot pemupukan spesifik lokasi, dan pengenalan IB pada kelompok ternak di kantong-kantong yang masih cukup hijauan.

3.7. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

3.7.1. PEMECAHAN MASALAH PER BPP

BPP Sepatan

BPP Sepatan bercirikan sawah irigasi teknis yang cukup luas dengan intensitas tanam tinggi, sehingga masalah utama berkisar pada pengendalian OPT, pemupukan berimbang, penggunaan benih berlabel, dan pengelolaan air; pada subsektor ternak muncul masalah tata letak dan sanitasi kandang, pakan tidak sesuai anjuran, serta rendahnya pengetahuan penyakit dan vaksinasi. Di aspek umum, permodalan kelompok lemah, pemasaran hasil belum kolektif, dan partisipasi anggota kelompok masih rendah. Analisis GMP menunjukkan bahwa kombinasi pengendalian OPT–pemupukan padi serta sanitasi kandang–kesehatan ternak menempati prioritas utama karena berdampak langsung terhadap hasil dan kesehatan ternak di wilayah padat penduduk.

Program Penyuluhan diarahkan pada SL-PHT padi dan pemupukan berimbang, perbaikan tata kelola irigasi di tingkat kelompok, serta program biosecurity dan vaksinasi di peternakan rakyat; sementara itu, penguatan kelembagaan kelompok untuk permodalan dan pemasaran kolektif menjadi dasar pengembangan usaha tani yang berkelanjutan.

Tabel 42. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Sepatan

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT & pemupukan padi tidak berimbang	4	5	5	14	1	SL-PHT padi + pemupukan berimbang, papan jadwal pengamatan OPT.
Tanaman Pangan	Benih berlabel belum umum, pengelolaan air belum baik	3	3	4	10	3	Demplot VUB padi & pengelolaan irigasi di tingkat kelompok.
Hortikultura	OPT horti & pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3	SL-Horti sayuran, perempelan cabe & sortasi hasil.
Ternak	Sanitasi kandang & manajemen pakan rendah	4	4	4	12	2	Pelatihan kandang sehat, manajemen pakan & vaksinasi massal.
Ternak	Pengetahuan penyakit & vaksinasi rendah	4	4	4	12	2	Program biosecurity & pengenalan penyakit utama.
Umum	Permodalan & pemasaran kolektif lemah	3	4	4	11	3	Penguatan kelembagaan kelompok, pembentukan unit pemasaran & modal bergulir.

BPP Kaliasin

Permasalahan di BPP Kaliasin mencerminkan karakter wilayah agraris dengan lahan sawah dan hortikultura yang luas, namun tingkat penerapan teknologi budidaya masih sedang, sehingga muncul gap antara potensi dan hasil nyata. Masalah utama adalah pengendalian OPT padi dan horti yang belum terpadu, penggunaan benih non-label, pemupukan tidak berimbang, serta penerapan jajar legowo yang masih terbatas; pada ternak muncul keterbatasan hijauan pakan dan sanitasi kandang yang sederhana, sementara pada aspek umum mulai terasa alih fungsi sebagian sawah serta terbatasnya akses pupuk subsidi dan modal intensifikasi.

Analisis GMP menempatkan pengendalian OPT dan penerapan jajar legowo sebagai masalah prioritas tinggi karena berdampak langsung pada produktivitas padi dan sayuran dengan penyebaran yang luas, sedangkan manajemen pakan dan kesehatan ternak berada pada prioritas berikutnya karena berpengaruh pada pendapatan rumah tangga peternak. Dalam Program Penyuluhan, fokus diarahkan pada peningkatan adopsi teknologi budidaya padi dan horti (benih berlabel, pemupukan berimbang, PHT, jajar legowo) dan penguatan sistem pakan–kesehatan ternak, sementara kegiatan penguatan kelembagaan digunakan untuk mengatasi kendala pupuk dan modal.

Tabel 43. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Kaliasin

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT padi rendah	4	5	5	14	1	SL-PHT padi, jadwal pengamatan OPT, perangkap & musuh alami.
Tanaman Pangan	Jajar legowo belum luas	4	4	4	12	2	Demplot jajar legowo di sentra sawah, sosialisasi hasil & efisiensi input.
Tanaman Pangan	Benih non-label, pemupukan tidak berimbang	3	3	4	10	3	Pelatihan VUB & pemupukan berimbang, klinik usahatani di BPP.
Hortikultura	Pengendalian OPT & pemupukan horti belum tepat	4	4	4	12	2	SL-Horti mentimun/kacang panjang, rotasi tanaman & pestisida.
Ternak	Hijauan terbatas, sanitasi kandang sederhana	4	4	4	12	2	Kebun HMT kelompok, pelatihan kandang sehat & manajemen limbah.
Ternak	Pengetahuan IB terbatas	3	3	3	9	4	Sosialisasi IB, pendampingan reproduksi bersama Puskesmas.
Umum	Alih fungsi sebagian sawah; pupuk & modal terbatas	3	4	4	11	3	Advokasi lahan, penguatan gapoktan pengelola pupuk & akses KUR.

BPP Sukatani

BPP Sukatani berada di kawasan peri-urban dengan tekanan alih fungsi lahan tinggi sehingga sawah menyusut dan pemanfaatan pekarangan serta hortikultura menjadi lebih penting. Masalah utama meliputi pengendalian OPT padi dan penerapan jajar legowo yang belum menyeluruh di sawah tersisa, OPT horti dan pemupukan tidak berimbang, keterbatasan hijauan pakan serta sanitasi kandang di lingkungan padat, serta tingginya alih fungsi lahan dan terbatasnya akses pupuk subsidi dan modal. Analisis GMP menempatkan pengendalian OPT & jajar legowo, hijauan–sanitasi kandang, dan alih fungsi lahan pada prioritas tinggi karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha pertanian di tengah tekanan urbanisasi.

Program Penyuluhan perlu menekankan paket teknologi padi intensif (VUB, jajar legowo, pemupukan berimbang, PHT) untuk lahan sawah yang tersisa, sekaligus mengembangkan hortikultura pekarangan dan ternak kecil terintegrasi dengan hijauan di pekarangan dan area marginal. Penguatan lembaga ekonomi petani menjadi sarana mengurangi dampak keterbatasan pupuk dan modal di wilayah yang lahan pertaniannya terus berkurang.

Tabel 44. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Sukatani

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT padi & jajar legowo	4	5	5	14	1	Demplot paket padi intensif (VUB, jajar legowo, PHT, pemupukan berimbang).
Tanaman Pangan	Benih non-label & pupuk tidak tepat	3	3	4	10	3	Pelatihan benih & pupuk, klinik usahatani.
Hortikultura	OPT & pemupukan horti tidak berimbang	3	3	4	10	3	SL-Horti pekarangan, perempelan cabe & sortasi.
Ternak	Hijauan terbatas & sanitasi kandang rendah	4	4	4	12	2	Hijauan di pekarangan & tepi jalan, penataan kandang ramah lingkungan.
Ternak	Pengetahuan IB rendah	3	3	3	9	4	Edukasi IB & reproduksi ternak di kelompok siap.
Umum	Alih fungsi lahan; pupuk & modal terbatas	4	4	4	12	2–3	Diversifikasi usaha tani, penguatan gapoktan untuk pupuk & KUR.

BPP Kronjo

Di BPP Kronjo, padi sawah masih menjadi tulang punggung, namun manajemen pengairan, penerapan jajar legowo, dan pengendalian OPT belum optimal, sementara hortikultura (semangka, timun suri) masih bersifat selingan dengan manajemen input yang belum intensif. Peternakan rakyat menghadapi keterbatasan hijauan di musim kemarau dan sanitasi kandang yang belum baik, sedangkan pada aspek umum petani hortikultura sangat bergantung pada tengkulak dan pemanfaatan kredit formal masih rendah. Analisis GMP menunjukkan bahwa pengendalian OPT padi (PHT) dan sistem tanam–pengairan menjadi masalah paling gawat dan mendesak, diikuti oleh hijauan–sanitasi kandang serta ketergantungan pemasaran pada tengkulak.

Program Penyuluhan diarahkan pada penguatan PHT padi, pengaturan irigasi berselang dan jajar legowo, serta pengembangan HMT dan perbaikan kandang, sedangkan kelembagaan pemasaran didorong melalui unit pemasaran bersama agar posisi tawar petani terhadap tengkulak membaik.

Tabel 45. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Kronjo

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT & PHT padi belum berjalan	4	5	5	14	1	SL-PHT padi, jadwal pengamatan OPT, pembatasan pestisida berisiko tinggi.

Tanaman Pangan	Jajar legowo & pengairan berselang belum diterapkan	4	4	4	12	2	Demplot irigasi berselang + jajar legowo, pelatihan operator irigasi.
Tanaman Pangan	Benih & pupuk tidak sesuai anjuran	3	3	4	10	3	Pelatihan VUB & pemupukan berimbang, klinik saprodi di BPP.
Hortikultura	OPT & pemupukan horti belum intensif	3	3	4	10	3	SL-Horti semangka/timun suri, perbaikan sortasi & pemasaran.
Ternak	Hijauan terbatas & sanitasi kandang kurang	4	4	4	12	2	Kebun HMT, penataan kandang & pelatihan kesehatan dasar ternak.
Umum	Ketergantungan pada tengkulak; kredit rendah	4	4	4	12	2–3	Unit pemasaran bersama, pendampingan administrasi akses kredit (BJB, KUR).

BPP Kampung Melayu

BPP Kampung Melayu memiliki karakter pesisir dengan kombinasi sawah rawan banjir, pekarangan hortikultura, tambak, dan peternakan rakyat, sehingga masalah teknis terkait OPT, banjir, dan ketersediaan hijauan sangat menonjol. Pengendalian OPT padi di lahan rawan banjir menjadi persoalan gawat karena tanaman mudah rusak ketika serangan hama/penyakit bertepatan dengan genangan, sedangkan pada hortikultura beban OPT tinggi pada sayuran dan cabe pesisir; pada ternak, keterbatasan hijauan dan sanitasi kandang di lingkungan lembab meningkatkan risiko penyakit, sedangkan secara umum alih fungsi lahan ke tambak dan pergudangan mengurangi areal pertanian dan memperkuat keterbatasan pupuk serta modal petani.

Analisis GMP menempatkan pengendalian OPT padi di lahan banjir, jajar legowo di lahan lembab, OPT horti, serta pakan–sanitasi ternak pada prioritas tinggi karena dampak dan penyebarannya yang luas di wilayah pesisir. Program Penyuluhan diarahkan pada penyesuaian kalender tanam dan teknologi budidaya terhadap risiko banjir dan intrusi, integrasi padi–ikan–sayur, serta pengembangan hijauan dan kandang sehat di kondisi lahan basah, sementara isu alih fungsi dan permodalan ditangani melalui penguatan kelembagaan dan diversifikasi usaha tani.

Tabel 46. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Kampung Melayu

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	OPT padi di lahan rawan banjir rendah pengendalian	4	5	5	14	1	Penyesuaian kalender tanam, varietas toleran, SL-PHT padi lahan banjir.

Tanaman Pangan	Jajar legowo belum optimal di lahan lembab	4	4	4	12	2	Demplot jajar legowo di lahan rendah, pengaturan tinggi air.
Hortikultura	OPT tinggi & pemupukan tidak berimbang pada sayur/cabe	4	4	4	12	2	SL-Horti pesisir, mulsa, sanitasi kebun, rotasi tanaman.
Ternak	Hijauan terbatas, sanitasi kandang kurang di area lembab	4	4	4	12	2	Hijauan di tepian tanggul & pematang, kandang kering & manajemen limbah.
Ternak	Pengetahuan IB & kesehatan ternak minim	3	3	3	9	4	Edukasi IB & kesehatan dasar ternak, layanan terpadu dengan dinas.
Umum	Alih fungsi lahan; pupuk & modal terbatas	4	4	4	12	2–3	Diversifikasi padi–ikan–sayur–ternak, penguatan kelembagaan & akses modal.

BPP Tegal Kunir

BPP Tegal Kunir berada di wilayah utara/pesisir dengan risiko banjir dan salinitas, dimana padi, hortikultura, dan ternak rakyat dihadapkan pada tantangan lingkungan yang berat. Masalah utama adalah pengendalian OPT padi dan penerapan jajar legowo di lahan rawan banjir, OPT horti dan pemupukan tidak berimbang, ketersediaan hijauan pakan yang terbatas karena kompetisi dengan tambak dan sawah, serta sanitasi kandang yang kurang baik di lingkungan lembab; pada aspek umum terjadi alih fungsi lahan ke perumahan dan tambak dengan keterbatasan pupuk subsidi dan modal petani. Analisis GMP menempatkan masalah OPT & jajar legowo di lahan banjir serta hijauan–sanitasi kandang dan alih fungsi lahan sebagai prioritas tinggi karena berdampak luas pada keberlangsungan sistem usaha tani pesisir.

Program Penyuluhan diarahkan pada adaptasi teknologi padi dan horti terhadap kondisi banjir dan salinitas, integrasi padi–ikan–sayur–ternak, dan pengembangan kebun hijauan di lahan marginal (pematang, tepian tambak), disertai penguatan kelembagaan petani untuk mengelola akses pupuk dan modal.

Tabel 47. Masalah Utama, Skor GMP, dan Solusi BPP Tegal Kunir

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	OPT & jajar legowo di lahan rawan banjir	4	5	5	14	1	Penyesuaian kalender tanam, varietas toleran, jajar legowo & pengaturan saluran.
Tanaman Pangan	Benih non-label & pupuk tidak seimbang	3	3	4	10	3	Pelatihan VUB & pemupukan berimbang, klinik usahatani.

Hortikultura	OPT tinggi & pemupukan tidak berimbang pada horti	4	4	4	12	2	SL-Horti pesisir, mulsa, sanitasi kebun & rotasi tanaman.
Ternak	Hijauan terbatas & sanitasi kandang kurang	4	4	4	12	2	Hijauan di pematang/tanggul, kandang kering & manajemen limbah.
Ternak	Pengetahuan IB minim	3	3	3	9	4	Sosialisasi IB di kelompok ternak siap, kolaborasi Puskesmas.
Umum	Alih fungsi lahan; pupuk & modal terbatas	4	4	4	12	2–3	Diversifikasi padi–ikan–sayur–ternak, penguatan kelembagaan & akses KUR.

BPP Carenang

Permasalahan di BPP Carenang menunjukkan pola khas wilayah agraris yang mulai tertekan urbanisasi: benih non-label, pemupukan tidak tepat, pengendalian OPT rendah, serta jajar legowo yang belum menyeluruh pada padi; OPT tinggi, pemupukan tidak berimbang, perempelan dan sortasi lemah pada hortikultura; hijauan terbatas dan sanitasi kandang rendah pada ternak; serta alih fungsi lahan dan keterbatasan pupuk–modal pada aspek umum. Analisis GMP menempatkan pengendalian OPT, sistem tanam jajar legowo, pakan hijauan, sanitasi kandang, dan alih fungsi lahan pada skor prioritas tinggi karena dampaknya besar terhadap produktivitas dan pendapatan, sifatnya mendesak, dan dialami luas oleh kelompok tani di kecamatan binaan.

Dalam konteks Program Penyuluhan, permasalahan ini menuntut paket kegiatan yang terintegrasi antara padi, hortikultura, dan ternak, dengan fokus utama pada peningkatan kemampuan petani mengelola OPT secara terpadu dan mengadopsi teknologi jajar legowo serta pemupukan berimbang. Sementara itu, di subsektor ternak, pengembangan kebun hijauan dan perbaikan sanitasi kandang menjadi prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko penyakit, sedangkan di aspek umum, penguatan kelembagaan kelompok untuk mengakses pupuk subsidi dan modal merupakan kunci keberlanjutan usahatani.

Tabel 48. Masalah Utama dan Prioritas GMP BPP Carenang

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT rendah	4	5	5	14	1	SL-PHT padi, jadwal pengamatan OPT, demplot PHT.
Tanaman Pangan	Jajar legowo belum optimal	4	4	4	12	2	Demplot jajar legowo, evaluasi hasil & biaya.
Hortikultura	OPT tinggi, pemupukan tidak berimbang	4	4	4	12	2	SL-Horti cabe/sayur, rotasi tanaman & pestisida.

Ternak	Hijauan terbatas, sanitasi kandang rendah	4	4	4	12	2	Kebun HMT kelompok, pelatihan kandang sehat.
Umum	Alih fungsi lahan; pupuk & modal terbatas	4	4	4	12	2–3	Advokasi lahan, penguatan gapoktan, akses KUR & pengawalan RDKK.

BPP Caringin

Karakter BPP Caringin sangat dipengaruhi ekspansi kawasan permukiman dan kota baru sehingga alih fungsi lahan menjadi persoalan struktural paling gawat dan luas, disusul oleh masalah teknis budidaya di sisa lahan sawah dan hortikultura. Pengendalian OPT pada padi dan horti, pemupukan tidak spesifik lokasi, pakan hijauan terbatas, serta sanitasi kandang di lingkungan padat penduduk meningkatkan risiko penurunan produktivitas dan konflik sosial terkait bau dan limbah. Dalam analisis GMP, alih fungsi lahan mendapat skor tertinggi karena menimbulkan dampak permanen pada kapasitas produksi wilayah, sedangkan pengendalian OPT, hijauan, dan sanitasi kandang mendapat prioritas berikutnya karena berhubungan dengan keberlanjutan usaha tani dan ternak di lahan yang tersisa.

Solusi diarahkan ke dua jalur: pertama, intensifikasi dan diversifikasi usaha di lahan tersisa melalui urban farming, hortikultura intensif, dan integrasi ternak–tanaman; kedua, penguatan posisi petani dalam tata ruang melalui advokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan forum perencanaan wilayah. Pengendalian OPT dan pemupukan berimbang di lahan- lahan horti yang dekat pasar modern dapat menaikkan kualitas produk sehingga petani mendapat premium price, sementara pengelolaan hijauan dan kandang yang baik mencegah masalah lingkungan dan membuka peluang usaha olahan ternak berskala rumah tangga.

Tabel 49. Masalah Utama dan Prioritas GMP BPP Caringin

Bidang	Masalah Utama	G	M	P	Skor	Prioritas	Arah Solusi Utama
Umum	Alih fungsi lahan	5	5	4	14	1	Advokasi LP2B, pemetaan lahan prioritas, intensifikasi & urban farming.
Tanaman Pangan	Pengendalian OPT rendah	4	4	4	12	2	SL-PHT padi, pemupukan spesifik lokasi.
Hortikultura	OPT & GAP horti belum diterapkan	4	4	4	12	2	SL-Horti untuk pasar modern, standar sortasi & mutu kelompok.
Ternak	Hijauan terbatas, sanitasi kandang rendah	4	4	4	12	2	Integrasi ternak–pekarangan, kebun hijauan, kandang ramah lingkungan.

3.7.2. AGREGAT DI KABUPATEN TANGERANG

Tanaman pangan (benih, pupuk, OPT, jajar legowo)

Permasalahan benih non-label pada padi dan tanaman pangan lain membuat potensi hasil tidak tercapai karena daya tumbuh dan vigor benih tidak terjamin, sementara varietas yang digunakan sering tidak sesuai dengan agroekosistem setempat. Pemupukan yang tidak berimbang—cenderung berlebih N, kurang P, K, dan bahan organik—mengakibatkan tanaman rentan rebah, tanah menurun kesuburannya, dan respon terhadap pupuk semakin menurun dari musim ke musim. Pengendalian OPT yang masih reaktif dan dominan menggunakan pestisida kimia tanpa pengamatan pra-serangan menyebabkan biaya usahatani tinggi, musuh alami terganggu, dan serangan hama penyakit mudah meledak. Di sisi lain, sistem tanam jajar legowo belum optimal diterapkan, padahal di banyak BPP analisis IPW menunjukkan teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas dan mempermudah pemupukan serta pengendalian gulma dan OPT bila diterapkan secara konsisten.

Alternatif pemecahan diprioritaskan dalam bentuk Sekolah Lapang (SL) Padi di tiap BPP, dimana petani mempraktikkan langsung penggunaan benih berlabel, pemupukan berimbang, PHT, dan jajar legowo dengan membandingkan hasil dan biaya dengan cara konvensional. Fasilitasi akses benih dan pupuk melalui penguatan kios saprodi, BUMDes, atau koperasi tani menjadi pelengkap yang menjamin ketersediaan input sesuai kebutuhan lapang.^[1]

Tabel 50. Masalah dan Solusi Agregat Tanaman Pangan

Komponen	Masalah Agregat	Solusi Utama
Benih	Penggunaan benih non-label, varietas tidak selalu sesuai agroekosistem.	SL Padi tentang VUB, fasilitasi akses benih bersertifikat, demplot perbandingan varietas.
Pemupukan	Dosis pupuk tidak tepat, tidak berimbang, minim bahan organik.	Pelatihan pemupukan berimbang, uji tanah sederhana, integrasi pupuk organik–anorganik.
Pengendalian OPT	Pengendalian OPT rendah, reaktif, hanya pestisida kimia.	SL-PHT, jadwal pengamatan kelompok, pemanfaatan musuh alami dan perangkap.
Sistem tanam	Jajar legowo belum optimal.	Demplot jajar legowo, perhitungan keuntungan, replikasi di kelompok tani.

Hortikultura (OPT, pemupukan, perempelan, sortasi)

Pada hortikultura, beban OPT (hama dan penyakit) cenderung tinggi akibat intensifikasi di lahan sempit dan penggunaan pestisida tanpa pola rotasi bahan aktif, sehingga risiko resistensi dan residu juga meningkat. Pemupukan cabe dan sayuran sering hanya mengikuti kebiasaan atau saran pedagang saprodi, bukan didasarkan kebutuhan tanaman per fase tumbuh, sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatif tidak seimbang. Perempelan tunas air pada cabe belum dianggap kebutuhan pokok, membuat tajuk terlalu rimbun, kelembapan mikro tinggi, dan memicu serangan penyakit daun dan buah. Sortasi hasil yang lemah menurunkan posisi tawar petani karena produk tidak seragam dan harus disortir ulang oleh tengkulak atau pedagang besar, sehingga harga di tingkat petani menjadi lebih rendah.

Pemecahan diarahkan pada SL Hortikultura yang menekankan praktik budidaya cabe dan sayur yang baik (GAP), mulai dari pemilihan benih, pemupukan, pengendalian OPT terpadu, hingga panen dan sortasi sesuai standar pasar. Di samping itu, penyusunan standar sortasi kelompok dan pelatihan grading menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk sehingga layak masuk pasar modern dengan harga lebih baik.

Tabel 51. Masalah dan Solusi Agregat Hortikultura

Komponen	Masalah Agregat	Solusi Utama
OPT	Pengendalian OPT belum tepat, masih kimiawi dan tidak terpadu.	SL-Horti PHT, rotasi bahan aktif, penggunaan mulsa dan sanitasi kebun.
Pemupukan	Pemupukan tidak berimbang.	Pemupukan sesuai fase, pemanfaatan pupuk organik, demo dosis pupuk.
Perempelan	Perempelan tunas air cabe belum rutin.	Pelatihan teknis perempelan, demplot cabe dengan dan tanpa perempelan.
Sortasi	Sortasi hasil lemah.	Penyusunan standar mutu kelompok, pelatihan grading dan pengemasan sederhana.

Ternak (pakan hijauan, sanitasi kandang, IB)

Keterbatasan hijauan pakan muncul karena persaingan penggunaan lahan antara sawah, hortikultura, perumahan, dan industri, sehingga ternak hanya mengandalkan limbah pertanian yang musiman dan kualitasnya fluktuatif. Sanitasi kandang yang buruk—lantai becek, drainase tak memadai, ventilasi minim—meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kenyamanan ternak, yang berujung pada penurunan produktivitas dan potensi konflik dengan lingkungan sekitar. Pengetahuan peternak tentang IB dan manajemen reproduksi terbatas, sehingga angka kebuntingan rendah, selang beranak panjang, dan jumlah anak lahir per induk per tahun tidak optimal.

Alternatif pemecahan diarahkan pada pengembangan kebun hijauan makanan ternak (HMT) di lahan bersama, pemanfaatan limbah tanaman sebagai bahan pakan fermentasi, dan pelatihan sanitasi kandang yang disesuaikan kondisi lokal. Program pengenalan IB dilakukan di kelompok yang sudah siap (memiliki induk cukup, dukungan pakan), dengan sosialisasi manfaat dan kerja sama dengan petugas kesehatan hewan.

Tabel 52. Masalah dan Solusi Agregat Ternak

Komponen	Masalah Agregat	Solusi Utama
Pakan hijauan	Hijauan pakan terbatas, bergantung musim.	Kebun HMT kelompok, pakan fermentasi, integrasi hijauan di pekarangan & tepi saluran.
Sanitasi	Sanitasi kandang rendah.	Pelatihan kandang sehat, manajemen limbah, pemanfaatan kotoran untuk kompos/biogas.
Reproduksi/IB	Pengetahuan IB minim.	Sosialisasi IB, pelatihan deteksi birahi, kerja sama dengan petugas IB.

Umum (alih fungsi lahan, pupuk subsidi, modal)

Alih fungsi lahan ke perumahan, industri, dan tambak mengurangi kapasitas produksi

pertanian dan bersifat irreversibel, sehingga dinilai sangat gawat dalam analisis GMP di beberapa BPP peri-urban dan pesisir. Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas dan tidak selalu tepat waktu menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan hara tanaman secara optimal. Modal petani yang terbatas dan kelembagaan ekonomi yang lemah menghambat akses ke pembiayaan formal dan kemampuan membeli sarana produksi serta mengelola usaha tani secara efisien.

Solusinya menuntut pendekatan lintas sektor: advokasi tata ruang untuk mempertahankan lahan produktif, penguatan kelembagaan ekonomi petani (gapoktan, koperasi, BUMDes) sebagai pengelola RDKK pupuk dan penyalur kredit, serta pelatihan perencanaan usaha dan pencatatan keuangan yang sistematis.

Tabel 53. Masalah dan Solusi Agregat Umum

Komponen	Masalah Agregat	Solusi Utama
Alih fungsi lahan	Lahan pertanian beralih ke perumahan, industri, tambak.	Advokasi tata ruang, pemetaan lahan prioritas, intensifikasi dan diversifikasi usaha.
Pupuk subsidi	Ketersediaan/akses pupuk subsidi terbatas.	Penguatan kelembagaan pengelola RDKK, koordinasi distribusi, promosi pupuk organik lokal.
Modal petani	Modal terbatas, akses kredit rendah.	Pelatihan manajemen usaha, akses KUR, pembentukan modal bergulir kelompok.

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG

4.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

4.1.1. Faktor Internal: Kekuatan (*Strengths*)

Sumber Daya Lahan dan Agroekosistem

Kabupaten Tangerang memiliki basis lahan pertanian yang sangat solid, mencakup lebih dari 9.000 hektar dengan komposisi dominan sawah irigasi teknis dan setengah teknis yang sudah terbangun dengan baik selama puluhan tahun. Jaringan irigasi teknis mencakup infrastruktur bendung seperti Bendung Ranca Sumur dan Cidurian yang telah terbukti mampu mendistribusikan air secara konsisten ke lahan petani. Kondisi agroekosistem sangat mendukung produktivitas tinggi: tanah berjenis aluvial, latosol, dan podsolik yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi; iklim tropis dengan pola curah hujan 2.000–3.000 mm per tahun yang ideal untuk pertanian; dan suhu rata-rata 26–32°C yang menciptakan lingkungan optimal untuk pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Topografi yang didominasi dataran rendah dengan ketinggian 0–85 meter di atas permukaan laut memberikan kemudahan dari segi aksesibilitas, drainase, dan penggunaan mekanisasi pertanian, sehingga operasional pertanian dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Kinerja Produksi dan Diversifikasi Komoditas

Di level produksi aktual, sektor pertanian Kabupaten Tangerang menunjukkan capaian yang cukup mengesankan. Produktivitas padi berkisar antara 5,3 hingga 6,1 ton per hektar,

yang berarti masih memiliki ruang pertumbuhan menuju standar nasional yang lebih tinggi yaitu di atas 6 ton per hektar. Komoditas yang dikembangkan sangat beragam, mencerminkan pemahaman petani terhadap kesesuaian agro-ekologi lokal. Padi sawah tetap menjadi komoditas utama dengan luas tanam ribuan hektar di berbagai kecamatan. Hortikultura berkembang cukup pesat dengan fokus pada cabai merah, mentimun, kacang panjang, bayam, kangkung, dan melon yang banyak ditanam oleh petani hortikultura di desa-desa tertentu. Palawija seperti jagung hibrida, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar menempati posisi penting dalam rotasi tanam dan diversifikasi pendapatan petani. Sektor peternakan mencakup populasi sapi potong dan perah, kambing, domba, ayam kampung, dan ayam pedaging yang terintegrasi dengan sistem pertanian tanaman. Di beberapa wilayah khusus seperti Kecamatan Jambe, terdapat pengembangan perkebunan rakyat dengan jeruk lemon California dan pepaya yang menunjukkan potensi pasar khusus.

Intensitas penggunaan lahan juga tercermin dari indeks pertanaman yang mencapai 170–200 di beberapa wilayah, artinya lahan dimanfaatkan lebih dari satu kali tanam per tahun. Pola tanam yang sudah terstruktur—seperti padi–padi–palawija, padi–padi–bera, atau padi–hortikultura–palawija—menunjukkan bahwa petani telah mengembangkan strategi rotasi tanam yang disesuaikan dengan ketersediaan air irigasi dan perkiraan musim, menandakan tingkat adaptabilitas dan pengetahuan lokal yang cukup dalam mengelola agroekosistem.

Sumber Daya Manusia dan Bonus Demografi

Kabupaten Tangerang dengan populasi sekitar 3,40 juta jiwa pada tahun 2024 merupakan kawasan yang sangat padat penduduk dan dinamis. Struktur usia penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang berarti bonus demografi masih berlangsung dan membuka peluang besar untuk transformasi sektor pertanian menjadi lebih modern, berbasis teknologi, dan berorientasi pada nilai tambah. Kepadatan penduduk yang tinggi secara paradoks juga menciptakan manfaat ekonomi: pasar domestik yang sangat besar untuk produk pertanian lokal, demand yang relatif stabil sepanjang tahun, dan peluang untuk mengakses pasar konsumen premium yang tersebar di wilayah urban.

Di tingkat tapak, petani telah terorganisir dalam struktur kelembagaan yang tersebar luas. Lebih dari 155 kelompok tani (poktan) dan kelompok wanita tani (KWT) aktif di berbagai kecamatan, dengan total keanggotaan mencapai ribuan keluarga petani. Kelembagaan ini dikoordinasikan melalui delapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di wilayah yang berbeda, memberikan jangkauan penyuluhan yang cukup baik. Beberapa kelembagaan telah berkembang ke level gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi aktif, dan lumbung pangan komunitas, menunjukkan adanya satu tingkat organisasi yang lebih maju di berbagai desa.

Infrastruktur dan Aksesibilitas Geografis

Lokasi geografis Kabupaten Tangerang merupakan keuntungan kompetitif yang tidak tertandingi di tingkat regional. Sebagai kawasan penyangga (buffer zone) utama DKI Jakarta sekaligus pusat industri manufaktur Provinsi Banten, kabupaten ini memiliki akses infrastruktur yang sangat baik: jaringan jalan yang rapat dan terawat dengan tingkat konektivitas tinggi ke pusat-pusat konsumsi; terminal transportasi besar untuk mobilitas barang dan orang; serta akses ke pelabuhan Tanjung Priok (lewat Jakarta) dan Cilegon (melalui jalur darat) untuk pemasaran produk ekspor. Beberapa kecamatan pesisir seperti Teluknaga dan Kosambi memiliki akses langsung ke jalur maritim dan pelabuhan regional, membuka peluang ekspor produk hortikultura segar ke pasar ASEAN dan Asia Timur.

Infrastruktur pertanian juga sudah tersedia dengan cukup baik: jaringan irigasi teknis

yang mapan di beberapa wilayah utama, sistem penyuluhan yang terdesentralisasi dengan struktur BPP-Koordinator-Petani yang jelas, serta jaringan pasar tradisional dan modern yang tersebar di kota-kota kabupaten.

Kelembagaan dan Modal Sosial

Modal sosial pertanian Kabupaten Tangerang cukup solid. Jaringan kelompok tani yang tersebar di 29 kecamatan menciptakan fondasi organisasi yang luas, meskipun dengan variasi tingkat keaktifan dan kapasitas. Pengalaman penyuluhan pertanian yang sudah berjalan bertahun-tahun menciptakan hubungan kepercayaan antara penyuluh, petani, dan pemerintah daerah. Beberapa gapoktan dan koperasi yang telah terbentuk menunjukkan upaya untuk meningkatkan skala organisasi dan kemampuan kolektif petani dalam mengakses pasar, modal, dan teknologi. Kehadiran lumbung pangan di berbagai desa mencerminkan kesadaran komunitas tentang pentingnya keamanan pangan dan stabilitas harga.

Diversifikasi Ekonomi Pertanian

Pertanian di Kabupaten Tangerang tidak lagi monolitik dalam bentuk padi sawah semata. Integrasi usahatani tanaman–ternak sudah berkembang di berbagai kelompok, terutama di desa-desa yang memiliki cukup lahan. Peluang agribisnis hortikultura premium dengan potensi harga jual tinggi sudah diidentifikasi dan sebagian dicoba oleh petani. Sistem pertanian organik dan berkelanjutan mulai dikembangkan oleh beberapa kelompok tani yang lebih progresif. Agroindustri kecil berbasis hasil pertanian lokal, meskipun masih sangat terbatas, memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama di aspek pengolahan hasil panen yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.

SWOT Matrix for Kabupaten Tangerang Agricultural Dev Strategic analysis of internal & external factors	
STRENGTHS 1. Lahan pertanian 60.000+ ha dengan irigasi teknis mapan 2. Produktivitas padi 5,5–6 ton/ha (tertinggi di Kab. Banten) 3. Diversifikasi komoditas: sayuran, buah-buahan, perikanan air tawar 4. Potensi SDA: laut dengan budidaya perikanan & pariwisata pesisir 5. Akses ke pasar kota metropolitan dalam 1 jam 6. Lokasi strategis: dekat Jakarta, sentra pemasaran & bandara 7. Agroekosistem lokal: lahan tropis, tanah subur, topografi datar	WEAKNESSES 1. Alih fungsi lahan cepat: 3.000–5.000 ha/tahun (2019), dalam 5 tahun 2. Sistem irigasi belum optimal: 30–50% areal tadah hujan tergantung cuaca 3. Adopsi teknologi pertanian rendah: mekanisasi & inovasi teknologi terbatas 4. Keterampilan petani rendah: daya tarik sektor pertanian menurun 5. Kelembagaan petani masih lemah: koperasi, kelompok tani terbatas 6. Rantai distribusi panjang: pasca panen losses (20–30%) 7. Akses modal & asuransi pertanian sangat terbatas (<10%)
OPPORTUNITIES 1. Permintaan pangan tinggi dari penduduk 3–5 juta + pengaruh Jakarta 2. Pasar ekspor & substitusi impor terbuka: jagung, sayuran, olahan ikan tinggi 3. Teknologi terjangkau: drone, sensor IoT, manajemen pertanian 4. Kebijakan pemerintah: UU Pangan, Permentan 43, KUR & Dana Desa 5. Potensi ekspor: produk hortikultura ke Singapura & Timur Tengah 6. Agrowisata: daya tarik & investasi kombinasi pertanian–pariwisata 7. Program ekonomi daerah: center breeding, penyuluhan regenerasi petani	THREATS 1. Perubahan iklim: El Niño/La Niña, variabilitas ekstrem, sea-level rise 2. Kompetisi lahan dengan industri & properti di kawasan BSD & Gading Serpong 3. Kompetisi produksi antar wilayah: Vietnam, Thailand, China dominan 4. Biaya input mahal: pupuk non-subsidi & pestisida naik 10–20% 5. Degradasi lingkungan: air sungai tercemar, lahan kritis, erosi tanah pesisir 6. Migrasi generasi muda: beralih ke sektor non-pertanian & produktivitas turun 7. Regulasi pembangunan tidak konsisten: LP2B belum efektif, fragmentasi kebijakan

Gambar 3. Matriks SWOT Komprehensif Pengembangan Pertanian Kabupaten Tangerang

4.1.2. Faktor Internal: Kelemahan (*Weakness*)

Alih Fungsi Lahan dan Konversi Pertanian

Tekanan alih fungsi lahan merupakan ancaman paling akut dan terukur bagi basis produksi pertanian Kabupaten Tangerang. Data konkret menunjukkan bahwa di Kecamatan Sepatan Timur, luas tanam padi turun dari 1.596 hektar menjadi 1.030 hektar dalam kurun waktu lima tahun—suatu penurunan sebesar 35 persen yang sangat signifikan. Fenomena serupa terjadi di berbagai kecamatan pesisir dan peri-urban lainnya, dengan lahan pertanian secara konsisten dikonversi menjadi permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur transportasi. Tekanan urbanisasi sangat kuat terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Tangerang, Jakarta, dan pusat-pusat industri. Lahan eks galian pasir, yang mencakup 200–300 hektar, masih belum direhabilitasi secara optimal menjadi lahan produktif atau ruang konservasi, menciptakan "dead zone" di tengah wilayah pertanian.

Tanpa kebijakan perlindungan lahan yang tegas dan terukur, basis lahan pertanian produktif Kabupaten Tangerang berisiko mengalami erosi permanen yang tidak dapat dikompensasi. Model perhitungan konservatif menunjukkan bahwa apabila trend konversi berlanjut pada laju 500–1.000 hektar per tahun, dalam satu dekade Kabupaten Tangerang bisa kehilangan hingga 30–40 persen dari total aset lahan pertanian saat ini.

Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Irigasi dan Pengelolaan Air

Meskipun terdapat jaringan irigasi teknis yang mapan, masih banyak wilayah pertanian yang sangat bergantung pada irigasi tadah hujan atau jaringan irigasi setengah teknis. Data lapangan menunjukkan bahwa 29–50 persen sawah di beberapa wilayah hanya mengandalkan curah hujan alami atau sistem irigasi setengah teknis yang sangat rentan terhadap kekeringan, terutama saat episode El Niño atau variabilitas iklim ekstrem. Jaringan irigasi setengah teknis, meskipun telah dibangun, sering kali mengalami ketidakstabilan dalam distribusi air karena erosi saluran, sedimentasi, dan kurangnya pemeliharaan berkala.

Keterbatasan infrastruktur pasca panen dan pengolahan juga nyata. Tidak banyak fasilitas penyimpanan hasil panen, pendingin, atau pengolahan yang tersebar di desa-desa petani, sehingga produk sering kali dijual dalam bentuk segar tanpa nilai tambah dan sangat rentan terhadap kerusakan. Sistem drainase yang belum memadai terutama di wilayah-wilayah pesisir menyebabkan banjir dan genangan musiman yang merusak tanaman dan mengurangi umur efektif dari investasi lahan.

Adopsi Teknologi Terbatas dan Produktivitas Suboptimal

Meskipun potensi produktivitas padi bisa mencapai 6–6,5 ton per hektar, banyak petani masih menggunakan teknologi budidaya konvensional yang menghasilkan produktivitas di bawah potensi. Adopsi teknologi modern seperti sistem tanam jarak legowo, pengairan berselang, penggunaan varietas unggul bersertifikat, dan praktik manajemen hama terpadu (MHT) masih di bawah 30 persen dari total petani padi. Mekanisasi pertanian masih terkonsentrasi pada kelompok petani yang memiliki akses modal lebih baik dan kelembagaan yang lebih maju, sementara mayoritas petani masih sangat bergantung pada tenaga kerja manual dan alat tradisional.

Manajemen usahatani yang lemah menjadi hambatan tersembunyi. Banyak petani tidak melakukan pencatatan usahatani yang sistematis, sehingga tidak memiliki data yang akurat tentang biaya produksi, hasil panen, keuntungan, dan efisiensi penggunaan input. Tanpa data

ini, petani tidak bisa membuat keputusan investasi yang informed atau melakukan perencanaan produksi berbasis analisis ekonomi yang solid.

Sumber Daya Manusia dan Tantangan Kelembagaan Petani

Paradoks demografis tampak jelas di sektor pertanian Kabupaten Tangerang. Meskipun populasi kabupaten 3,40 juta jiwa, persentase petani terhadap total penduduk sangat kecil. Contoh konkret: di Kecamatan Tigaraksa yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten, hanya sekitar 0,24 persen dari penduduk yang berprofesi sebagai petani—angka yang mencerminkan daya tarik sektor pertanian yang rendah dibanding sektor industri dan jasa.

Generasi petani muda semakin sedikit karena migrasi ke sektor non-pertanian berlangsung masif. Rendahnya daya tarik ini bukan hanya karena pendapatan yang tidak stabil, tetapi juga karena persepsi status sosial yang rendah, kondisi kerja yang berat, dan pembandingan pendapatan dengan sektor lain yang jauh lebih menguntungkan. Akibatnya, terdapat kekhawatiran serius tentang kelanjutan basis petani di masa depan.

Kelembagaan petani, meskipun tersebar luas, masih banyak yang berada pada level pemula dengan kapasitas organisasional dan finansial yang terbatas. Pelatihan berkelanjutan untuk penyuluh dan pendamping belum menjadi standar, sehingga kualitas penyuluhan dan pendampingan bervariasi. Beban kerja penyuluh pertanian sangat berat dengan wilayah binaan yang luas, sehingga intensitas pendampingan petani sering kali suboptimal.

Tata Niaga yang Panjang dan Posisi Tawar Petani Lemah

Struktur rantai pemasaran pertanian Kabupaten Tangerang masih sangat panjang dan tradisional. Produk dari tangan petani berpindah melalui multiple intermediaries—tengkulak tingkat desa, pedagang grosir, distributor regional—sebelum sampai ke retailer atau konsumen akhir. Setiap tahap intermediasi mengambil margin yang signifikan, sehingga pada akhirnya petani hanya menerima 30–40 persen dari harga eceran akhir produk. Posisi tawar petani sangat lemah, terutama bagi petani individual yang tidak terorganisir atau terorganisir dalam kelembagaan kecil.

Akses ke pasar premium baik pasar modern domestik (hypermarket, retail chain) maupun pasar ekspor masih sangat terbatas. Hambatan masuk tinggi karena persyaratan kualitas, volume, kontinuitas, dan sertifikasi yang ketat. Informasi pasar dan harga komoditas tidak tersedia secara real-time dan transparan, sehingga petani seringkali membuat keputusan penjualan berdasarkan informasi parsial, spekulatif, dan sering kali menguntungkan pihak ketiga lebih dari petani sendiri.

Keterbatasan Akses Modal dan Instrumen Pembiayaan

Akses kredit pertanian dengan bunga terjangkau masih terbatas, meskipun pemerintah telah meluncurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Prosedur akses, persyaratan jaminan, dan biaya administrasi masih menjadi hambatan bagi sebagian besar petani kecil. Asuransi pertanian, yang seharusnya menjadi instrumen proteksi penting, masih sangat jarang digunakan—penetrasi asuransi di bawah 10 persen dari total petani. Kebanyakan petani masih mengandalkan sistem tabungan informal dan pinjaman dari tengkulak atau rentenir lokal dengan bunga sangat tinggi.

Kemampuan investasi petani untuk teknologi dan input modern sangat terbatas. Program subsidi input pertanian yang ada belum selalu tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan tingkat adopsi teknologi. Koperasi dan lembaga keuangan lokal yang seharusnya menjadi sumber modal alternatif masih belum optimal dalam menjalankan fungsi ini.

Basis Data dan Sistem Informasi Lemah

Kabupaten Tangerang masih belum memiliki basis data terstruktur dan terintegrasi tentang potensi lokal per desa. Informasi tentang jenis tanah, kualitas air irigasi, kecenderungan cuaca, hama penyakit, kinerja kelembagaan petani, dan kebutuhan petani masih tersebar dalam berbagai format dan tidak terintegrasi dengan baik. Sistem informasi pertanian di tingkat kecamatan masih bersifat ad-hoc dan tidak konsisten dalam metodologi pengumpulan dan analisis data.

Pemantauan kondisi lahan dan sumber daya air belum menggunakan teknologi modern seperti citra satelit atau IoT sensor secara luas, sehingga identifikasi masalah sering kali reaktif daripada proaktif. Koordinasi data antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih lemah, menyebabkan keputusan kebijakan sering kali tidak berbasis data yang komprehensif dan akurat.

4.1.3. Faktor Eksternal: Peluang (*Opportunities*)

Permintaan Pangan yang Tinggi dan Berkembangnya Pasar Premium

Kabupaten Tangerang memiliki keuntungan pasar yang luar biasa: populasi lokal 3,40 juta jiwa yang tumbuh setiap tahun, ditambah "pengaruh gravitasi" pasar Jakarta yang sangat besar. Permintaan pangan dari kedua sumber ini praktis terjamin sepanjang tahun dan tidak perlu khawatir tentang penjualan volume basal. Lebih penting lagi, tren konsumsi pangan di Jabodetabek bergeser menuju produk segar berkualitas tinggi, yang organik, yang bersertifikasi, dan yang memenuhi standar keamanan pangan.

Pasar organik dan produk bersertifikasi mulai berkembang di kalangan menengah dan menengah atas Jabodetabek. Harga premium untuk produk organik atau bersertifikasi bisa mencapai 20–50 persen lebih tinggi dari produk konvensional, membuka peluang bagi petani yang mampu memenuhi standar. E-commerce dan platform digital marketplace (Tokopedia, Shopee, Instagram, TikTok) membuka jalur penjualan langsung dari produsen ke konsumen, mengeliminasi berbagai pengepul dan memberikan margin keuntungan yang jauh lebih baik bagi petani.

Teknologi yang Semakin Terjangkau dan dapat diakses

Landscape teknologi pertanian telah berubah secara fundamental dalam lima tahun terakhir. Perangkat drone pertanian, sensor IoT, dan sistem automasi sudah tersedia dengan harga yang jauh lebih terjangkau—drone untuk monitoring lahan bisa didapat di bawah 10 juta rupiah, sensor kelembaban tanah di bawah 1 juta rupiah. Platform informasi pertanian berbasis *mobile* dan *cloud computing* semakin banyak tersedia, termasuk yang *offline-enabled* sehingga bisa digunakan di area dengan konektivitas internet terbatas.

Aplikasi mobile untuk monitoring lahan real-time, peramalan cuaca berbasis AI, sistem *decision support*, dan marketplace digital semakin gencar dikembangkan oleh *startup agritech* lokal dan internasional. Bioteknologi untuk peningkatan varietas tanaman yang tahan iklim ekstrem, tahan hama penyakit, dan lebih responsif terhadap input organik terus berkembang

dan semakin tersedia di pasaran dengan harga yang lebih terjangkau.

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah yang Mendukung

Kerangka kebijakan nasional dan daerah kini semakin memperkuat transformasi pertanian menuju sistem yang produktif, modern, berbasis data, dan berkelanjutan. Selain tetap berpijak pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, arah kebijakan terbaru dapat dikaitkan dengan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta Permentan No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029. Implementasinya diperkuat melalui percepatan swasembada pangan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2025, pendayagunaan penyuluh pertanian berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2025, serta pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air melalui Inpres No. 14 Tahun 2025. Dari sisi pembiayaan dan kelembagaan, dukungan pemerintah juga terlihat melalui KUR sektor pertanian dan Kredit Alsintan, serta Dana Desa Tahun 2025 yang memprioritaskan ketahanan pangan paling rendah 20% dari Dana Desa, termasuk dengan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama, dan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Dengan dasar tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki ruang kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, memperbaiki infrastruktur irigasi, memperluas penerapan *smart farming* dan *precision farming*, memperkuat penyuluhan, serta membuka akses modal, teknologi, dan pasar bagi petani, kelompok tani, BUM Desa, koperasi, dan pelaku agribisnis lokal. Pemerintah pusat juga meluncurkan berbagai insentif untuk petani muda (program start-up pertanian, subsidi input, akses lahan), program pertanian berkelanjutan, dan dukungan ekspor produk pertanian ke pasar ASEAN dan regional lainnya.

Pasar Ekspor dan Peluang Agribisnis Skala Besar

Permintaan pasar ekspor untuk hortikultura segar berkualitas tinggi dari pasar ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand) dan Asia Timur (Jepang, Korea, China) terus meningkat. Kabupaten Tangerang, dengan lokasi strategis dan akses pelabuhan, memiliki potensi besar untuk mengembangkan supply hortikultura premium untuk ekspor. Standar internasional seperti GlobalGAP, sertifikasi organik, dan ketelusuran bisa dijadikan strategi diferensiasi dan akses pasar premium.

Di saat yang sama, agribisnis skala menengah-besar dan korporat multinasional semakin membuka peluang kemitraan dengan petani kecil melalui model kontrak pertanian (*contract farming*), franchising, dan cooperative arrangement. Model bisnis baru seperti ekowisata, *agro-education*, dan *community farming* mulai berkembang di berbagai daerah, membuka peluang revenue diversification bagi petani dan komunitas lokal.

Kerjasama Multi-Stakeholder dan Sumber Pendampingan Beragam

Komitmen pemerintah kabupaten dan provinsi terhadap pertanian berkelanjutan meningkat, sebagaimana tercermin dalam alokasi anggaran, rencana strategis, dan prioritas pembangunan daerah. Potensi kerjasama dengan universitas (IPB, ITB, Polbangtan) dan lembaga penelitian (LIPI, BRIN) membuka akses ke inovasi teknologi, pilot project, dan *capacity building* yang berkelanjutan. LSM dan NGO internasional yang fokus pada pertanian berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan petani juga aktif di berbagai daerah, membawa tenaga ahli, pembiayaan, dan program program percontohan. Fintech pertanian, startup agritech lokal, dan platform digital financing berkembang pesat, membuka alternatif akses modal yang lebih fleksibel dan didesain untuk petani.

Rehabilitasi Lahan dan Program Lingkungan

Program penghijauan, konservasi lahan, dan rehabilitasi yang didorong pemerintah membuka peluang untuk mengubah eks galian pasir dan lahan degradasi menjadi lahan produktif atau ruang konservasi. Program *carbon farming* dan pembayaran untuk jasa ekosistem semakin ditawarkan oleh berbagai institusi, membuka sumber pendapatan tambahan bagi petani yang mengadopsi praktik pertanian regeneratif. Pengembangan pertanian regeneratif dan permakultur, meskipun masih terbatas, semakin mendapat dukungan dari pemerintah, pasar, dan masyarakat.

4.1.4. Faktor Eksternal: Ancaman (*Threats*)

Perubahan Iklim dan Variabilitas Cuaca Ekstrem

Perubahan iklim global dan regional telah menciptakan variabilitas curah hujan yang semakin ekstrem. Episode El Niño 2023–2024 mengakibatkan kemarau panjang yang mengurangi produksi padi di lahan tadah hujan hingga 20–30 persen dan mendorong kegagalan panen di beberapa desa. Prediksi iklim masa depan menunjukkan bahwa pola ekstrem ini akan semakin sering terjadi, dengan periode kemarau lebih panjang dan intens, dan periode hujan dengan intensitas tinggi yang memicu banjir.

Kenaikan permukaan laut dengan laju 2–5 mm per tahun mengancam lahan pertanian pesisir melalui intrusi air laut (salinasi) dan genangan asin musiman. Perubahan iklim juga mengubah pola serangan hama dan penyakit tanaman, mempercepat mutasi pathogen, dan memperluas area distribusi OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Sawah-sawah tadah hujan yang mencakup 29–50 persen dari total sawah di beberapa wilayah sangat rentan terhadap fluktuasi iklim ini.

Alih Fungsi Lahan dan Ekspansi Urbanisasi-Industri

Tekanan alih fungsi lahan berlangsung cepat dengan laju konversi diestimasi 500–1.000 hektar per tahun. Ekspansi permukiman, kawasan industri, infrastruktur transportasi (jalan tol, rel kereta), dan sektor pariwisata terus mendorong permintaan untuk lahan, dan pertanian sering kali kalah dalam kompetisi penggunaan lahan. Fragmentasi lahan menjadi semakin kecil seiring dengan pembagian warisan dan konversi lahan peri-urban menjadi kawasan permukiman.

Apabila trend ini berlanjut, dalam 10 tahun ke depan Kabupaten Tangerang berisiko kehilangan 30–40 persen dari basis lahan pertanian produktif saat ini—suatu peluang kehilangan yang tidak hanya berakibat pada produktivitas pangan, tetapi juga pada ekosistem, keseimbangan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang.

Kompetisi Produk Impor dan Tekanan Harga

Produk pertanian impor dari Vietnam, Thailand, China, dan negara ASEAN lainnya bersaing ketat di pasar domestik dengan harga yang lebih murah, kualitas yang seragam (meskipun terstandar, bukan premium), dan rantai pasok yang efisien. Retail modern memfasilitasi masuknya produk impor karena kemudahan kontrak, kontinuitas pasokan, dan persaingan harga. Tekanan ini membuat petani lokal Kabupaten Tangerang kesulitan untuk menembus pasar retail modern dan pasar urban, kecuali mereka mampu menawarkan diferensiasi (organik, lokal, sertifikasi, atau kualitas premium).

Biaya Input yang Terus Meningkat

Harga pupuk, benih hybrid, dan pestisida terus meningkat dengan laju 5–15 persen per tahun,

mencerminkan kenaikan harga komoditas global dan dampak inflasi. Untuk petani dengan margin keuntungan kecil dan akses modal terbatas, peningkatan ini menjadi beban yang signifikan. Tanpa teknologi yang lebih efisien atau dukungan subsidi yang jelas, petani bisa terjebak dalam spiral peningkatan biaya yang tidak diikuti peningkatan harga output. Hal tersebut terjadi terutama bagi petani dengan keterbatasan akses bantuan dan subsidi.

Degradasi Lingkungan dan Penurunan Sumber Daya Alam

Kualitas air irigasi semakin menurun akibat polusi dari industri dan pemukiman. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan mengakibatkan kerusakan tanah jangka panjang: erosi, pemadatan, penurunan kandungan bahan organik, dan loss of biodiversity. Saluran irigasi mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan kurangnya pemeliharaan. Intrusi air laut di wilayah pesisir menyebabkan salinasi tanah yang membuat lahan tidak produktif untuk periode berkepanjangan.

Penurunan biodiversitas juga tercermin dalam berkurangnya populasi predator alami hama dan penurunan jumlah spesies organisme tanah yang penting untuk kesuburan. Ekosistem pertanian menjadi semakin rapuh dan dependent pada input eksternal (pestisida, pupuk) untuk mempertahankan produktivitas.

Aspek Sosial: Migrasi Petani Muda dan Putusnya Generasi Pengetahuan

Migrasi petani muda ke sektor non-pertanian dan ke wilayah urban berlangsung masif dengan laju 2–3 persen per tahun. Petani muda memilih kerja sebagai buruh pabrik, pekerja jasa, atau operator di kota karena upah yang lebih menjanjikan dan status sosial yang lebih tinggi. Akibatnya, basis petani menjadi semakin tua dan tidak tergantikan oleh generasi baru yang memiliki energi, visi, dan kapasitas belajar teknologi baru.

Lebih serius lagi, migrasi ini berakibat pada putusnya transfer pengetahuan pertanian lokal dari generasi ke generasi. Praktik-praktik pertanian lokal yang adaptif dan sustainable, yang telah berkembang selama berabad-abad, semakin hilang karena tidak ada regenerasi dan dokumentasi yang sistematis. Ketimpangan pendapatan antara petani dan sektor lain terus membesar (dengan ratio pendapatan 1:3–1:5 antara petani dan pekerja industri), memperkuat persepsi bahwa pertanian adalah profesi kelas bawah yang tidak layak dipilih generasi muda.

Regulasi Perlindungan Lahan Lemah dan Fragmentasi Kebijakan

Meskipun ada regulasi nasional tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), implementasinya di tingkat kabupaten masih belum optimal. Zonasi pertanian dalam RDTR/RTRW belum mencapai tingkat ketat yang diperlukan untuk benar-benar mengamankan lahan pertanian produktif. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam hal perlindungan lahan masih lemah, seringkali terjadi konflik kepentingan antara pembangunan industri (yang menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi) dan perlindungan lahan pertanian (yang menjadi prioritas ketahanan pangan dan lingkungan).

Penegakan hukum terhadap konversi lahan pertanian yang tidak legal masih terbatas, dan jarang ada penindakan nyata terhadap pelaku. Mekanisme insentif finansial untuk perlindungan lahan pertanian (seperti pembayaran langsung ke petani atau pemilik lahan yang menjaga lahan tetap pertanian) masih belum ada.

4.2. Formulasi Strategi SWOT

4.2.1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*): *Growth Strategy*

Inisiatif SO-1: Intensifikasi Produksi dan Diversifikasi Komoditas Premium

Strategi ini memanfaatkan kekuatan infrastruktur irigasi teknis yang sudah mapan dan kondisi agroekosistem ideal untuk meningkatkan produktivitas padi. Mekanisme implementasinya adalah melalui Farmer Field School (FFS) tematik yang saat ini telah diselenggarakan di setiap BPP, di mana petani belajar langsung dari plot demonstrasi tentang teknologi jajar legowo, sistem pengairan berselang, penggunaan varietas unggul bersertifikat, dan manajemen hama terpadu (MHT).

Seiring dengan intensifikasi padi, strategi ini juga mendorong diversifikasi pola tanam dari padi-padi-palawija menjadi padi-hortikultura-palawija, memanfaatkan lokasi strategis Kabupaten Tangerang dan kedekatan ke pasar Jakarta yang permintaannya tinggi terhadap hortikultura premium. Investasi diperlukan untuk menyediakan benih hortikultura berkualitas, pelatihan budidaya hortikultura, dan fasilitasi akses pasar.

Inisiatif SO-2: Pengembangan Agribisnis Terintegrasi dan Agroindustri Hilir

Memanfaatkan kelembagaan petani yang sudah ada (poktan, beberapa gapoktan, dan koperasi), strategi ini mendorong formasi klaster agroindustri kecil-menengah yang mengolah hasil pertanian lokal menjadi produk dengan nilai tambah tinggi. Fokus awal adalah pada: pengolahan tepung beras untuk pasar bakery dan food service; pembuatan keripik sayuran dan produk makanan ringan berbahan sayuran untuk pasar retail modern dan export; dan pakan ternak organik dari limbah pertanian dan palawija lokal.

Implementasi melibatkan pelatihan intensif untuk UMK tentang teknologi pengolahan, manajemen higienis dan sanitasi, branding dan packaging, sertifikasi BPOM dan halal, serta linkage dengan distributor dan retailer modern. Dukungan juga diberikan dalam bentuk subsidi peralatan (mesin pengering, mesin potong, alat pengemasan) dan akses kredit untuk operasional. Model bisnis yang dikembangkan adalah *collective marketing* melalui koperasi sehingga UMK individual dapat memanfaatkan ekonomi skala dalam supply, branding, dan marketing.

Inisiatif SO-3: Digitalisasi dan Smart Agriculture Platform

Memanfaatkan bonus demografi (penduduk muda usia produktif) serta perkembangan teknologi digital yang semakin terjangkau, strategi ini mengimplementasikan Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi (SIPT) yang berbasis mobile dan web platform. SIPT menyediakan fitur-fitur terintegrasi: monitoring lahan real-time (area, kondisi tanaman, input penggunaan), peramalan cuaca berbasis AI dengan reliabilitas tinggi, informasi pasar dan harga komoditas update harian, dan decision support system untuk optimalisasi produksi.

Platform ini dirancang untuk aksesibilitas tinggi: offline-enabled (bisa digunakan di area dengan internet lemah), interface simple dan user-friendly dalam bahasa lokal, dan terintegrasi dengan sistem pemerintah dan ekosistem pasar. Petani bisa mengakses informasi real-time melalui smartphone, membantu optimalisasi keputusan bertani (kapan menyiram, kapan panen, kapan menjual, ke mana menjual). Pasar bisa menggunakan platform yang sama untuk pengadaan langsung dari kelompok petani, mengurangi perantara.

Inisiatif SO-4: Pemasaran dan Branding Produk Lokal Premium

Memanfaatkan lokasi strategis dekat Jakarta, pasar konsumen premium yang berkembang, dan peluang pasar organik dan sertifikasi, strategi ini membangun brand produk pertanian Kabupaten Tangerang sebagai "hortikultura dan padi premium berkelanjutan dari Tangerang."

Branding ini dikombinasikan dengan sertifikasi internasional (GlobalGAP untuk hortikultura, sertifikasi organik dan ketelusuran) yang memberikan akses ke pasar premium dan ekspor.

Implementasi melibatkan: promosi produk melalui media digital dan tradisional; partisipasi dalam pameran-pameran lokal, nasional, dan internasional; membangun cerita produk (storytelling tentang petani, proses produksi, keberlanjutan) untuk mendapatkan segmen konsumen yang lebih luas; dan fasilitasi akses ke pengecer modern dan platform e-commerce.

Diversifikasi jalur penjualan juga difasilitasi: penjualan secara langsung melalui pasar tani dan pusat rekreasi serta agrowisata; penjualan online melalui marketplace dan media sosial (Instagram, TikTok); kemitraan dengan pemasok dan industri pengolahan; dan ekspor ke pasar ASEAN (Singapura, Malaysia) dan Asia Timur (Jepang, Korea).

Agro-tourism juga menjadi bagian dari strategi ini: pengembangan farm-stay, agro-edukasi, dan experiential marketing untuk city dwellers yang ingin belajar tentang pertanian lokal dan produk organik.

Inisiatif SO-5: Kapasitas SDM dan Penyuluhan Berkelanjutan

Memanfaatkan jaringan 8 BPP dan kelembagaan petani sebagai hub pembelajaran dan inovasi, strategi ini meningkatkan kualitas dan kontinuitas penyuluhan pertanian. Mekanisme implementasinya meliputi: pelatihan berkelanjutan untuk penyuluh tentang teknologi baru, agribisnis, digitalisasi, dan coaching skills; pengembangan petani muda sebagai *extension agents* dan *entrepreneurs* melalui program mentoring dan business incubation; dan sistem mentoring horisontal di mana petani sukses menjadi mentor bagi petani pemula.

BPP di-upgrade menjadi learning center yang tidak hanya menyediakan penyuluhan, tetapi juga etalase teknologi, pemasok input, dan penghubung pasar. Penyuluh mendapat insentif berbasis kinerja untuk kualitas penyuluhan dan ukuran adopsi. Petani muda entrepreneur mendapat dukungan dalam bentuk hibah awal, pelatihan business management, akses ke networking dan mentoring, dan fasilitasi pasar.

Target adalah menciptakan sistem penyuluhan yang sustainable dan berbasis permintaan, di mana petani aktif mencari pembelajaran daripada sistem push tradisional.

4.2.2. Strategi WO (*Weaknesses - Opportunities*): *Diversification Strategy*

Inisiatif WO-1: Proteksi dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Strategi ini memanfaatkan peluang kebijakan nasional tentang LP2B dan momentum pemerintah kabupaten untuk mengatasi kelemahan internal berupa alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Implementasinya dimulai dengan fase pemetaan dan identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan: tim dari Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketenagakerjaan melakukan survei lapangan dengan bantuan citra satelit untuk mengidentifikasi lahan sawah yang produktif, memiliki akses irigasi baik, dan tidak berada di dalam rencana pengembangan industri/permukiman.

Lahan yang teridentifikasi kemudian diformalkan melalui proses administratif: penetapan LP2B melalui Perda, integrasi dalam RDTR/RTRW kabupaten, dan pendaftaran di sistem data terpadu pemerintah. Mekanisme perlindungan yang diimplementasikan termasuk: pelarangan konversi lahan non-pertanian melalui regulasi, monitoring satelit berkala, dan sistem penindakan hukum terhadap illegal conversion. Insentif juga diberikan kepada petani/pemilik lahan yang tetap menjaga lahan sebagai pertanian (pengurangan pajak, kemudahan mendapatkan kredit, atau bantuan langsung dalam jangka panjang).

Inisiatif WO-2: Penguatan Infrastruktur dan Sistem Irigasi

Strategi ini menggunakan peluang program pemerintah (Dana Desa, APBD, Pemerintah Pusat) untuk menutup kelemahan infrastruktur irigasi. Implementasinya terdiri dari tiga komponen utama:

Pertama, rehabilitasi jaringan irigasi setengah teknis yang sudah ada tetapi tidak berfungsi optimal: perbaikan saluran utama dan sekunder, pengerusan kolam irigasi, penggantian pintu air yang rusak, dan pelatihan untuk kelembagaan air (P3A/IP3K) tentang operation dan maintenance. Fokus geografis adalah kecamatan Balaraja, Jayanti, Cisoka, Solear, dan Jambe yang memiliki proporsi tinggi irigasi setengah teknis atau tadah hujan.

Kedua, pilot sistem irigasi modern (smart irrigation dan drip irrigation) di 5–10 lokasi lahan tadah hujan atau marginal untuk demonstrasi teknologi. Sistem ini menggunakan sensor kelembaban tanah, smart meter, dan mobile monitoring app untuk mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pemborosan. Pilot ini juga memberikan training kepada petani dan kelompok P3A tentang cara mengoperasikan dan maintain sistem modern, serta business model untuk sustainable operation.

Ketiga, pembangunan embung lokal (small scale reservoir) di 8–10 lokasi strategis di setiap BPP untuk panen air hujan. Embung dengan kapasitas 5.000–10.000 m³ dibangun di titik-titik tertentu untuk menampung limpasan air hujan yang tidak tergunakan, yang kemudian bisa dialokasikan untuk irigasi di musim kemarau atau untuk pasokan air komunitas. Pembangunan embung juga memberikan manfaat dalam hal pengendalian banjir di musim hujan dan mengisi kembali cadangan air tanah.

Inisiatif WO-3: Pembiayaan dan Akses Modal Petani

Strategi ini memanfaatkan peluang program pembiayaan pemerintah (KUR, BUMDes, Dana Desa) untuk mengatasi kelemahan akses modal yang dihadapi petani. Implementasinya melibatkan: fasilitasi akses KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan subsidi bunga dari pemerintah kabupaten sehingga efektif bunga yang ditanggung petani menjadi lebih rendah; pembentukan dan pemberdayaan koperasi simpan pinjam di tingkat desa/kelompok untuk menyediakan akses modal mikro dengan bunga kompetitif; dan pengaktifan mekanisme BUMDes untuk kredit program.

Program asuransi pertanian terintegrasi juga difasilitasi melalui partnership dengan PT Asuransi Pertanian dan provider asuransi swasta. Asuransi mencakup risiko produksi (gagal panen karena bencana alam, hama/penyakit), risiko harga (fluktuasi harga produk), dan risiko aset (rusaknya infrastruktur pertanian). Premium asuransi di-subsidi oleh pemerintah sehingga beban petani diminimalkan.

Kolaborasi dengan fintech pertanian juga difasilitasi untuk memberikan alternatif akses modal yang fleksibel (penilaian kredit berbasis alternative data, disbursement cepat, tenor fleksibel).

Inisiatif WO-4: Manajemen Usahatani Digital dan Pencatatan Terstruktur

Strategi ini menggunakan peluang teknologi digital yang terjangkau untuk menutup kelemahan manajemen usahatani yang lemah. Implementasinya dimulai dengan implementasi software pencatatan usahatani digital (berbasis open-source atau freemium) untuk setiap kelompok tani dan gapoktan. Software ini mencatat biaya produksi per item (benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dll), hasil panen, penjualan, dan profit margin untuk setiap musim tanam.

Data dari setiap kelompok dikumpulkan dalam data warehouse kabupaten yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan masukan terkait tren produktivitas per kecamatan, perbandingan struktur biaya, analisis harga dan pasar, dan rekomendasi perencanaan bisnis. Dashboard analitik disediakan untuk kelompok tani dan dinas untuk memonitor kinerja dan pengambilan keputusan. Pelatihan manajemen usahatani juga diberikan kepada ketua kelompok dan administrators tentang cara menggunakan data untuk perencanaan produksi, perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan.

Inisiatif WO-5: Regenerasi Petani Muda dan Program "Petani Muda Tangerang"

Strategi ini memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah untuk petani muda dan program start-up pertanian untuk mengatasi kelemahan dalam hal migrasi petani muda dan rendahnya daya tarik sektor pertanian. Program "Petani Muda Tangerang" dirancang sebagai paket comprehensive yang mencakup:

Pertama, matching grant untuk petani muda (umur 18–40 tahun) yang berkomitmen untuk berwirausaha di sektor pertanian: pemerintah memberikan kontribusi dari total modal usaha, dengan sisanya dari petani/investor private. Dana hibah digunakan untuk akuisisi lahan, peralatan dan input, dan modal kerja.

Kedua, pelatihan intensif tentang manajemen agribisnis, transfer teknologi, akses pasar, dan pengelolaan keuangan yang dikombinasikan dengan mentoring dari petani sukses. Petani muda mendapat akses ke jejaring praktik pertanian terbaik dan sumber informasi dan teknologi.

Ketiga, fasilitasi akses ke pasar: retailer modern, hypermarket, atau food service untuk kontrak pasokan; membantu petani muda untuk memenuhi standar kualitas dan konsistensi jumlah pasokan yang dipersyaratkan.

Keempat, insentif tambahan dalam bentuk subsidi input (benih, pupuk organik), tax incentive, dan prioritas dalam program penyuluhan/training yang lain.

Inisiatif WO-6: Pengembangan Agroindustri Hilir dan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Strategi ini memanfaatkan peluang agribisnis dan pertanian nilai tambah untuk mengembangkan cluster agroindustri kecil di setiap kecamatan. Cluster ini berfokus pada pengolahan dan value-added product dari hasil pertanian lokal: tepung beras, beras organik, keripik sayuran, pakan ternak organik, pupuk kompos, dan produk turunan lainnya. Setiap cluster terdiri dari 5–10 UMK yang saling kolaborasi dalam supply bahan baku, pelatihan, branding, dan marketing.

Dukungan diberikan dalam bentuk: pelatihan teknologi pengolahan dan food safety untuk entrepreneur UMK; subsidi peralatan (mesin pengering, mixer, pengemasan, pelabelan); fasilitasi sertifikasi BPOM, halal, dan standar kualitas lainnya; dan marketing/branding support melalui platform bersama dan keikutsertaan dalam pameran/pameran perdagangan.

Model bisnis yang dikembangkan adalah koperasi UMK di mana petani sebagai pemasok bahan baku dan UMK sebagai processor/manufacturer. Hubungan ini diatur dalam kontrak pasokan yang jelas sehingga petani mempunyai pasar terjamin dan UMK mempunyai pemasok stabil. Pemasaran dan branding bersama juga dilakukan sehingga produk dari kluster punya brand yang dikenal pasar.

4.2.3. Strategi ST (*Strengths-Threats*): *Defensive Strategy*

Inisiatif ST-1: Adaptasi Perubahan Iklim dan Resiliensi Produksi

Strategi ini memanfaatkan kekuatan sistem irigasi teknis yang mapan dan kelembagaan petani yang sudah ada untuk mengembangkan resiliensi produksi dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan variabilitas cuaca ekstrem. Implementasinya dimulai dengan pengembangan climate-smart agriculture roadmap untuk Kabupaten Tangerang yang mencakup: analisis proyeksi perubahan iklim lokal (curah hujan, suhu, kejadian ekstrem); identifikasi agroekosistem yang rentan; dan rekomendasi strategi adaptasi komoditas-spesifik dan lokasi-spesifik.

Implementasi FFS berbasis iklim diselenggarakan di mana petani belajar tentang: varietas tanaman yang tahan iklim ekstrem (toleran banjir dan kekeringan); pola tanam yang adaptif terhadap variabilitas curah hujan; pengelolaan air dan teknik teknik konservasi; dan manajemen pengolahan tanah untuk resiliensi jangka panjang. Teknologi monitoring cuaca dan sistem peringatan dini juga dikembangkan menggunakan IoT sensor dan AI prediction model, memberikan alert kepada petani tentang peristiwa cuaca ekstrem yang akan datang (kemarau panjang, banjir, serangan OPT) sehingga petani dapat melakukan antisipasi.

Diversifikasi komoditas juga menjadi strategi adaptasi: shift dari pola padi-padi-padi menuju padi-hortikultura-palawija atau bahkan padi-ikan (sistem aquaculture di persawahan) untuk penyebaran risiko dan diversifikasi pendapatan. Infrastruktur embung yang dibangun juga berfungsi sebagai infrastuktur adaptasi untuk mengatasi kekeringan.

Inisiatif ST-2: Efisiensi Input dan Keberlanjutan Lingkungan

Strategi ini memanfaatkan kelembagaan petani untuk mempromosikan pengurangan penggunaan input kimia dan adopsi pertanian berkelanjutan, menghadapi ancaman degradasi lingkungan dan peningkatan biaya input. Implementasinya meliputi: program pertanian organik dengan transisi gradual yang didukung oleh subsidi input organik (kompos, pupuk organik, pestisida hayati) untuk mengurangi beban petani selama periode transisi; pelatihan tentang composting, mulching, dan teknik pengendalian hama dan penyakit; dan sertifikasi organic untuk produk yang sudah memenuhi standar.

Manajemen hama terpadu (MHT) didukung untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sambil mempertahankan efektivitas pengendalian hama. Training tentang pemantauan populasi hama, threshold of economic injury, dan penggunaan predator alami, pestisida hayati, dan pestisida kimia yang targeted diperlukan.

Dampak dari inisiatif ini adalah: pengurangan biaya input dalam jangka menengah (setelah periode transisi organik); peningkatan harga produk karena premium untuk produk yang tersertifikasi organik; dan perbaikan kualitas lingkungan (air irigasi lebih bersih, tanah lebih fertile, biodiversity meningkat).

Inisiatif ST-3: Stabilisasi Harga dan Perlindungan Pendapatan Petani

Strategi ini memanfaatkan kelembagaan petani (gapoktan, koperasi) untuk membentuk sistem stabilisasi harga dan perlindungan pendapatan, menghadapi ancaman volatilitas harga. Implementasinya meliputi:

Pertama, advocacy ke pemerintah pusat untuk kebijakan price floor (harga dasar) dan harga penjamin untuk komoditas strategis seperti padi, cabai, dan bawang. Jika advocacy berhasil, pemerintah akan melakukan operasi pembelian kembali di saat harga jatuh di bawah harga dasar, memberikan jaminan kepada petani tentang pendapatan minimum.

Kedua, fasilitasi kemitraan kontrak antara gapoktan/koperasi dengan retailer modern, food service, dan industri pengolahan untuk menetapkan harga kontrak jangka panjang dan pasar terjamin. Hubungan ini memberikan *predictability* kepada petani tentang revenue dan mengurangi fluktuasi harga.

Ketiga, program asuransi pertanian yang mencakup risiko harga sebagai bagian dari *coverage*, memberikan perlindungan tambahan apabila harga jatuh di bawah batas tertentu meskipun produksi normal.

Keempat, pembentukan lumbung pangan komunitas yang berfungsi sebagai buffer stock. Di saat panen dan harga jatuh, petani bisa menjual ke lumbung dengan harga floor, dan lumbung menyimpan beras. Di saat kemarau dan harga tinggi, lumbung menjual kembali ke pasar atau untuk pasokan pangan darurat komunitas.

Inisiatif ST-4: Penguatan Regulasi dan Koordinasi Multi-Stakeholder

Strategi ini menggunakan kekuatan institusi pemerintah dan jaringan stakeholder untuk menghadapi ancaman fragmentasi kebijakan dan regulasi lemah. Implementasinya meliputi: pengembangan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian dan zonasi pertanian yang ketat; pembentukan Tim Koordinasi Pertanian Berkelanjutan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdiri dari Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan, dan Dinas Pendidikan untuk penyelarasan perencanaan dan implementasi.

Regulasi industri juga dikembangkan untuk membatasi dampak polusi: audit lingkungan untuk industri baru, ketentuan untuk pengelolaan limbah sebelum pembuangan, insentif pajak untuk industri "green," dan penalty untuk pelanggar. Koordinasi dengan BUMN dan korporat besar juga difasilitasi untuk program corporate social responsibility (CSR) yang sejalan dengan pertanian berkelanjutan dan pengembangan masyarakat.

Inisiatif ST-5: Positioning Pasar Kompetitif dan Diferensiasi Produk

Strategi ini memanfaatkan infrastruktur dan SDM yang ada untuk memposisikan produk Kabupaten Tangerang sebagai hortikultura dan padi premium dan berkelanjutan yang berbeda dari produk impor. Implementasinya meliputi: standar dan sertifikasi produk untuk diferensiasi (GlobalGAP untuk hortikultura, sertifikasi organik, Indikasi Geografis untuk produk khas Tangerang); membangun cerita produk (storytelling) yang sejalan dengan preferensi konsumen tentang proses produksi lokal yang berkelanjutan, petani, dan komunitas yang berkembang.

Kerjasama strategis dengan industri pengolahan dan distributor modern juga difasilitasi untuk memposisikan produk di segmen premium supermarket, *boutique retailers*, dan food service.

Branding dan marketing campaign menggunakan digital channels (social media, e-commerce) yang efektif dalam menjangkau pasar target. Partisipasi di pameran pasar internasional juga untuk membangun pasar ekspor.

Target adalah produk Tangerang dikenal sebagai produk premium yang berkelanjutan di segmen menengah dan menengah atas Jabodetabek dan pasar ekspor regional.

Inisiatif ST-6: Mitigasi Penurunan Basis Petani dan Program Regenerasi

Strategi ini memanfaatkan kelembagaan petani dan program regenerasi untuk menghadapi ancaman migrasi petani muda dan putusnya generasi pengetahuan. Implementasinya meliputi: program regenerasi petani melalui "Petani Muda Tangerang" yang sudah dijelaskan di bagian WO-5; mekanisasi pertanian dengan subsidi untuk mengurangi beban kerja fisik dan meningkatkan daya tarik pertanian (traktor, *combine harvester*, *power tiller* disubsidi 30–50% dan dikelola melalui koperasi/BUMDes untuk digunakan bersama); dan pengembangan usaha jasa pertanian (penyedia jasa pertanian) sebagai peluang untuk petani muda entrepreneur.

Dokumentasi pengetahuan pertanian lokal juga dilakukan melalui "school of farming" yang mengkompilasi best practice petani lokal dan menjadikannya curriculum untuk training future farmer dan extension agent.

4.2.4. Strategi WT (*Weakness - Threats*) : *Survival Strategy*

Inisiatif WT-1: Manajemen Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim

Strategi ini fokus pada minimize kelemahan dan avoid threats yang paling merusak, dengan prioritas pada manajemen risiko komprehensif. Implementasinya meliputi: asuransi pertanian kompulsori (bukan voluntary) untuk semua petani yang mengusahakan lahan pangan sebagai bentuk mandat perlindungan; diversifikasi komoditas untuk petani yang berlokasi di area rentan (misalnya petani di area tadah hujan beralih ke hortikultura atau peternakan yang lebih resilient); dan sistem peringatan dini dan protokol kebencanaan (*disaster response protocol*) untuk komunitas petani.

Program penghijauan dan konservasi lahan juga dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam (erosi, banjir) dan meningkatkan fungsi ekosistem. Cadangan benih dan pakan ternak komunitas dibentuk untuk respon darurat apabila terjadi kegagalan panen atau bencana.

Inisiatif WT-2: Prioritas Perlindungan Lahan Pertanian Eksisting

Strategi ini menempatkan perlindungan lahan pertanian yang sudah ada (terutama sawah irigasi teknis yang paling produktif) sebagai prioritas absolut. Implementasinya adalah: monitoring satelit berkala dengan citra satelit beresolusi tinggi untuk identifikasi alih fungsi lahan; penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar; dan program pembelian lahan pertanian untuk pemilikan kolektif melalui koperasi atau BUMDes sehingga lahan tidak bisa dijual keluar ke industri. Mapping lahan prioritas untuk LP2B dilakukan dan dipublikasikan sehingga ada kejelasan tentang mana lahan yang boleh dan tidak boleh dikonversi.

Inisiatif WT-3: Penguatan Kelembagaan Petani dan Koperasi

Strategi ini fokus pada penguatan institusi petani sebagai tameng terhadap krisis. Implementasinya meliputi: pelatihan intensif manajemen koperasi dan gapoktan untuk keberlanjutan keuangan, tata kelola, dan pelayanan anggota; pembentukan lumbung pangan, yang melayani berbagai tujuan (stabilisasi harga, pasokan pangan darurat dan sumber

pendapatan); dan sistem simpan pinjam lokal yang menyediakan akses modal yang cepat untuk petani.

Inisiatif WT-4: Pembatasan Dampak Industri dan Polusi

Strategi ini fokus pada strategi perlindungan terhadap degradasi lingkungan yang disebabkan industri. Implementasinya meliputi: monitoring kualitas air irigasi secara berkala dan publikasi hasil; system water treatment untuk irigasi yang tercemar; zonasi industri yang terpisah dari lahan pertanian prioritas; dan program buffer zone berupa penghijauan di sekitar industri dan lahan pertanian. Kolaborasi dengan otoritas lingkungan dan kesehatan untuk penegakan regulasi polusi industri juga diperlukan.

Inisiatif WT-5: Crisis Management dan Business Continuity

Strategi ini merancang protokol dan infrastructure untuk tanggap krisis yang cepat dan meminimalkan kerusakan. Implementasinya meliputi: asuransi pertanian sebagai financial buffer; cadangan benih pangan berkualitas di level komunitas untuk menanam kembali setelah kegagalan panen; *network mutual assistance* antar petani dan komunitas untuk saring risiko; dan pelatihan untuk pemulihan pasca bencana untuk pengurus kelompok tani. Protocol response untuk berbagai skenario bencana (banjir, kekeringan, hama outbreak, harga jatuh) dikembangkan dan di-drill secara berkala.

Inisiatif WT-6: Advokasi Kebijakan dan Perlindungan Legal Petani

Strategi ini fokus pada advokasi untuk kebijakan yang melindungi petani dan memberikan dukungan hukum bagi petani yang mengalami ketidakadilan. Implementasinya meliputi: advocacy ke Pemerintah Pusat untuk kebijakan harga dasar dan harga penjamin; advokasi untuk insentif pajak dan subsidi input bagi petani kecil-menengah; bantuan hukum untuk petani yang lahan diambil alih industri secara tidak adil; dan media kampanye "Buy Local" untuk support pertanian lokal. Forum petani dan civil society juga diaktifkan untuk suara bersama dalam dialog kebijakan dengan pemerintah.

Tabel 54. Ringkasan Matriks Strategi Swot

Dimensi	Strategi SO: Growth	Strategi WO: Diversification	Strategi ST: Defensive	Strategi WT: Survival
Fokus Utama	Intensifikasi & diversifikasi premium	Perlindungan lahan & infrastruktur	Adaptasi iklim & stabilisasi	Manajemen risiko & proteksi
Inisiatif Kunci	Intensifikasi produksi padi 6,5 ton/ha; Agribisnis & agroindustri; Digitalisasi SIPT; Branding premium; FFS & SDM; Kemitraan riset	LP2B & zonasi RDTR; Rehabilitasi irigasi & embung; Akses modal & asuransi; Usahatani digital; Petani muda 200-300/tahun; Agroindustri 50-100 UMK	Climate-smart agriculture; Pertanian organik 20-30%; Stabilisasi harga & price floor; Regulasi & koordinasi; Positioning premium; Regenerasi petani muda	Asuransi kompensasi & diversifikasi; Perlindungan nol konversi; Penguatan kelembagaan; Pembatasan polusi; Crisis management; Legal protection

Lead Implementation	Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Universitas, Private Sector	Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, BUMDes	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan, Stakeholder Multi-sektor	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan, Tim Legal, Community Organization
---------------------	--	---	---	--

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi wilayah, analisis situasi, serta pemetaan masalah yang telah dilakukan di delapan wilayah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se-Kabupaten Tangerang, dapat ditarik beberapa simpulan strategis sebagai berikut:

1. Posisi Strategis dan Potensi Ekonomi Wilayah

Kabupaten Tangerang memiliki keunggulan komparatif yang signifikan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) pangan bagi DKI Jakarta dan pusat industri Banten. Dukungan agroekosistem yang beragam—mulai dari dataran rendah hingga pesisir—memungkinkan pengembangan komoditas yang variatif, meliputi tanaman pangan (padi sawah), hortikultura (cabai, timun suri, sayuran daun), serta peternakan (sapi, domba, unggas). Pasar domestik yang besar dengan populasi mencapai 3,4 juta jiwa serta aksesibilitas infrastruktur yang baik menjadi modal utama bagi pengembangan agribisnis yang menguntungkan.

2. Tantangan Struktural Alih Fungsi Lahan

Ancaman terbesar bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Tangerang adalah laju alih fungsi lahan yang masif akibat tekanan urbanisasi dan industrialisasi, terutama di wilayah peri-urban seperti BPP Caringin, Sukatani, dan Sepatan. Data menunjukkan penurunan luas baku lahan sawah yang signifikan (hingga 35% di beberapa lokasi), yang jika tidak dikendalikan, berpotensi menggerus basis produksi pangan daerah secara permanen.

3. Dinamika Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Meskipun Kabupaten Tangerang sedang menikmati bonus demografi, sektor pertanian menghadapi tantangan regenerasi yang serius. Rendahnya minat generasi muda dan menuanya usia rata-rata petani menjadi isu krusial. Namun, modal sosial berupa 155 unit kelembagaan petani (Poktan, KWT, Gapoktan) yang tersebar di seluruh kecamatan merupakan aset vital yang masih perlu ditingkatkan kapasitas manajerial dan daya tawarnya.

4. Permasalahan Teknis dan Teknologi Budidaya

Analisis GMP (*Gawat, Mendesak, Penyebaran*) menunjukkan bahwa pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan rendahnya adopsi teknologi anjuran (seperti sistem tanam Jajar Legowo dan pemupukan berimbang) masih menjadi masalah prioritas di hampir seluruh BPP. Ketergantungan pada pola budidaya konvensional dan cuaca (tadah hujan) menyebabkan produktivitas belum mencapai potensi maksimalnya (gap produktivitas padi 5,3 ton/ha vs potensi >6 ton/ha).

5. Kerentanan terhadap Iklim dan Bencana

Wilayah pertanian di Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim, khususnya risiko kekeringan pada lahan tadah hujan saat

fenomena El Nino dan banjir di wilayah pesisir atau dataran rendah. Infrastruktur irigasi yang ada, meskipun sebagian sudah teknis, masih memerlukan rehabilitasi dan perluasan jangkauan untuk menjamin indeks pertanaman (IP) yang lebih tinggi.

5.2. Saran Kebijakan

Berdasarkan simpulan di atas dan matriks strategi SWOT yang telah dirumuskan, berikut adalah rekomendasi kebijakan dan langkah operasional yang disarankan untuk Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2025:

1. Perlindungan Lahan dan Tata Ruang Pertanian (LP2B)

- a. **Implementasi Tegas:** Pemerintah Daerah perlu mempercepat penetapan dan pengawasan ketat zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menahan laju konversi lahan.
- b. **Insentif bagi Petani:** Memberikan insentif khusus (pengurangan pajak PBB, prioritas bantuan sarana) bagi petani yang mempertahankan lahan produktifnya di zona hijau.
- c. **Urban Farming:** Untuk wilayah dengan lahan sempit (zona merah urban), kebijakan harus diarahkan pada intensifikasi *urban farming*, vertikultur, dan pemanfaatan pekarangan untuk hortikultura bernilai ekonomi tinggi.

2. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian (Pertanian 4.0)

- a. **Adopsi Teknologi Tepat Guna:** Mendorong penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) modern untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, serta teknologi *low-cost* seperti sensor kelembaban tanah dan aplikasi pemantauan cuaca.
- b. **Pemasaran Digital:** Memfasilitasi petani dan KWT untuk memotong rantai pasok yang panjang melalui pemasaran digital (*e-commerce*, media sosial) agar dapat menikmati margin keuntungan yang lebih adil.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Regenerasi Petani

- a. **Program Petani Milenial:** Menyusun kurikulum penyuluhan yang berorientasi agribisnis dan teknologi untuk menarik minat pemuda. Fokus bukan hanya pada *on-farm*, tetapi juga pengolahan hasil dan pemasaran.
- b. **Penguatan BPP:** Menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data, konsultasi agribisnis, dan simpul pembelajaran bagi petani.

4. Rekayasa Teknis dan Adaptasi Iklim

- a. **Sekolah Lapang (SL):** Masifkan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan SL-Iklim untuk meningkatkan ketangguhan petani menghadapi serangan OPT dan anomali cuaca.
- b. **Infrastruktur Air:** Prioritas anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pembangunan embung atau sumur pantek di wilayah rawan kekeringan (sawah tadah hujan).

5. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani

- a. **Korporasi Petani:** Mendorong transformasi kelompok tani dari sekadar unit belajar menjadi unit ekonomi produktif (Koperasi/BUMP atau bentuk kelembagaan ekonomi petani lainnya) yang mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menjalin kemitraan dengan *off-taker* atau pasar modern.
- b. **Integrasi Tanaman-Ternak:** Mengembangkan model pertanian terpadu (*integrated farming*) untuk efisiensi biaya (pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik) dan diversifikasi pendapatan, terutama di wilayah dengan lahan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2024. Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2024
IPW Kabupaten Tangerang Tahun 2024
IPW BPP Sepatan Tahun 2024
IPW BPP Kaliasin Tahun 2024
IPW BPP Sukatani Tahun 2024
IPW BPP Kronjo Tahun 2024
IPW BPP Kampung Melayu Tahun 2024
IPW BPP Tegalkunir Tahun 2024
IPW BPP Carenang Tahun 2024
IPW BPP Carenang Tahun 2024

